

**PENGARUH TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA, PRODUK
DOMESTIK REGIONAL BRUTO, UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
DAN PENYALURAN DANA ZIS TERHADAP KEMISKINAN DI JAWA
TENGAH TAHUN 2020-2024**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh:

FIKA SAHALA

NIM: 2105026056

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024) 7608454 Semarang 50185
Website: febi.walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Fika Sahala

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Fika Sahala

NIM 2105026056

Jurusan : Ekonomi Islam

Judul : Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Produk Domestik Regional
Bruto, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Penyaluran Dana ZIS Terhadap
Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I


Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., MA.
NIP. 197512182005011002

Semarang, 3 Juni 2025

Pembimbing II


Mashilal, M.Si
NIP. 198405162019031005

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185
website : febi.Walisongo.ac.id – Email febi @ walisongo.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Fika Sahala
NIM : 2105026056
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul : Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Penyaluran Dana ZIS Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Telah diajukan dalam sidang munaqosah oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal 18 Juni 2025 dan dinyatakan **LULUS** dengan predikat cumlaude, serta dapat diterima untuk pelengkapan ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Strata I dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Semarang, 24 Juni 2025

Ketua Sidang

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 196908301994032003

Sekretaris Sidang

Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., MA.
NIP. 197512182005011002

Penguji Utama I

Dr. H. Wahab, MM.
NIP. 196909082000031001



Penguji Utama II

Sokhikhatul Mawadah, M.E.I.
NIP. 198503272018012001

Pembimbing I

Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., MA.
NIP. 197512182005011002

Pembimbing II

Mashilal, M.Si
NIP. 198405162019031005

MOTTO

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ

“Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu
untuk kamu sendiri.”

(Q.S Al-Baqarah [2]: 272)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan atas terselesaikannya skripsi ini, penulis mempersembahkannya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan berperan penting dalam perjalanan penulis, diantaranya yaitu:

1. Keluarga tercinta, terkhusus kedua orang tuaku, Bapak Rozikan dan Ibu Masrokah yang senantiasa memberikan doa, semangat, dan nasehat terbaik untuk penulis, serta adik tersayang Saharruddin, Muhammmad Yudhistira, dan Saktika Dewi yang selalu memberikan semangat dalam segala proses penulis.
2. Dosen pembimbing satu Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., MA. dan dosen pembimbing dua Mashilal, M.Si yang telah membimbing, mengarahkan serta memberi masukan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Teman-teman tercinta Anita Dyah Purnama Sari, Minatus Najihah, Aizzatul Muna, Fuji Rondlotul Haniah, dan Ananda Nur Aulia yang selalu memberikan support, semangat, dan menjadi teman seperjuangan terhebat sekaligus menjadi penguat serta pelengkap bagi penulis selama masa perkuliahan.
4. Teman-temanku Uni Zulfa, Eriana Salma Rusda, Clarista Marya Ulfa, dan Ahmad Irfan yang selalu mendukung, menyemangati, dan memberikan warna kepada penulis selama masa perkuliahan.
5. Teman-teman seperjuangan EI B 2021 yang selalu kebersamai dan menjadi keluarga dari awal hingga akhir perkuliahan serta memberikan kenangan yang sangat manis bagi penulis.

Terimakasih untuk semua yang selalu ada, atas segala wawasan, pengalaman, semangat, serta doa yang telah diberikan. Semoga karya ini membawa manfaat dan menjadi langkah awal menuju perjalanan yang lebih bermakna, baik dalam aspek keilmuan maupun kehidupan pribadi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan ini penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Penyaluran Dana Zis Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2020-2024” sebagai syarat menyelesaikan pendidikan program Strata-1 (S1) Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ferry Khusnul Mubarak, M.A selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., MA. selaku dosen wali yang telah membimbing dan memberikan arahan selama masa perkuliahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini dengan baik.
5. Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., MA. dan Mashilal, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memotivasi penulis.
6. Bapak/Ibu dosen dan tenaga kependidikan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama penulis menempuh pendidikan.
7. Orang tua, teman-teman dan berbagai pihak atas bantuan, semangat, motivasi, dan doa kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan belum mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat memberikan manfaat serta dapat menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Semarang, 2 Juni 2025

Penulis

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh keyakinan, kejujuran serta tanggung jawab, maka penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi teori yang pernah ditulis ataupun diterbitkan oleh orang lain. Demikian pula skripsi ini tidak berisi argumen-argumen orang lain, terkecuali beberapa sumber informasi yang terdapat dalam referensi skripsi ini yang menjadikan sebagai bahan rujukan.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fika Sahala
NIM : 2105026056
Jurusan/Program Studi : Ekonomi Islam

Menyatakan Bahwa skripsi yang berjudul:

“Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Penyaluran Dana Zis Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2020-2024”

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan peulisan saya sendiri, kecuali pada bagian tertentu yang merujuk pada sumbernya.

Semarang, 2 Juni 2025

Yang menyatakan


FIKA SAHALA
NIM.2105026056

PEDOMAN TRANSLITERASI

Merujuk pada keputusan bersama pada pedoman transliterasi No. 158 Th. 1987 dan No. 0543b/U/1987. Transliterasi diartikan sebagai pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	ša'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	w
هـ	ha'	H	ha

ء	Hamzah	,	apostrof
ي	ya'	Y	ye

2. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam transliterasi bahasa Arab diganti berupa tanda atau harakat sebagai berikut:

ـَ	Fathah (a)	تَبَرَّكَ	Ditulis	<i>tabaaroka</i>
ـِ	Kasrah (i)	إِلَيْكَ	Ditulis	<i>ilaika</i>
ـُ	Dommah (u)	دُنِّيَا	Ditulis	<i>dunyaa</i>

3. Vokal Panjang

Vokal panjang atau juga disebut sebagai Maddah ditransliterasikan berupa tanda dengan huruf seperti berikut:

Fathah + alif	<i>ā</i>	عَذَاب	Ditulis	<i>'adzābin</i>
Fathah + ya' mati	<i>ā</i>	وَعَلَى	Ditulis	<i>Wa'alā</i>
Kasrah + ya' mati	<i>ī</i>	جَمِيع	Ditulis	<i>Jamī'in</i>
Dammah + wawu mati	<i>ū</i>	قُلُوبِن	Ditulis	<i>Qulūbana</i>

4. Vokal Rangkap

Dalam vokal rangkap maka dilambangkan dengan menggabungkan antara harakat dengan huruf, contohnya dilambangkan seperti dibawah ini:

Fathah + ya' mati (ai)	أَيَّتَهُم	Ditulis	<i>aitahum</i>
Fathah + wawu mati (au)	يَوْمِنِذ	Ditulis	<i>yauma-iziy</i>

5. Ta' Marbutoh

- a. Apabila *ta' marbutoh* hidup atau dibaca dengan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah* maka ditulis dengan (t):

سَاعَة	Ditulis	<i>saa'atu</i>
بَغْتَة	Ditulis	<i>baghtatan</i>

- b. Apabila *ta' marbutah* mati atau di waqafkan maka ditulis dengan (h):

قِيَامَة	Ditulis	<i>qiyaamah</i>
رَحْمَة	Ditulis	<i>Qohmah</i>

6. Kata Sandang

- a. Jika diikuti dengan huruf Syamsiyah maka ditulis sesuai dengan huruf pertama Syamsiyah:

الرَّحْمَنُ	Ditulis	<i>ar-rohmaan</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-syamsu</i>

- b. Bila diikuti dengan huruf Qamariyyah maka ditulis dengan “al”:

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-qur'an</i>
الْإِنْسَانُ	Ditulis	<i>al-insan</i>

7. Syaddah

Tanda syaddah atau tasydid dilambangkan seperti contoh dibawah ini:

كُلَّ شَيْءٍ	Ditulis	<i>kulla syaiin</i>
يَتَّخِذْ	Ditulis	<i>Yattahiz</i>

8. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof ketika berada di tengah maupun di akhir kata.

Namun jika hamzah terletak di awal kata maka dilambangkan dengan alif:

يَأْتِي	Ditulis	<i>ya-tii</i>
لِيُطْفِئُوا	Ditulis	<i>liyuthfi-uu</i>
أَوْلِيَاءَ	Ditulis	<i>aulyaaaa-a</i>

9. Penulisan Kata dalam Rangkaian Kalimat

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا	Ditulis	<i>yaaa ayyuhalladziina aamanuu</i>
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ	Ditulis	<i>wallohu bimaa ta'maluuna bashiir</i>

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan multidimensional, mencakup rendahnya pendapatan, dan keterbelakangan ekonomi. Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun begitu persentasenya masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto dan upah minimum belum mampu secara signifikan menurunkan angka kemiskinan secara merata di seluruh wilayah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Penyaluran Dana ZIS terhadap tingkat Kemiskinan di 35 kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah selama periode 2020-2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi data panel dengan bantuan Eviews 12. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Upah Minimum Kabupaten/Kota berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan, Produk Domestik Regional Bruto dan Penyaluran Dana ZIS berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024.

Kata Kunci: Kemiskinan, PDRB, UMK, TPT, ZIS

ABSTRACT

Poverty is a complex and multidimensional social problem, encompassing low income and economic backwardness. Central Java Province has shown a downward trend in poverty rates in recent years, although the percentage is still higher than the national average. Economic growth, as reflected in the increase in Gross Regional Domestic Product and minimum wages, has not been able to significantly reduce poverty rates evenly across all regions. Therefore, this study aims to analyze the influence of Open Unemployment Rate, Regional Domestic Product, Minimum Wage of Districts/Cities, and Distribution of ZIS Funds on poverty levels in 35 districts/cities in Central Java Province during the period 2020-2024. This study employs a quantitative approach using panel data regression analysis with the assistance of Eviews 12. The results of this study indicate that, partially, the Minimum Wage of the District/City has a negative and significant effect on poverty, Regional Domestic Product and ZIS Fund Disbursement have a negative but insignificant effect on poverty, and the Open Unemployment Rate has a positive but insignificant effect on poverty in Central Java Province from 2020 to 2024.

Keywords: *Poverty, GRDP, UMK, TPT, ZIS*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	1
DAFTAR GAMBAR	2
DAFTAR GRAFIK.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Kerangka Teori.....	16
2.1.1 Teori Lingkaran Setan Kemiskinan (<i>Vicious Circle of Poverty</i>).....	16
2.1.2 Kemiskinan	17
2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka.....	23
2.1.4 Produk Domestik Regional Bruto.....	25
2.1.5 Upah Minimum Kabupaten/Kota.....	28
2.1.6 Penyaluran Dana ZIS	30
2.2 Penelitian Terdahulu	35
2.3 Kerangka Pemikiran	41
2.4 Hipotesis	41
2.4.1 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan	41
2.4.2 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan	42
2.4.3 Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Kemiskinan	43

2.4.4	Pengaruh Penyaluran Dana ZIS Terhadap Kemiskinan.....	44
BAB III	METODE PENELITIAN	46
3.1	Jenis Penelitian dan Sumber Data.....	46
3.2	Populasi dan Sampel.....	46
3.3	Metode Pengumpulan Data.....	46
3.4	Variabel Penelitian dan Pengukuran	47
3.4.1	Variabel Dependen (Terikat)	47
3.4.2	Variabel Independen (Bebas).....	47
3.4.3	Definisi Operasional Variabel.....	48
3.5	Teknik Analisis Data	50
3.5.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	50
3.5.2	Regresi Data Panel.....	50
3.5.3	Estimasi Model Regresi Data Panel.....	51
3.5.4	Penentuan Teknik Dengan Uji Regresi Data Panel	52
3.5.5	Uji Asumsi Klasik.....	52
3.5.6	Uji Hipotesis	53
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	55
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	55
4.1.1	Gambaran Umum Jawa Tengah.....	55
4.2	Deskripsi Variabel Penelitian.....	58
4.2.1	Tingkat Pengangguran Terbuka.....	58
4.2.2	Produk Domestik Regional Bruto.....	60
4.2.3	Upah Minimum Kabupaten/Kota.....	61
4.2.4	Penyaluran Dana ZIS	63
4.3	Pengujian dan Hasil Analisis Data.....	65
4.3.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	65
4.3.2	Estimasi Model Regresi Data Panel.....	66
4.3.3	Penentuan Model Regresi Data Panel.....	69
4.3.4	Uji Asumsi Klasik.....	71
4.3.5	Uji Hipotesis	73
4.4	Pembahasan	76
4.4.1	Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah....	76
4.4.2	Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah.....	76
4.4.3	Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah .	77

4.4.4 Pengaruh Penyaluran Dana ZIS terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah.....	78
BAB V PENUTUP	80
5.1 Kesimpulan	80
5.2 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persentase Penduduk Miskin di Pulau Jawa.....	7
Tabel 4.1 Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.....	56
Tabel 4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.....	59
Tabel 4.3 PDRB ADHK Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.....	60
Tabel 4.4 Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.....	62
Tabel 4.5 Penyaluran Dana ZIS BAZNAS Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.....	63
Tabel 4.6 Analisis Statistik Deskriptif.....	65
Tabel 4.7 Hasil Regresi Data Panel Common Effect Model.....	67
Tabel 4.8 Hasil Regresi Data Panel Fixed Effect Model.....	68
Tabel 4.9 Hasil Regresi Data Panel Random Effect Model.....	69
Tabel 4.10 Uji Chow.....	70
Tabel 4.11 Uji Hausman.....	71
Tabel 4.12 Uji Multikolinearitas.....	72
Tabel 4.13 Regresi Data Panel Fixed Effect Model.....	73
Tabel 4.14 Hasil Uji Parsial.....	74
Tabel 4.15 Hasil Uji Simultan.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Lingkaran Setan Kemiskinan Nurkse	16
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	41
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.....	55

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Jawa Tengah dengan Nasional.....	5
Grafik 1.2 Distribusi Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah.....	6
Grafik 1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Tengah (Persen).....	8
Grafik 1.4 Sebaran Tingkat Pengangguran Terbuka pada Kab/Kota di Jawa Tengah Tahun 2024.	8
Grafik 1.5 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Jawa Tengah.....	10
Grafik 1.6 Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Tengah Tahun 2024.....	11
Grafik 1.7 Penyaluran Dana ZIS BAZNAS Provinsi Jawa Tengah	12
Grafik 4.1 Sebaran Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2024.....	58
Grafik 4.2 Uji Normalitas.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang terus menjadi sorotan di berbagai negara, baik negara maju maupun berkembang.¹ Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensional. Badan Pusat Statistik mendeskripsikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk hidup dengan layak, lebih spesifik didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang berada di bawah batas nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk pangan maupun non pangan yang dikenal sebagai garis kemiskinan (*poverty line*).

Zulfikar dalam penelitiannya mengungkapkan, suatu keadaan dapat dikatakan sebagai kemiskinan jika individu atau kelompok tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Kebutuhan dasar ini mencakup aspek primer maupun sekunder. Aspek primer meliputi kurangnya dalam hal pengetahuan dan keterampilan, sedangkan aspek sekunder mencakup hambatan seperti lemahnya dalam jaringan sosial, minim akses terhadap sumber daya keuangan, kurangnya keamanan dari intimidasi kekerasan, serta komponen informal seperti asupan gizi yang kurang, keterbatasan pasokan air bersih, tempat tinggal yang tidak layak, layanan kesehatan yang kurang memadai, dan rendahnya tingkat pendidikan.² Tolak ukur kemiskinan tidak hanya terbatas pada kekurangan pangan maupun rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga mencakup aspek lain seperti tingkat kesehatan, akses terhadap pendidikan, keadilan dalam perlakuan hukum serta berbagai faktor sosial lainnya.³

Dalam *Outcome Document Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* telah disepakati mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun (*End poverty in all its forms everywhere*) yang merupakan poin pertama dari 17 tujuan utama SDG's. Itu berarti kemiskinan menjadi isu utama dalam pencapaian program SDG's. Oleh sebab itu, semua negara tidak terlepas dari pekerjaan pengentasan kemiskinan.⁴ Tingkat kesejahteraan penduduk di suatu negara ataupun daerah dapat dilihat melalui

¹ Muhammad Jihan Aldi, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Kemiskinan Di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2017-2022 Dengan Pengangguran Terbuka Sebagai Variabel Moderating" (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022).

² Zulfikar Hasan, "The Effect of Economic Growth and Human Development Index on Poverty in Indonesia," *Journal of Economics and Sustainability* 3, no. No.1 (2021): 42–53, <https://doi.org/10.32890/jes2021.3.1.5>.

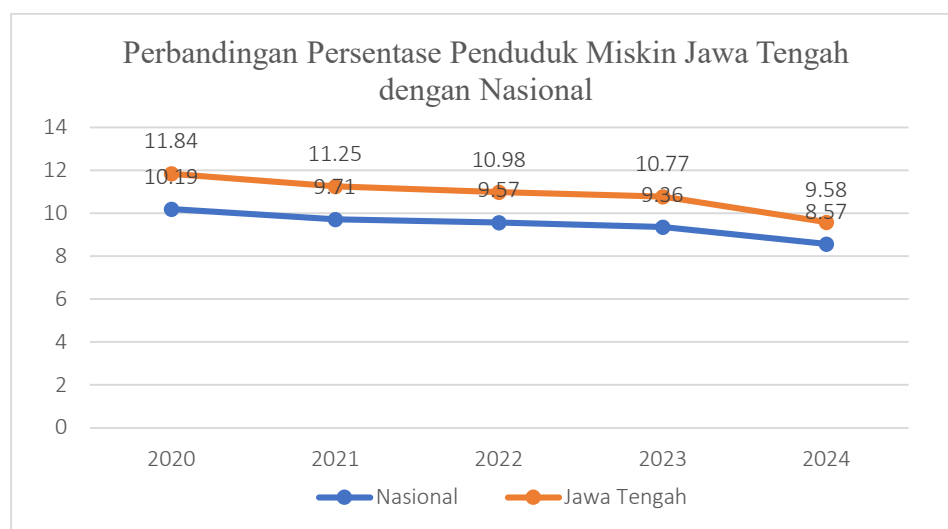
³ Debrina Vita Ferezegia, "Analisis Tingkat Kemiskinan Di Indonesia," *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* 1, no. 1 (2018): 1–6, <http://journal.vokasi.ui.ac.id/index.php/jsht/article/download/6/1>.

⁴ Darma Endrawati, Syamsu Nujum, and Abbas Selong, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Rasio Gini Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Indonesia 2017-2022," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 20145.

tingkat kemiskinan di negara maupun daerah itu sendiri. Apabila jumlah penduduk miskin di suatu wilayah meningkat, maka mengindikasikan wilayah tersebut semakin tidak sejahtera, sebaliknya ketika jumlah penduduk miskin berkurang, maka kesejahteraan suatu wilayah akan meningkat.⁵

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah yang penting untuk dikaji lebih lanjut. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk yang besar dan karakteristik demografis serta geografis yang beragam, Jawa Tengah mencerminkan dinamika kemiskinan yang khas. Pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah tercatat mencapai 3,70 juta jiwa, dengan persentase sebesar 9,58 persen dan garis kemiskinan sebesar Rp507.001 per kapita per bulan.⁶ Di sisi lain, angka kemiskinan secara nasional pada tahun yang sama berada pada kisaran 8,57 persen, dengan garis kemiskinan nasional sebesar Rp. 595.242 per kapita per bulan.⁷

Grafik 1.1 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Jawa Tengah dengan Nasional



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Grafik 1.1 menunjukkan bahwa meskipun Jawa Tengah mengalami tren penurunan angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah

⁵ Q'rene V. F. Supit, Josep B. Kalangi, and Steeva Y. L. Tumangkeng, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Minahasa," *Jurnal Berkala Efisiensi Ilmiah* 23, no. 10 (2023): 73, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/51630/44399>.

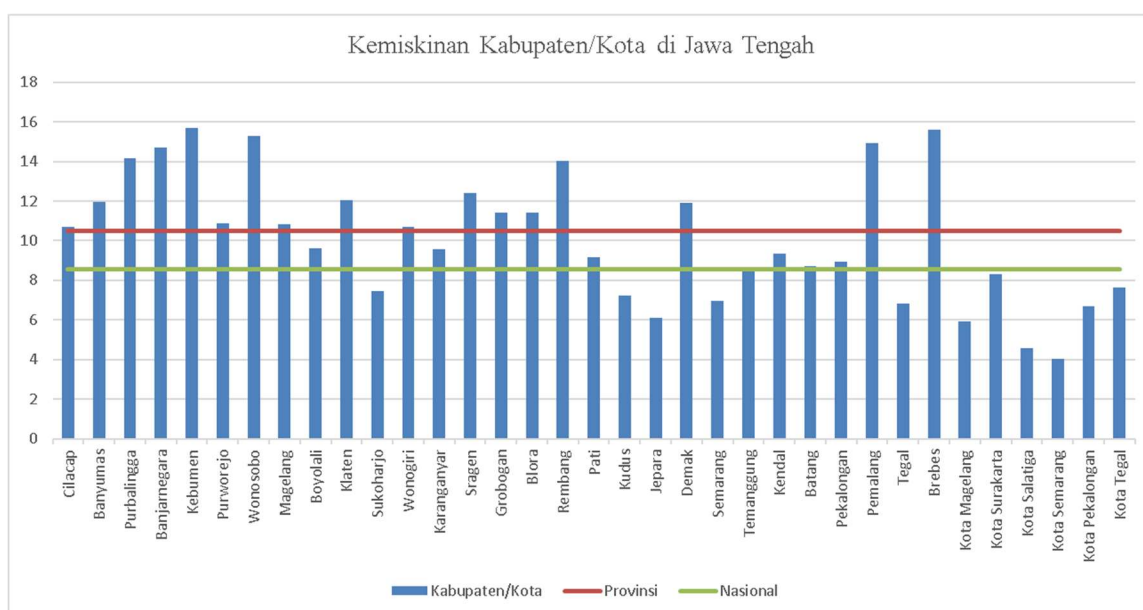
⁶ BPS, "Kemiskinan Provinsi Di Jawa Tengah Maret 2024," BPS Kabupaten Kendal, 2024, <https://kendakab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/25/330/provincial-poverty-in-central-java-march-2024.html>.*

⁷ BPS, "Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) Menurut Daerah, 2024," Badan Pusat Statistik, 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTgyIzI=/garis-kemiskinan--rupiah-kapita-bulan--menurut-daerah.html>.

masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka rata-rata nasional. Hal ini mencerminkan adanya tantangan tersendiri dalam penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah, yang mungkin tidak sepenuhnya terakomodasi oleh kebijakan berskala nasional.

Banyak sekali upaya dan usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Berbagai kebijakan, strategi, dan program seperti PKH, BNPT, BLT, subsidi energi, kartu prakerja, dan program lainnya yang dilaksanakan telah berupaya menurunkan angka kemiskinan dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, distribusi kemiskinan tidak merata, mencerminkan adanya ketimpangan antar wilayah.

Grafik 1.2 Distribusi Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024.

Grafik 1.2 menunjukkan bagaimana tingkat kemiskinan tersebar pada kabupaten/kota di Jawa Tengah. Data menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan pembangunan antar wilayah, di mana beberapa daerah mengalami beban kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan yang lain.

Di pulau Jawa, Provinsi Jawa Tengah menempati posisi kedua sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi setelah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang menempati posisi pertama. Per September 2024, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah mencapai 9,58%, sementara DIY tercatat mencapai 10,40% di periode yang sama.

Tabel 1.1 Persentase Penduduk Miskin di Pulau Jawa

Provinsi/Daerah	Persentase Penduduk Miskin di Pulau Jawa Menurut Provinsi/Daerah				
	2020	2021	2022	2023	2024
DKI Jakarta	4,69	4,67	4,61	4,44	4,14
Jawa Barat	8,43	7,97	7,98	7,62	7,08
Jawa Tengah	11,84	11,25	10,98	10,77	9,58
DI Yogyakarta	12,80	11,91	11,49	11,04	10,40
Jawa Timur	11,46	10,59	10,49	10,35	9,56
Banten	6,63	6,50	6,24	6,17	5,70

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

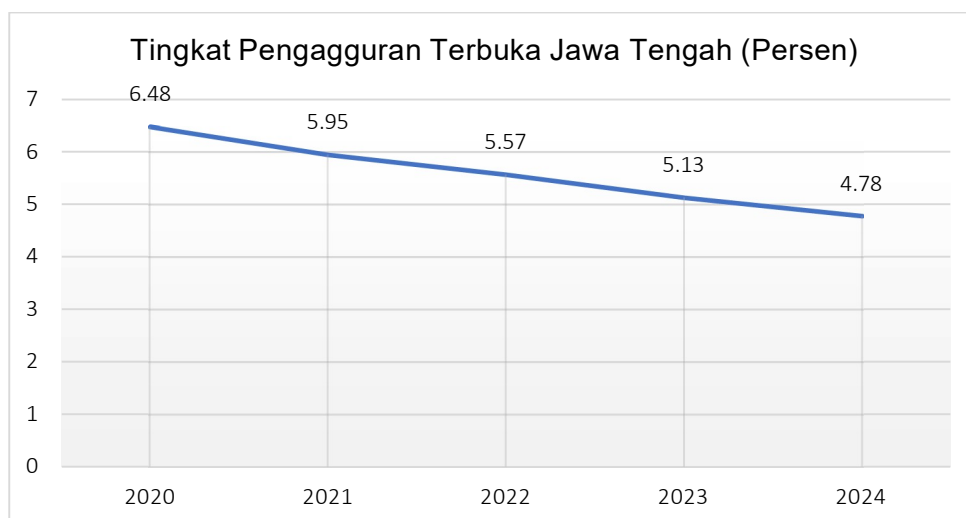
Tabel 1.1 menunjukkan persentase penduduk miskin di Jawa Tengah pada September 2024 mengalami penurunan sebesar 1,19 persen dibandingkan dengan September 2023. Meskipun konsisten mengalami penurunan persentase kemiskinan dari tahun 2020 hingga 2024, angka tersebut masih di atas rata-rata nasional yang tercatat 8,57% pada September 2024.

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kemiskinan di suatu negara. Salah satu faktor tersebut adalah Tingkat Pengangguran Terbuka. Kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh ketimpangan pendapatan, namun juga oleh rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja. Tingginya angka pengangguran di suatu daerah dapat menghambat upaya pengentasan kemiskinan. Ketika pengangguran meningkat, pendapatan masyarakat relatif rendah, sehingga menyebabkan jumlah penduduk miskin semakin bertambah.⁸ Jika ditinjau dari teori lingkaran setan kemiskinan oleh Nurske, Rendahnya produktivitas tenaga kerja akan menyebabkan rendahnya pendapatan, yang pada akhirnya masyarakat akan sulit menabung atau berinvestasi untuk meningkatkan taraf hidupnya, dan membuat masyarakat sulit keluar dari kemiskinan.⁹

⁸ Lusiana, Salsabila, and Kurniawan, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2014-2023," 205.

⁹ Hari Baskoro Nugroho, "Analisis Determinan Kemiskinan : Studi Kasus 34 Provinsi Di Indonesia," 2022, 7.

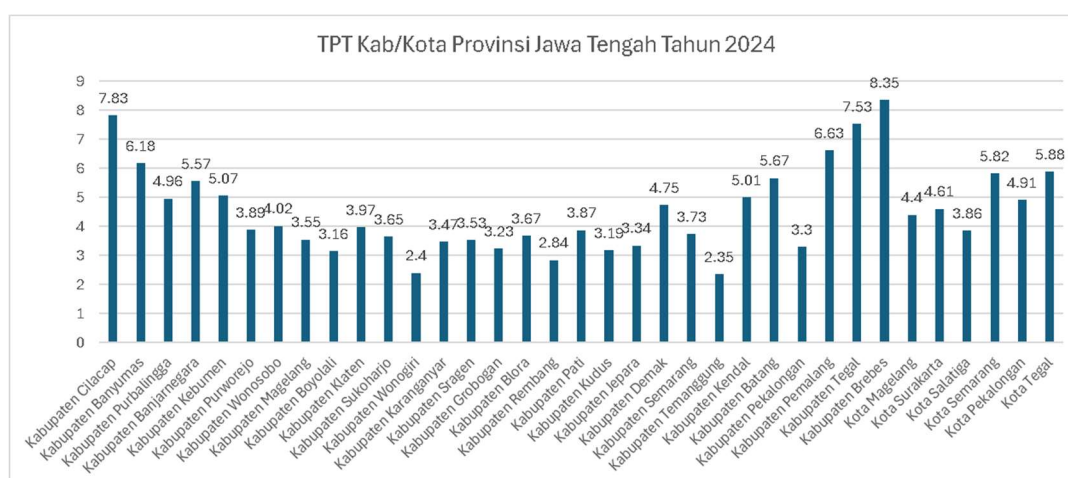
Grafik 1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Tengah (Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024.

Pada Grafik 1.3 ditunjukkan tingkat pengangguran terbuka di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 sebesar 4,78%, angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka nasional pada tahun yang sama yakni sebesar 4,91%. Setiap wilayah atau provinsi di Indonesia mungkin memiliki kondisi ekonomi yang berbeda. Beberapa daerah mungkin lebih maju sementara daerah lainnya menghadapi tantangan dalam menciptakan lapangan pekerjaan karena faktor infrastruktur, industri atau potensi ekonomi yang terbatas. Jika terdapat daerah dengan tingkat pengangguran terbuka yang lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional, hal itu menandakan adanya masalah struktural atau ketimpangan ekonomi di wilayah tersebut. Berikut sebaran tingkat pengangguran terbuka pada kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Grafik 1.4 Sebaran Tingkat Pengangguran Terbuka pada Kab/Kota di Jawa Tengah Tahun 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Hasil penelitian Sari menunjukkan apabila tingkat pengangguran turun maka kemiskinan juga akan turun. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan ketika kesempatan kerja diperluas akan mampu membentuk lingkungan ekonomi, politik, serta sosial yang mendukung masyarakat miskin dalam mengakses peluang untuk memenuhi hak-hak dasar mereka dan meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan.¹⁰ Sementara hasil penelitian Hasballah menunjukkan pengangguran terbuka memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Tidak semua individu yang menganggur dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin. Seperti halnya individu dalam kelompok pengangguran terbuka, yang terdiri dari beberapa kategori seperti mereka yang sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, sudah memiliki pekerjaan tetapi belum memulainya, dan merasa peluang kerja tidak tersedia. Sebagian dari mereka juga terlibat di sektor informal, sementara lainnya memiliki pekerjaan dengan jam kerja yang berada di bawah batas minimum yang ditentukan.¹¹

Faktor selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menurut Badan Pusat Statistik merupakan kondisi dimana terjadi kenaikan kapasitas produksi secara terus-menerus dan berkelanjutan dalam perekonomian menjadi lebih baik selama jangka waktu tertentu yang dapat diukur dari kenaikan pendapatan nasional dan pendapatan daerah.¹² Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi nasional, karena mencerminkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi dalam suatu negara selama periode tertentu. Sedangkan parameter pertumbuhan ekonomi untuk skala daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan total nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh kegiatan produksi barang dan jasa dari berbagai sektor perekonomian di suatu daerah. Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator penting untuk menilai kondisi perekonomian suatu daerah dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang tidak diimbangi dengan pemerataan pendapatan dapat menyebabkan ketidakefektifan dalam menurunkan tingkat kemiskinan.¹³

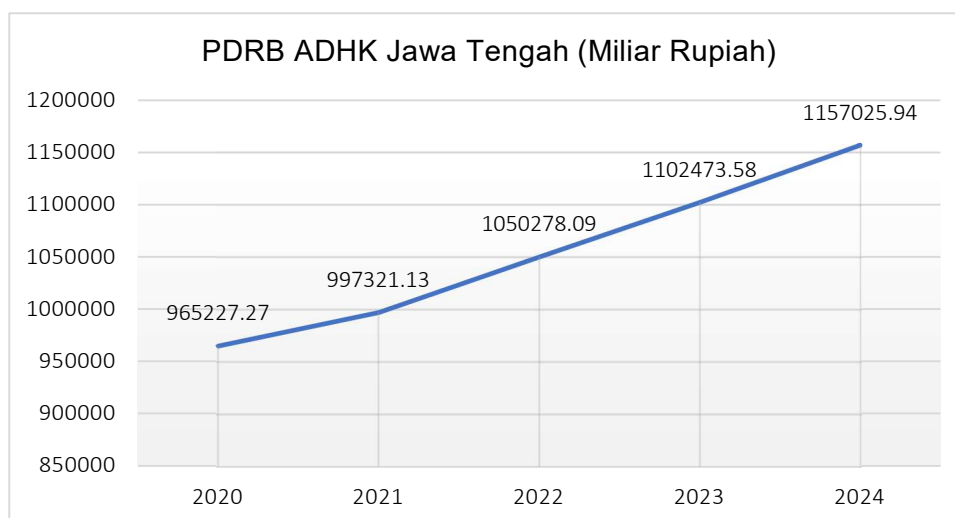
¹⁰ Yulia Adella Sari, "Pengaruh Upah Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah," *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 10, no. 2 (2021): 129, <https://doi.org/10.35906/je001.v10i2.785>.

¹¹ Ibrahim Hasballah, "Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Provinsi Aceh Di Kabupaten/Kota," *Jurnal Al-Fikrah* 10, no. 1 (2021): 46, https://www.researchgate.net/publication/362260656_Pengaruh_Tingkat_Pengangguran_Terbuka_Terhadap_Kemiskinan_Provinsi_Aceh_Di_KabupatenKota.

¹² BPS, "Pertumbuhan Ekonomi," BPS, n.d.

¹³ Hanna Khairunnida and Yuni Prohadi Utomo, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi PDRB Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2010-2023," *Menara Ekonomi* X, no. 1 (2024): 32.

Grafik 1.5 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Jawa Tengah



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024.

Lusiana dalam penelitiannya mengemukakan bahwa apabila Produk Domestik Regional Bruto meningkat maka keinginan seseorang akan berinvestasi juga meningkat, dengan itu akan banyak lapangan pekerjaan yang tersedia, sehingga tingkat pengangguran dapat ditekan yang berdampak pada berkurangnya tingkat kemiskinan.¹⁴ Namun hasil penelitian Ilmi menunjukkan bahwa kenaikan Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif terhadap kemiskinan, hal itu disebabkan karena tidak meratanya distribusi pendapatan masyarakat di suatu wilayah dan ketidaksetaraan dalam kepemilikan sumber daya.¹⁵ Pertumbuhan ekonomi yang tidak dibarengi dengan distribusi yang merata maka cenderung akan menyebabkan peningkatan kemiskinan.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan yaitu Upah Minimum Kabupaten/Kota. Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999 pada Pasal 1 ayat 1, upah minimum didefinisikan sebagai “upah bulanan terendah yang meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap.”¹⁶ Tujuan penetapan upah minimum adalah sebagai jaring pengaman yang berfungsi untuk mencegah penurunan upah hingga berada di bawah kemampuan daya beli pekerja. Oleh sebab itu, upah minimum perlu mendukung daya beli pekerja agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka pada tingkat yang layak.

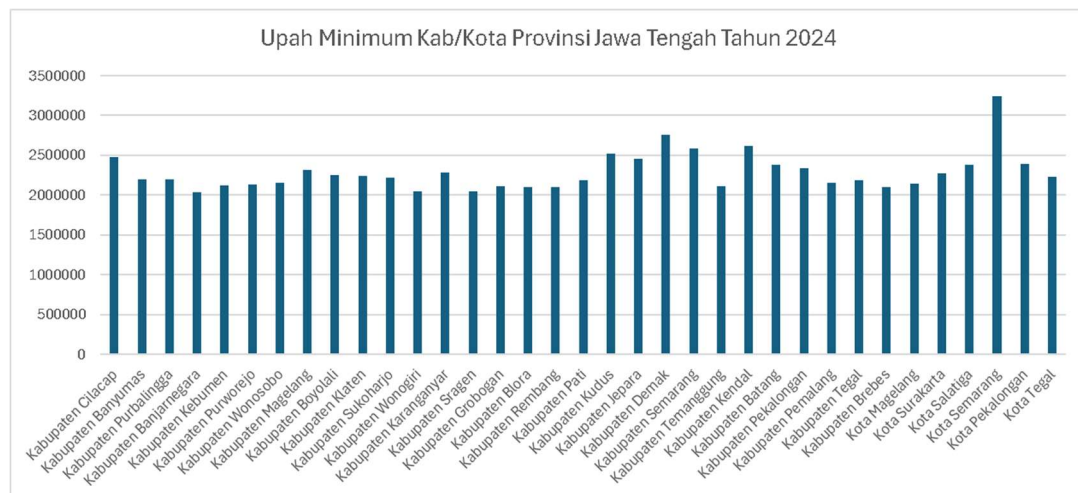
¹⁴ Fitri Ani Dwi Lusiana, Fitri Salsabila, and Muhammad Kurniawan, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi , Inflasi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2014-2023,” *Wawasan : Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan* 2, no. 3 (2024): 221.

¹⁵ Maftuh Bahrul Ilmi, “Pengaruh PDRB, IPM Dan TPT Terhadap Kemiskinan Di Lima Provinsi Dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi Di Indonesia Periode 2010-2019,” *Diss. IAIN Ponorogo*, 2021, 78.

¹⁶ Menteri Tenaga Kerja RI, “Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. 01 Tahun 1999 Tentang Upah Minimum,” no. 01 (1999).

Kenaikan upah minimum pekerja cenderung meningkatkan daya beli mereka, yang pada gilirannya dapat memotivasi mereka untuk bekerja lebih giat dan meningkatkan efisiensi kerja. Selain itu, peningkatan upah minimum juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat secara keseluruhan, sehingga memungkinkan kenaikan tunjangan dan memperkuat peran pekerja dalam mengurangi kemiskinan.¹⁷ Berikut data Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jawa Tengah Tahun 2024:

Grafik 1.6 Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Tengah Tahun 2024



Sumber: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2023.

Aleffin pada penelitiannya menjelaskan bahwa kenaikan upah minimum, akan mengurangi tingkat kemiskinan. Kenaikan upah minimum menandakan pendapatan pekerja menjadi lebih tinggi, sehingga daya beli mereka juga naik, dan pada gilirannya akan mengurangi tingkat kemiskinan.¹⁸ Walaupun begitu, kenaikan upah minimum tidak selalu menjamin penurunan tingkat kemiskinan. Dibuktikan oleh hasil penelitian Putri yang menyatakan bahwa kenaikan upah minimum berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Itu berarti kenaikan upah minimum belum tentu efektif dalam menurunkan kemiskinan. Hal itu disebabkan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Jika dihubungkan dengan dampak sosial dari inflasi, peningkatan upah minimum menjadi kurang berarti ketika inflasi terus naik. Dengan demikian, saat biaya hidup naik akibat

¹⁷ Erliza Millenia Putri and Dewi Zaini Putri, “Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Indonesia,” *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan* 10, no. 2 (2021): 108, <https://doi.org/10.24036/ecosains.11564057.00>.

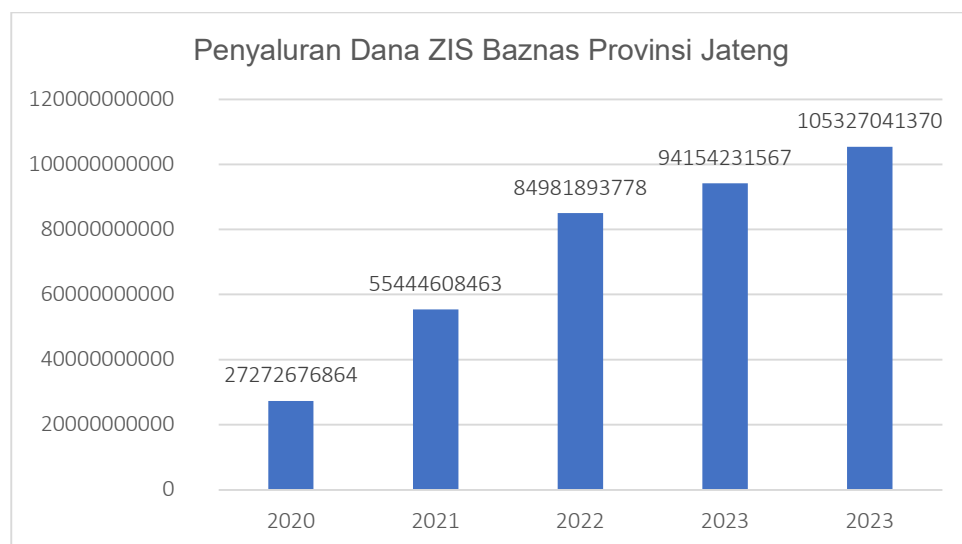
¹⁸ Girycki Sana Aleffin and Niniek Imaningsih, “Pengaruh Upah Minimum, TPT, Dependency Ratio Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur,” *Jambura Economic Education Journal* 6, no. 2 (2024): 430, <https://doi.org/10.37479/jeej.v6i2.24860>.

inflasi, kenaikan upah minimum sering kali tidak mencukupi, sehingga jumlah penduduk miskin cenderung bertambah.¹⁹

Faktor selanjutnya yaitu Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). Aktivitas masyarakat yang dijalankan berdasarkan syariat Islam berhubungan erat dengan penerimaan dan penyaluran dana zakat yang berperan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Sumber perolehan zakat memiliki potensi untuk menurunkan kemiskinan melalui pendistribusian zakat yang tepat sasaran kepada masyarakat kurang mampu. Dalam proses distribusi zakat ini, masyarakat yang memiliki kekayaan diwajibkan untuk menunaikan zakat. Selain itu, infaq dan sedekah juga termasuk dalam penyaluran harta yang merupakan bentuk ibadah, baik secara vertikal sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT, maupun secara horizontal sebagai bentuk solidaritas ataupun kepedulian antar sesama manusia demi mewujudkan keadilan sosial.²⁰

Salah satu lembaga pengelola ZIS adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001. BAZNAS bertugas untuk menghimpun serta menyalurkan zakat, Infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Berikut data penyaluran ZIS oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dalam lima tahun terakhir pada Grafik 1.7:

Grafik 1.7 Penyaluran Dana ZIS BAZNAS Provinsi Jawa Tengah



Sumber: BAZNAS RI, 2024.

¹⁹ Putri and Putri, “Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Indonesia,” 111.

²⁰ Nahella Safitri, “Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Sedekah (Zis), Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt), Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Tingkat Kemiskinan,” *UIN Walisongo Semarang*, 2023.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 secara resmi mengatur pengelolaan zakat. Tujuan dari pengelolaan zakat antara lain: (1) Meningkatkan pelayanan agar pengelolaan zakat lebih efektif dan efisien; (2) Memaksimalkan pemanfaatan zakat guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini mencerminkan bahwa zakat memiliki potensi besar, sehingga diperlukan kebijakan kelembagaan yang tepat agar layanan zakat dapat berjalan secara efektif dan mendukung program-program peningkatan kesejahteraan umat serta pemberian jaminan perlindungan sosial. Dalam penelitian Munandar menunjukkan variabel penyaluran dana ZIS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.²¹ Sedangkan dalam penelitian Muiz, variabel penyaluran dana ZIS justru berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap kemiskinan. Hal itu menunjukkan bahwa penyaluran ZIS belum signifikan untuk menurunkan kemiskinan yang disebabkan oleh penghimpunan serta pendistribusian dana ZIS yang belum tepat dan efisien.²²

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis bermaksud untuk meneliti lebih mendalam mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Jawa Tengah yang di antaranya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka, Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Penyaluran Dana ZIS. Fakta bahwa kemiskinan masih menjadi masalah serius di Indonesia, terutama di Jawa Tengah menjadi alasan utama dilakukannya penelitian ini. Maka dari itu penelitian yang akan dilakukan berjudul **Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Penyaluran Dana ZIS Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2020-2024.**

1.2 Rumusan Masalah

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas dalam penelitian maka didapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2020-2024?
2. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2020-2024?

²¹ Munandar Eris, Amirullah Mulia, and Nurochani Nila, "Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 01, no. 1 (2020): 35.

²² Aris Nurul Muiz et al., "Analisis Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) Terhadap Angka Kemiskinan Di Indonesia Periode 2013-2022," *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023): 215, <https://doi.org/10.59342/istimrar.v2i2.455>.

3. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2020-2024?
4. Bagaimana pengaruh Penyaluran Dana ZIS terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2020-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2020-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2020-2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2020-2024.
4. Untuk mengetahui pengaruh Penyaluran Dana ZIS terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2020-2024.

Manfaat Penelitian:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah literatur dan wawasan ilmiah terkait hubungan antara Tingkat Pengangguran Terbuka, Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Penyaluran Dana ZIS dengan tingkat Kemiskinan, khususnya di Jawa Tengah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi tenaga kependidikan sebagai media belajar tentang pengaruh variabel-variabel seperti Tingkat Pengangguran Terbuka, Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Penyaluran Dana ZIS terhadap Kemiskinan.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk masyarakat, baik sebagai sumber informasi maupun sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil langkah strategis untuk mengatasi kemiskinan.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan sumber rujukan bagi peneliti berikutnya dalam memperdalam serta memperluas cakupan penelitiannya.

d. Bagi penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi penulis sendiri.

1.4 Sistematika Penulisan

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini mencakup beberapa subbagian yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat beberapa tinjauan dari beberapa peneliti terdahulu dan teori-teori yang relevan sesuai dengan judul penelitian.

3. BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini secara rinci menjelaskan metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian termasuk jenis data dan teknik analisis data yang digunakan.

4. BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil analisis dan pembahasan mengenai rumusan masalah yang telah diangkat dalam penelitian

5. BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir berisi kesimpulan yang merangkum secara singkat temuan utama dari penelitian serta memberikan saran-saran yang dianggap relevan dan mendukung kelanjutan penelitian atau implementasi hasilnya.

BAB II

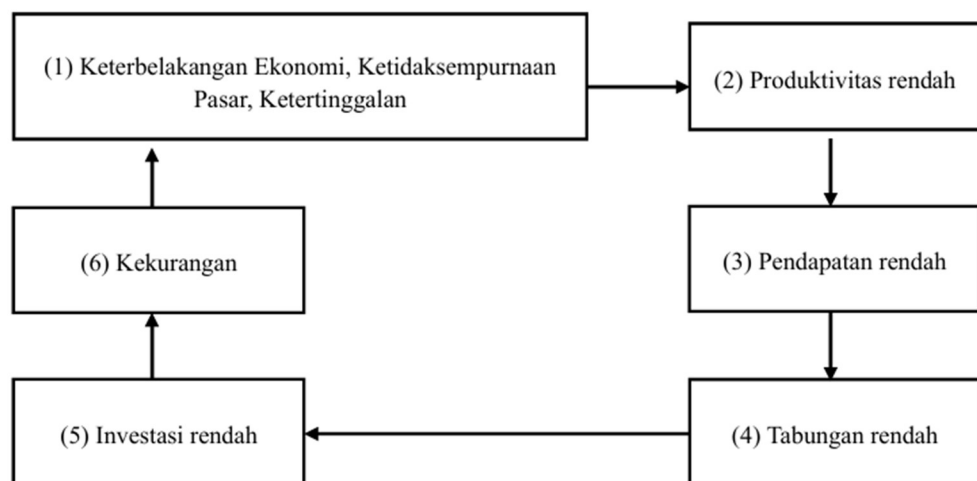
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Lingkaran Setan Kemiskinan (*Vicious Circle of Poverty*)

Teori yang pertama kali diperkenalkan oleh Nurkse pada tahun 1953 ini menyatakan bahwa kelompok miskin tetap miskin karena mereka terjebak dalam siklus yang saling berkaitan antara kekurangan modal, rendahnya produktivitas, dan pendapatan yang rendah.. Teori ini menggambarkan kondisi keluarga miskin di mana kepala rumah tangga tidak memiliki kemampuan memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya, seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan lainnya. Kemiskinan tersebut cenderung berlanjut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya jika orang tua dalam generasi sebelumnya masih belum mampu memenuhi semua kebutuhan dasar tersebut.

Gambar 2.1 Lingkaran Setan Kemiskinan Nurkse



Menurut Nurkse, terjadinya kemiskinan disebabkan oleh keterbelakangan ekonomi, ketidaksempurnaan pasar, serta keterbatasan modal, yang menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas kemudian menyebabkan pendapatan yang diterima individu menjadi rendah. Pendapatan rendah selanjutnya mengurangi minat untuk menabung dan berinvestasi. Rendahnya minat investasi pada gilirannya akan memperkuat kondisi keterbelakangan, sehingga membentuk siklus kemiskinan yang berkelanjutan.²³

²³ Yulianto Kadji, "Kemiskinan Dan Konsep Teoritisnya," *Guru Besar Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UNG Abstrak*, 2012, <https://doi.org/10.1177/0969733007082110>.

Masih banyak negara berkembang yang menghadapi tantangan dalam menciptakan pasar domestik yang kompetitif dan efisien. Ketidakmampuan dalam mengelola pembangunan ekonomi menyebabkan terjadinya kekurangan modal (kapital), yang kemudian berdampak pada rendahnya produktivitas. Akibatnya, pendapatan riil masyarakat menurun, tingkat tabungan menjadi rendah, dan investasi pun melemah. Kondisi ini kembali memperparah kekurangan modal, sehingga menciptakan siklus kemiskinan yang terus berulang. Dalam konteks ini, upaya penanggulangan kemiskinan seharusnya difokuskan pada pemutusan siklus tersebut, misalnya melalui intervensi kebijakan yang mendorong peningkatan modal, produktivitas, serta menciptakan iklim investasi yang sehat agar pertumbuhan ekonomi bisa berlangsung secara berkelanjutan.

2.1.2 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan fenomena umum yang terjadi pada banyak negara di dunia dan menjadi masalah sosial yang bersifat global.²⁴ Badan Pusat Statistik mendeskripsikan kemiskinan sebagai kondisi seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya minimal untuk hidup dengan layak, lebih spesifik didefinisikan sebagai suatu kondisi berada di bawah nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk pangan maupun non pangan yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*).

Garis kemiskinan (*poverty line*) adalah batas minimal pendapatan yang dianggap harus dipenuhi untuk mencapai standar hidup yang cukup di suatu negara. Garis kemiskinan berfungsi sebagai alat ukur ekonomi untuk mengidentifikasi jumlah penduduk miskin serta sebagai dasar dalam merancang kebijakan sosial dan ekonomi, seperti program kesejahteraan atau asuransi pengangguran guna mengurangi tingkat kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Seseorang diklasifikasikan sebagai penduduk miskin apabila pengeluaran rata-rata per kapita per bulannya berada di bawah nilai Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan total nilai pengeluaran untuk 52 jenis komoditas makanan pokok yang riil dikonsumsi oleh penduduk acuan, yang kemudian disesuaikan agar setara dengan kebutuhan energi sebesar 2.100 kilokalori per kapita per hari. Penyetaraan nilai pengeluaran minimum untuk

²⁴ Novita Ika Sari, "Determinan Tingkat Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 – 2014," *Economics Development Analysis Journal* 7, no. 2 (2018): 129, <https://doi.org/10.15294/edaj.v8i2.23411>.

kebutuhan makanan dilakukan dengan menghitung rata-rata harga kalori dari 52 jenis komoditas makanan tersebut. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) dihitung berdasarkan total nilai kebutuhan minimum dari komoditas non-makanan tertentu, seperti rumah, pakaian, pendidikan, dan layanan kesehatan. Di wilayah perkotaan, kebutuhan ini diwakili oleh 51 jenis komoditas, sedangkan di pedesaan oleh 47 jenis komoditas. Nilai minimum tiap komoditas atau sub-kelompok non-makanan diperoleh melalui rasio pengeluaran terhadap total pengeluaran komoditas atau sub-kelompok yang tercatat.²⁵

Karakteristik masyarakat miskin umumnya ditandai oleh keterbatasan dalam kemampuan berusaha serta aksesnya terbatas terhadap kegiatan ekonomi. Kondisi ini menyebabkan mereka semakin tertinggal dibanding masyarakat lain yang memiliki potensi lebih besar.²⁶ Berdasarkan karakteristiknya, kemiskinan dibedakan menjadi tiga yaitu:

1. Kemiskinan natural merupakan bentuk kemiskinan yang disebabkan oleh keterbatasan dalam ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kelompok masyarakat yang mengalami kondisi ini umumnya memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan, baik sumber daya alam, keterampilan individu, maupun sumber daya penunjang pembangunan. Meskipun mereka berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, pendapatan mereka tetap rendah.
2. Kemiskinan kultural merupakan bentuk kemiskinan yang berkaitan dengan gaya hidup individu atau kelompok masyarakat. Ini berkaitan dengan pola hidup, kebiasaan, serta nilai-nilai budaya yang dianut oleh individu atau kelompok. Dalam konteks ini, mereka cenderung merasa cukup dengan kondisi yang ada dan tidak memiliki dorongan untuk melakukan perubahan ataupun peningkatan taraf hidup. Kelompok masyarakat ini umumnya kurang terlibat dalam proses pembangunan. Akibatnya, tingkat pendapatan mereka tetap rendah jika dibandingkan dengan standar umum. Dalam beberapa kasus, kemiskinan kultural dipersepsikan sebagai akibat dari sifat malas, kurang disiplin, pemborosan, atau faktor-faktor budaya lainnya.²⁷

²⁵ “Garis Kemiskinan” (DPR RI, n.d.), <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/kamus/file/kamus-20.pdf>.

²⁶ Kadji, “Kemiskinan Dan Konsep Teoritisnya.”

²⁷ Iwan Nugroho and Rochimin Dahuri, “Pembangunan Wilayah, Perspektif Ekonom, Sosial, Dan Wilayah,” *Pustaka LP3S*, 2004.

3. Kemiskinan struktural merupakan bentuk kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang dipengaruhi oleh manusia, seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, ketimpangan distribusi aset produksi, praktik korupsi dan kolusi, serta ketidakseimbangan sistem ekonomi global yang cenderung hanya menguntungkan kelompok tertentu dalam masyarakat. Kemiskinan ini pada dasarnya muncul akibat pelaksanaan program dan kebijakan yang tidak tepat sasaran. Ketidaktepatan tersebut mengakibatkan ketimpangan dalam kepemilikan sumber daya, yang kemudian membatasi partisipasi masyarakat secara merata dan membentuk struktur sosial yang tidak seimbang.

Terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan kemiskinan. Pertama, ketimpangan dalam kepemilikan sumber daya menjadi salah satu penyebab utama distribusi pendapatan yang tidak merata. Masyarakat miskin umumnya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan dengan kualitas rendah. Kedua, kemiskinan terjadi karena perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Rendahnya kualitas ini berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas, sehingga berujung pada pendapatan yang minim. Faktor ini dapat dipengaruhi oleh pendidikan yang kurang memadai, ketidakberuntungan, diskriminasi, atau faktor keturunan. Ketiga, keterbatasan akses terhadap modal. Kurangnya akses terhadap modal menghambat individu untuk berinvestasi, sehingga sulit bagi mereka untuk meningkatkan kesejahteraan.²⁸

Menurut Soemardjan, terdapat berbagai cara untuk mengukur kemiskinan yang didasarkan pada standar yang berbeda-beda. Namun, dalam pengukurannya tetap mempertimbangkan dua kategori utama tingkat kemiskinan, yaitu: Pertama, kemiskinan absolut, yaitu kondisi di mana pendapatan seseorang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, layanan kesehatan, dan pendidikan. Kedua, kemiskinan relatif, yaitu bentuk kemiskinan yang diukur berdasarkan ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu wilayah. Kategori ini disebut relatif karena berkaitan dengan perbedaan kesejahteraan antar kelompok sosial dalam masyarakat.²⁹

Karakteristik masyarakat miskin menurut Kartasasmita umumnya memiliki keterbatasan dalam kemampuan berusaha serta akses terhadap aktivitas ekonomi.

²⁸ Mudjarat Kuncoro, *Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010).

²⁹ Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat, Jaring Pengaman Sosial* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999).

Kondisi ini membuat mereka semakin tertinggal dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain yang memiliki potensi dan peluang ekonomi yang lebih besar.³⁰ Moeljarto mengemukakan masalah kemiskinan bukan semata-mata berkaitan dengan masalah kesejahteraan (*welfare*) tetapi terdapat enam alasan antara lain: (a) Kemiskinan merupakan bentuk kerentanan, di mana individu atau kelompok berada dalam kondisi rentan terhadap guncangan ekonomi, sosial, maupun lingkungan yang dapat memperburuk keadaan mereka; (b) Kemiskinan mencerminkan terbatasnya akses terhadap peluang kerja, disebabkan oleh sistem produksi dalam masyarakat yang tidak inklusif dan tidak menyediakan peluang bagi mereka untuk terlibat secara aktif; (c) Kemiskinan berkaitan dengan persoalan psikologis dan sosial, seperti hilangnya rasa percaya diri, ketidakberdayaan, serta keterasingan dalam relasi dengan elit desa atau aparat birokrasi, yang sering kali membuat keputusan tanpa melibatkan mereka secara langsung; (d) Kelompok miskin cenderung mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan pangan, yang sering kali tidak mencukupi baik dari segi kualitas dan kuantitas; (e) Tingginya rasio ketergantungan, yang umumnya disebabkan oleh jumlah keluarga yang besar; (f) Kemiskinan bersifat turun temurun, yaitu diwariskan secara terus menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya.³¹

Dalam penelitian ini, kemiskinan diukur menggunakan Persentase Penduduk Miskin. Persentase penduduk miskin merupakan perbandingan antara jumlah individu yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional dengan total jumlah penduduk pada periode tertentu, yang dinyatakan dalam satuan persen. Penggunaan persentase penduduk miskin dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang proporsional mengenai tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Persentase penduduk miskin lebih efektif dibandingkan angka absolut pada penelitian yang membandingkan tingkat kemiskinan antar wilayah atau melihat tren dari waktu ke waktu. Persentase memberikan gambaran yang proporsional terhadap total populasi, sehingga dapat mempresentasikan tingkat kesejahteraan secara lebih akurat tanpa bias jumlah penduduk.

³⁰ Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan* (Jakarta: Pustaka Cidessindo, 1996).

³¹ Moeljarto, *Politik Pembangunan Sebuah Analisis Konsep, Arah Dan Strategi* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1995).

2.1.2.1 Kemiskinan Dalam Perspektif Islam

Kemiskinan berasal dari kata “miskin”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “miskin” dijelaskan sebagai seorang yang tidak memiliki harta benda, hidup serba kekurangan dan memiliki penghasilan yang rendah. Sedangkan kata “fakir” dijelaskan sebagai orang yang hidup sangat berkekurangan. Kemiskinan adalah penderitaan, cobaan, dan ujian, serta merupakan problematika kehidupan yang sangat membutuhkan solusi. Solusi tersebut tidak hanya bagi orang miskin itu sendiri, tetapi ditujukan pula kepada para hartawan yang diberi kecukupan hidup supaya menafkahkan, memberi dan bersedekah kepada orang-orang fakir dan miskin sebagai golongan yang tidak memiliki keberuntungan dalam hal kecukupan ekonomi.³²

Menurut Syekh An-Nabhani kemiskinan diklasifikasikan dalam dua kategori utama. Pertama, faqir, yaitu individu yang tidak memiliki harta maupun penghasilan sama sekali. Kedua, miskin, yaitu individu yang memiliki harta, namun tidak mencukupi kebutuhan dasarnya secara layak. Klasifikasi ini relevan untuk menjelaskan dua golongan mustahiq zakat, yakni *fuqara* (orang-orang faqir) dan *masakiin* (orang-orang miskin).³³

BAZNAS RI menetapkan ukuran Had Kifayah yang digunakan untuk menggambarkan kadar kecukupan hidup seseorang atau sebuah rumah tangga, apakah termasuk golongan mustahik fakir miskin atau tidak, yang ditentukan berdasarkan kondisi dan wilayah tertentu. Had Kifayah adalah alat untuk mengukur tingkat kemiskinan, yakni dengan mengukur kecukupan pengeluaran kelompok asnaf melalui perbandingan antara pendapatan kotor dan kebutuhan pengeluaran minimum individu atau keluarga. Lebih dari sekadar menentukan batas minimum, Had Kifayah juga merepresentasikan tingkat kemampuan ekonomi yang dianggap layak untuk menjamin keberlangsungan hidup seseorang maupun keluarganya.

³² Srianti Permata et al., “Strategi Penanganan Kemiskinan Dalam Perspektif Al-Quran,” *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2023): 165, <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v5i2.2066>.

³³ Angga Maulana, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto Suharto, “Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 15, no. 1 (2022): 221, <https://doi.org/10.46306/jbbe.v15i1.142>.

Konsep Had Kifayah berbeda dengan Garis Kemiskinan yang ditetapkan BPS, meskipun Had Kifayah sering dianalogikan seperti Garis Kemiskinan dalam sudut pandang Islam. Perbedaan tersebut yaitu bahwa Garis Kemiskinan hanya berfokus pada kebutuhan hidup minimal, yang didasarkan pada makanan dan non makanan, sedangkan Had Kifayah berfokus pada kebutuhan minimal berdasarkan maqasid syariah. Dari lima unsur maqasid syariah, yaitu *hifdzu al-nafs*, *hifdzu ad-diin*, *hifdzu al-maal*, *hifdzu al-aql*, dan *hifdzu al-nasl* (menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga harta, menjaga akal, dan menjaga keturunan), maka terbitlah tujuh dimensi pada Had Kifayah, yaitu makanan, ibadah, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

Had Kifayah dijadikan sebagai asesmen awal pada saat calon mustahik mengajukan bantuan, serta digunakan sebagai evaluasi pasca program. Penentuan Had Kifayah yang berdasarkan maqasid syariah adalah hal yang penting untuk memastikan dan menjamin pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah. Adanya Had Kifayah telah membawa kemajuan dan penguatan pada kegiatan penyaluran zakat. Dengan penyaluran dan pendistribusian dana Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) dengan baik dapat mendorong turunnya tingkat kemiskinan.³⁴

Islam mengajarkan bahwa untuk menghindari kondisi kemiskinan, maka terdapat dua cara yang perlu dilakukan yaitu mengembangkan sumber daya manusia untuk menjamin keberlangsungan hidup di masa depan, termasuk pengelolaan sumber daya alam secara bijak, dan diwajibkan bagi umat Islam untuk menaati aturan Allah SWT dengan memperhatikan serta peduli terhadap kesejahteraan orang-orang miskin seperti yang tertera dalam Al-Qur'an Surah Az-Zariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya:

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”. (Q.S. Az-Zariyat: 19)

³⁴ BAZNAS, “Penyesuaian Nilai Had Kifayah 2023” (Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS DSKL Nasional BAZNAS RI, 2023).

Ayat ini menjelaskan bahwa Islam sangat peduli terhadap penderitaan kelompok miskin. Dalam ajarannya, Islam telah memberikan solusi bagi berbagai permasalahan kemanusiaan yang dihadapi oleh manusia. Di samping melaksanakan salat wajib dan sunah, orang muslim juga selalu mengeluarkan *infaq fi sabilillah* dengan mengeluarkan zakat wajib atau sumbangan derma atau sokongan sukarela karena mereka memandang bahwa pada harta-harta mereka itu ada hak fakir miskin yang membutuhkan. Islam menaruh perhatian besar terhadap isu kemiskinan, di mana fakir miskin menjadi prioritas utama dalam distribusi zakat.³⁵

2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran merujuk pada kondisi di mana seseorang tidak memiliki pekerjaan, sedang secara aktif mencari pekerjaan, bekerja kurang dari dua hari dalam satu minggu, atau tengah berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Masalah pengangguran umumnya muncul ketika jumlah pencari kerja melebihi jumlah ketersediaan lapangan kerja. Kondisi ini berdampak negatif terhadap perekonomian, karena berkurangnya produktivitas dan pendapatan masyarakat, pada akhirnya dapat memicu peningkatan angka kemiskinan serta menimbulkan permasalahan sosial lainnya.³⁶

Besar kecilnya angka pengangguran sangat tergantung dari definisi dan pengklasifikasian pengangguran. Dari perspektif makroekonomi, tingginya angka pengangguran dianggap sebagai permasalahan. Pengangguran terbuka terjadi ketika pertumbuhan lapangan kerja tidak sebanding dengan peningkatan jumlah tenaga kerja. Tingginya pengangguran dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang menunjukkan persentase angkatan kerja yang belum atau tidak memiliki pekerjaan.³⁷

Jenis-jenis pengangguran diklasifikasikan dalam 4 kelompok, di antaranya:

³⁵ “Az-Zariyat Ayat 19,” *NU Online*, n.d., <https://quran.nu.or.id/adz-dzariyat/19>.

³⁶ Safitri, “Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Sedekah (Zis), Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt), Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Tingkat Kemiskinan.”

³⁷ Tarmiji Hamid Siregar, Fauzi Arif Lubis, and Nurul Inayah, “Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO), Upah Minimum Regional (UMR) Dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Provinsi Sumatera Utara,” *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)* 4, no. 1 (2023): 1295.

1. Pengangguran Terbuka, adalah kondisi di mana seseorang benar-benar tidak memiliki pekerjaan, meskipun telah berupaya secara maksimal untuk mendapatkannya. Jenis pengangguran ini terjadi karena ketersediaan lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan peningkatan jumlah angkatan kerja.
2. Pengangguran Tersembunyi, merujuk pada tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal, biasanya karena jumlah tenaga kerja yang melebihi kapasitas produksi, seperti pada usaha berskala kecil. Hal ini menyebabkan efisiensi kerja menjadi rendah.
3. Setengah Menganggur, adalah kondisi di mana seseorang bekerja namun tidak secara penuh, sering kali karena terbatasnya kesempatan kerja. Umumnya, kategori ini mencakup individu yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu, misalnya hanya bekerja satu hingga dua hari dalam seminggu atau beberapa jam per hari.
4. Pengangguran Musiman, adalah kondisi ketika tenaga kerja hanya bekerja pada musim tertentu, terutama di sektor-sektor seperti pertanian dan perikanan. Pada umumnya petani tidak begitu aktif di masa antara penanaman dan panen. Apabila dalam masa tersebut mereka tidak melakukan pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur.³⁸

Dalam penelitian ini menggunakan Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai alat pengukuran pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka dipilih sebagai variabel penelitian karena secara langsung mempresentasikan jumlah angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan namun belum mendapatkan pekerjaan, serta dapat mencerminkan ketersediaan dan efektivitas pasar kerja.

2.1.3.1 Pengangguran Dalam Perspektif Islam

Dalam Islam sangat menganjurkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 105 sebagai berikut:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

³⁸ Ilmi, "Pengaruh PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, IPM Dan TPT Terhadap Kemiskinan Di Lima Provinsi Dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi Di Indonesia Periode 2010-2019."

Artinya:

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan”. (Q. S. At-Taubah: 105)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kaum Muslim untuk bertobat dan membersihkan diri dari dosa-dosa dengan cara bekerja, bersedekah, mengeluarkan zakat, dan mengeluarkan amal saleh sebanyak mungkin. Sehingga ketika mereka dikembalikan ke alam akhirat, akan diberikan ganjaran atas amal-amal yang telah mereka lakukan selama di dunia.³⁹

Dalam pandangan Islam, seseorang dapat dianggap sebagai penganggur apabila ia tidak memanfaatkan potensi dan kemampuan yang dimilikinya secara optimal. Ia dapat dianggap sebagai pengangguran yang bertanggung jawab atas ketidakmampuannya memanfaatkan bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Apabila seseorang tidak terlibat dalam pekerjaan formal namun tetap berupaya secara sungguh-sungguh untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan produktif, maka secara etis dan spiritual, ia telah menjalankan kewajiban bekerja sesuai dengan ajaran agama. Dalam hal ini, Islam tidak membebankan tanggung jawab pengangguran kepadanya.⁴⁰

2.1.4 Produk Domestik Regional Bruto

Pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan aktivitas ekonomi yang ditandai dengan bertambahnya output barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu. Suatu perekonomian dapat dikatakan berkembang apabila pendapatan per kapita dalam jangka panjang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, serta masyarakatnya dapat menikmati hidup yang sejahtera. Pembangunan pada hakikatnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah guna mewujudkan tujuan tersebut. Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tersebut, diperlukan suatu indikator yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi. Menurut Badan Pusat statistik, salah satu

³⁹ “At-Taubah Ayat 105,” *NU Online*, n.d., <https://quran.nu.or.id/at-taubah/105>.

⁴⁰ Aldi, “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Kemiskinan Di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2017-2022 Dengan Pengangguran Terbuka Sebagai Variabel Moderating.”

indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).⁴¹

Produk Domestik Regional Bruto didefinisikan sebagai total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu daerah, atau dapat juga diartikan sebagai akumulasi nilai seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi dalam wilayah tersebut. Secara umum semakin tinggi nilai Produk Domestik Regional Bruto itu berarti semakin tinggi nilai *output* yang tercipta dalam wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkat menunjukkan adanya peningkatan dalam produksi barang dan jasa. Hal ini berkontribusi pada penciptaan lebih banyak lapangan kerja, yang selanjutnya dapat mengurangi tingkat pengangguran serta menekan angka kemiskinan.⁴²

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diukur dalam dua macam penyajian, yaitu:

- a. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku merupakan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga pasar saat periode perhitungan, yang bertujuan untuk menggambarkan struktur perekonomian.

- b. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan merupakan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga pada tahun dasar tertentu, dengan tujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Dalam penelitian ini perkembangan Produk Domestik Regional Bruto diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan karena memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai pertumbuhan ekonomi riil, tanpa terpengaruh oleh perubahan harga (inflasi atau deflasi).

2.1.4.1 Produk Domestik Regional Bruto Dalam Perspektif Islam

Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, digunakan indikator yang dikenal sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sejumlah pakar menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya

⁴¹ Nanda Aufa Azmi and Dwi Artaningtyas, "Pengaruh Indikator Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2019" 14, no. 1 (2019): 52.

⁴² Reni Ria Armayani Hasibuan et al., "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Kemiskinan Kota Medan," *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4, no. 3 (2022): 684, <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i3.887>.

terbatas peningkatan aktivitas produksi semata. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi mencakup keseluruhan aktivitas produksi yang juga berkaitan erat dengan pemerataan distribusi. Pertumbuhan bukan hanya fenomena ekonomi, melainkan upaya manusia dalam mencapai kemajuan baik dari segi material maupun spiritual manusia.

Dalam perspektif Islam, terdapat beberapa pandangan mendasar terkait pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan pandangan kapitalis. Islam tidak memandang persoalan ekonomi semata-mata sebagai persoalan kekayaan atau kelangkaan sumber daya sebagaimana diyakini dalam sistem kapitalis. Islam menegaskan bahwa seluruh sumber daya telah disediakan oleh Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan manusia dan mengatasi persoalan kehidupan, sehingga fokus utamanya adalah pada distribusi yang adil dan pemanfaatan sumber daya secara bertanggung jawab.⁴³

Pertumbuhan ekonomi dan tingginya pendapatan mencerminkan ketersediaan berbagai kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, yang mendukung kenyamanan hidup. Islam tidak hanya membolehkan, tetapi juga mendorong terjadinya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, selama aktivitas tersebut tidak membuat seseorang larut dalam hawa nafsu hingga lupa kepada Allah SWT. Dalam Islam, pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan prinsip keadilan, khususnya dalam hal distribusi pendapatan dan kekayaan, sehingga tercipta keseimbangan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.⁴⁴ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Hasyr ayat 7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا اتَّكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

⁴³ "Pertumbuhan Ekonomi (Produk Domestik Regional Bruto) Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *123dok*, n.d., [https://123dok.com/article/pertumbuhan-ekonomi-Produk Domestik Regional Bruto-dalam-perspektif-ekonomi-islam.zk835mez](https://123dok.com/article/pertumbuhan-ekonomi-Produk%20Domestik%20Regional%20Bruto-dalam-perspektif-ekonomi-islam.zk835mez).

⁴⁴ Ari Kristin Prasetyoningrum and U. Sulia Sukmawati, "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia," *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2018): 217–40, <https://doi.org/10.24843/eeb.2022.v11.i01.p04>.

Artinya:

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” (Q.S. Al-Hasyr: 7)

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT telah menurunkan segala sesuatu untuk mencukupi kebutuhan manusia sebagai upaya dalam menyelesaikan persoalan hidup mereka. Islam secara komprehensif mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal distribusi kekayaan. Kekayaan yang dianugerahkan Allah kepada manusia tidak seharusnya hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Oleh karena itu, pemerataan distribusi kekayaan menjadi prinsip yang wajib diwujudkan di dalam Islam. Apabila terjadi kesenjangan sosial, maka negara memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan keseimbangan dalam masyarakat, khususnya melalui kebijakan yang menjamin pendistribusian yang adil.⁴⁵

2.1.5 Upah Minimum Kabupaten/Kota

Upah merupakan kompensasi yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja sebagai balasan atas tenaga kerja yang telah disalurkan. Pembayaran ini dilakukan dalam bentuk uang dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian antara kedua belah pihak, sehingga menguntungkan bagi pemberi kerja maupun pekerja. Sementara upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang ditetapkan oleh gubernur untuk pekerja. Penetapan upah minimum berfungsi untuk memastikan bahwa pekerja memiliki standar hidup minimum, yang meliputi kesehatan, produktivitas, dan kesejahteraan mereka.⁴⁶

Upah minimum ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, produktivitas, pertumbuhan ekonomi, serta rekomendasi dari Dewan Pengupahan

⁴⁵ “Al-Hasyr Ayat 7,” *NU Online*, n.d., <https://quran.nu.or.id/al-hasyr/7>.

⁴⁶ Lulut Lavenia, Syafri Mandai, and Muhammad Yudhi Lutfi, “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum, Pengangguran, Jumlah Penduduk Dan Angka Melek Huruf Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 - 2021,” *Jurnal Ekonomi Trisakti* 3, no. 1 (2023): 321, <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.15412>.

Provinsi dan/atau Bupati/Walikota. Upah minimum berlaku di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Sektoral. Jenis-jenis upah minimum:

1. Upah Minimum Provinsi (UMP), yaitu upah minimum yang berlaku di seluruh Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi.
2. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), yaitu upah minimum yang berlaku di wilayah Kabupaten/Kota.
3. Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), yaitu upah minimum yang berlaku secara sektoral di satu Provinsi.
4. Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota, yaitu upah minimum yang berlaku secara sektoral di wilayah Kabupaten/Kota.

Upah minimum memiliki dampak signifikan terhadap tingkat pendapatan masyarakat di suatu daerah. Ketika upah minimum rendah, pendapatan yang diterima sering kali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Rendahnya upah dapat disebabkan oleh perbedaan kualitas sumber daya manusia.⁴⁷ Sebaliknya, peningkatan upah minimum pekerja dapat mendorong daya beli masyarakat, sehingga merangsang semangat dan meningkatkan efisiensi kerja, dan pada gilirannya akan mengurangi tingkat kemiskinan.⁴⁸

2.1.5.1 Upah Minimum Dalam Perspektif Islam

Pemberian atau penetapan upah terhadap pekerja dalam Islam yang berkaitan dengan sistem ekonomi Islam atas dasar ketuhanan. Upah dalam Islam secara umum masuk dalam *ijarah*. Kata *ijarah* berasal dari *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* menurut bahasa yaitu *al-iwadd* yang artinya dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah. Menurut Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul Fiqh Syafi'i yaitu "ijarah berarti upah-mengupah". Dan menurut Kamaludin A. Marzuki penerjemah Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq menjelaskan *ijarah* dengan sewa menyewa.⁴⁹

Dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah At -Thalaq ayat 6:

⁴⁷ Sari, "Pengaruh Upah Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah."

⁴⁸ Putri and Putri, "Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Indonesia."

⁴⁹ Jimi Irza, "Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Upah Di Bawah UMR" (niversitas Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
 أُولَئِكَ حَمَلَ فَاَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
 وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُ أُخْرَى ۚ ﴿٦﴾

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q. S. At-Thalaq: 6)

Ayat tersebut menjelaskan tujuan utama pemberian upah yaitu agar para pekerja atau pegawai dapat memenuhi segala kebutuhan pokok hidup mereka secara layak dan berkecukupan. Sehingga mereka terdorong untuk melakukan tindakan yang dibenarkan yakni untuk memenuhi nafkah diri dan keluarganya.⁵⁰

2.1.6 Penyaluran Dana ZIS

2.1.6.1 Zakat

Zakat berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti penyucian atau pembersihan. Istilah zakat digunakan karena mengandung makna harapan untuk mendapatkan keberkahan, menyucikan jiwa, dan menumbuhkan kebaikan dalam diri. Zakat juga merupakan sistem keuangan dalam Islam yang memiliki peran penting dalam menciptakan keseimbangan sosial di tengah masyarakat. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014, zakat didefinisikan sebagai sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha milik Muslim untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai ketentuan syariat Islam. Dengan demikian, zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu untuk menunaikannya sebagai bentuk kepatuhan terhadap ajaran agama dan sebagai upaya untuk menegakkan keadilan sosial.⁵¹

⁵⁰ “At-Thalaq Ayat 6,” *NU Online*, n.d., <https://quran.nu.or.id/at-thalaq/6>.

⁵¹ Ira Humaira Hany Dina Islamiyati, “Pengaruh ZIS Dan Faktor Makro Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi* 25, no. 1 (2020): 121, <https://doi.org/10.24912/je.v25i1.631>.

Harta yang dapat dikenakan zakat harus memenuhi beberapa syarat, antara lain harta tersebut berasal dari sumber yang halal dan diperoleh melalui cara yang sah menurut syariat, dimiliki sepenuhnya oleh pemiliknya tanpa adanya sengketa kepemilikan, memiliki potensi untuk berkembang atau bertambah nilainya, telah mencapai batas minimum (nishab) sesuai dengan jenis hartanya, serta telah melewati jangka waktu tertentu (haul) sesuai ketentuan dalam zakat. Secara umum zakat diklasifikasikan ke dalam dua jenis utama, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat Fitrah merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah, pada bulan Ramadhan sebagai bentuk penyucian diri. Sementara zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas berbagai jenis harta, yang diperoleh melalui cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Zakat mal meliputi: (1) Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya, yaitu zakat yang dikenakan terhadap kepemilikan logam mulia yang telah mencapai batas minimum (nisab) dan jangka waktu tertentu (haul); (2) Zakat atas uang dan surat berharga, yaitu zakat yang dikenakan atas uang, aset yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul; (3) Zakat perniagaan, merupakan zakat yang dikenakan atas aset dan keuntungan usaha perniagaan setelah mencapai nisab dan haul; (4) Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan, adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan pada saat panen; (5) Zakat peternakan dan perikanan, merupakan zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul; (6) Zakat pertambangan, merupakan zakat atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul; (7) Zakat perindustrian, merupakan zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang maupun jasa; (8) Zakat pendapatan atau zakat profesi, yaitu zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh melalui aktivitas profesional, dan dibayarkan saat menerima penghasilan; (9) Zakat rikaz, merupakan zakat yang dikenakan atas harta temuan, seperti barang-barang berarga yang ditemukan, dengan kadar zakat sebesar 20%.⁵²

⁵² Muiz et al., "Analisis Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) Terhadap Angka Kemiskinan Di Indonesia Periode 2013-2022,": 212.

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Islam. Sebagaimana yang telah di syariatkan, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat yang hukumnya wajib bagi setiap muslim. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 56:

وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya;

“Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Nabi Muhammad) agar kamu dirahmati”. (Q.S An-Nur: 56)

Dalam ayat ini, Allah menyandingkan janji kemenangan dengan tiga syarat utama: mendirikan salat, menunaikan zakat, dan menaati Allah serta Rasul-Nya. Kemenangan tidak hanya perlu diraih, tetapi juga dijaga. Salat menguatkan hubungan spiritual dengan Allah, zakat membersihkan hati dari sifat kikir, dan ketaatan menjadi landasan dalam setiap tindakan. Ketiga hal ini menjadi kunci kekuatan dan ketahanan umat dalam mempertahankan kejayaan yang telah diraih.⁵³

Adapun hukum zakat dalam UU Nomor 38 tahun 1999 pasal 1 dan pasal 2 tentang zakat, yang berbunyi “Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya dan setiap Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang mampu dan badan yang dimiliki oleh seorang muslim yang berkewajiban melaksanakan zakat”.

2.1.6.2 Infaq

Secara etimologis, infaq berasal dari bahasa Arab *anfaqa*, yang berarti mengeluarkan harta untuk suatu kepentingan. Dalam konteks syariat Islam, infaq diartikan sebagai tindakan mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk tujuan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Infaq merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT melalui pemberian harta atau barang yang dimiliki. Berbeda dengan zakat, infaq tidak memiliki batasan nishab dan haul, serta dapat diberikan kapan saja. Berdasarkan Undang-

⁵³ “An-Nur Ayat 56,” NU Online, n.d., <https://quran.nu.or.id/an-nur/56>.

Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, infaq juga dijelaskan sebagai harta yang disalurkan oleh individu atau badan usaha di luar kewajiban zakat untuk kepentingan kemaslahatan umum.⁵⁴

Terdapat empat rukun dan syarat dalam pelaksanaan infaq. Pertama, muwafiq, yaitu pihak yang memberikan infaq. Kedua, muwafiq lahu, yakni penerima infaq yang harus memenuhi syarat, seperti telah baligh. Ketiga, harta yang diinfaqkan, harus berupa barang yang memiliki nilai dan dapat dialihkan kepemilikannya. Keempat, ijab dan qabul, yaitu pernyataan kesepakatan yang jelas dan disertai kerelaan dari kedua belah pihak.⁵⁵

2.1.6.3 Sedekah

Sedekah berasal dari kata *shadaqah* dalam bahasa Arab yang bermakna “benar,” menunjukkan bahwa tindakan memberi adalah cerminan dari keimanan seseorang. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 Ayat 4, sedekah diartikan sebagai pemberian harta atau non-harta yang disalurkan oleh individu maupun badan usaha di luar zakat, untuk kepentingan kemaslahatan umat. Perbedaan utama antara sedekah dan infaq terletak pada jenis pemberiannya: sedekah mencakup aspek materi maupun non-materi, seperti senyum, tenaga, dan bantuan moral, sedangkan infaq terbatas pada pemberian materi. Oleh karena itu, sedekah memiliki cakupan yang lebih luas dalam bentuk kontribusinya.⁵⁶

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, terdapat dua jenis lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk pemerintah yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat dalam skala nasional. BAZNAS dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). BAZNAS terdiri dari BAZNAS Pusat yang disebut dengan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah

⁵⁴ Safitri, “Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Sedekah (Zis), Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt), Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Tingkat Kemiskinan.”

⁵⁵ Muiz et al., “Analisis Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) Terhadap Angka Kemiskinan Di Indonesia Periode 2013-2022.”

⁵⁶ Safitri, “Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Sedekah (Zis), Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt), Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Tingkat Kemiskinan.”

lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁵⁷

Tujuan dari adanya filantropi Islam salah satunya yakni untuk mensejahterakan kehidupan umat. Hal itu dapat diwujudkan melalui penyaluran dana ZIS. Penyaluran dana ZIS merupakan proses distribusi dana ZIS yang telah dikumpulkan dari masyarakat kepada kelompok penerima manfaat yang berhak, sesuai dengan prinsip keadilan dan tujuan pemberdayaan umat. Dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60, Allah SWT menetapkan delapan golongan yang berhak menerima zakat, yang dikenal sebagai *ashnaf*. Ketentuan ini menjadi dasar dalam penyaluran dana zakat agar tepat sasaran dan sesuai syariat. Adapun kedelapan golongan tersebut adalah:

1. Fakir, adalah orang yang hampir tidak memiliki harta maupun penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
2. Miskin, adalah orang yang memiliki penghasilan, namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
3. Amil, adalah kelompok petugas atau panitia yang ditunjuk untuk mengelola, mengumpulkan, dan mendistribusikan zakat.
4. Muallaf, adalah orang yang baru masuk Islam dan masih membutuhkan dukungan moral dan materi agar mantap dalam keislamannya.
5. Riqab, adalah budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya.
6. Gharimin, adalah orang yang memiliki utang karena kebutuhan mendesak yang halal dan tidak mampu memenuhinya.
7. Fi Sabilillah, adalah kelompok yang berjuang di jalan Allah, termasuk kegiatan dakwah, pendidikan Islam, dan pembelaan agama.
8. Ibnu Sabil, adalah musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan jauh dan kehabisan bekal sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanannya.⁵⁸

Penyaluran dan pendistribusian dana ZIS yang dilakukan secara tepat sasaran dan terencana dapat memberikan dampak signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan. Ketika dana ZIS dialokasikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, sesuai dengan ketentuan syariat dan analisis kebutuhan sosial, maka bantuan tersebut bukan hanya bersifat sementara, tetapi juga mampu

⁵⁷ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015).

⁵⁸ Muiz et al., "Analisis Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) Terhadap Angka Kemiskinan Di Indonesia Periode 2013-2022."

memberdayakan penerima agar lebih mandiri secara ekonomi. Dengan demikian, ZIS menjadi instrumen penting dalam menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi umat secara berkelanjutan.⁵⁹

2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Fitri Ani Dwi Lusiana, Fitri Salsabila, Muhammad Kurniawan, 2024 ⁶⁰	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Inflasi, Pengangguran, Kemiskinan	Kuantitatif, dengan metode analisis regresi linier berganda	1. Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. 2. Inflasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kemiskinan. 3. Pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan.
2.	Maftuh Bahrul Ilmi, 2021 ⁶¹	PDRB, IPM, TPT, Kemiskinan	Kuantitatif, dengan metode analisis regresi data panel	1. PDRB berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. 2. IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. 3. TPT berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.

⁵⁹ Hany and Islamiyati, "Pengaruh ZIS Dan Faktor Makro Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia."

⁶⁰ Lusiana, Salsabila, and Kurniawan, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi , Inflasi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2014-2023."

⁶¹ Ilmi, "Pengaruh PDRB, IPM Dan TPT Terhadap Kemiskinan Di Lima Provinsi Dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi Di Indonesia Periode 2010-2019."

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
3.	Girycki Sana Aleffin, Niniek Imaningsih, 2024 ⁶²	Upah Minimum, TPT, <i>Dependency Ratio</i> , Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan	Kuantitatif, dengan metode analisis regresi linier berganda	1. Upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. 2. TPT berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. 3. <i>Dependency Ratio</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. 4. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.
4.	Erliza Milleia Putri, Dewi Zaini Putri, 2021 ⁶³	Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah, Kemiskinan	Kuantitatif, dengan metode analisis regresi data panel	1. Upah minimum berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kemiskinan 2. Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kemiskinan. 3. Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. 4. Pengeluaran pemerintah berpengaruh negati dan

⁶² Aleffin and Imaningsih, "Pengaruh Upah Minimum, TPT, Dependency Ratio Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur."

⁶³ Putri and Putri, "Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Indonesia."

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				tidak signifikan terhadap kemiskinan.
5.	Yulia Adella Sari, 2021 ⁶⁴	Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Jumlah Penduduk, Kemiskinan	Kuantitatif, dengan metode analisis regresi linier berganda	1. Upah minimum berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. 2. Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. 3. Jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan.
6.	Ibrahim Hasballah, 2021 ⁶⁵	Tingkat Pengangguran Terbuka, Kemiskinan	Kuantitatif, dengan metode analisis regresi linier berganda	1. Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.
7.	Lulut Lavenia, Syafri Mandai, Muhammad Yudhi Lutfi, 2023 ⁶⁶	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum, Pengangguran,	Kuantitatif, dengan metode analisis regresi data panel	1. Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. 2. Upah minimum berpengaruh negatif dan

⁶⁴ Sari, "Pengaruh Upah Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah."

⁶⁵ Hasballah, "Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Provinsi Aceh Di Kabupaten/Kota."

⁶⁶ Lavenia, Mandai, and Muhammad Yudhi Lutfi, "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb), Upah Minimum, Pengangguran, Jumlah Penduduk Dan Angka Melek Huruf Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 - 2021."

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Jumlah Penduduk, Angka Melek Huruf, Kemiskinan		signifikan terhadap kemiskinan. 3. Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. 4. Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. 5. Angka melek huruf berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.
8.	Ari Kristin Prasetyoningrum, U. Sulia Sukmawati, 2018 ⁶⁷	Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pengangguran (TPT), Kemiskinan	Kuantitatif, dengan metode analisis <i>path analysis</i> (analisis jalur)	1. IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. 2. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. 3. Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.
9.	Q'rene V. F. Supit, Josep B. Kalangi, Steeva Y. L. Tumangkeng, 2023 ⁶⁸	Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM),	Kuantitatif, dengan metode analisis regresi berganda	1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.

⁶⁷ Prasetyoningrum and Sukmawati, "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia."

⁶⁸ Supit, Kalangi, and Tumangkeng, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Minahasa."

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Pengangguran, Kemiskinan		2. IPM berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. 3. Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.
10.	Reni Ria Armayani Hasibuan, Anggi Kartika, Firdha Aigha Suwito, Lismaini Agustin, 2022 ⁶⁹	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Kemiskinan	Kuantitatif, dengan metode analisis regresi linier berganda	1. Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.
11.	Erina Mega Alliyah, Prasetio Ariwibowo, Mima Nizma, 2024 ⁷⁰	Upah Minimum, Pengangguran, Kemiskinan	Kuantitatif, dengan metode analisis regresi berganda	1. Upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. 2. Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.
12.	Eris Munandar, Mulia Amirullah, Nila Nurochani, 2020 ⁷¹	Penyaluran Dana ZIS, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan	Kuantitatif, dengan metode analisis regresi linier berganda	1. Penyaluran dana ZIS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. 2. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.

⁶⁹ Hasibuan et al., “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Kemiskinan Kota Medan.”

⁷⁰ Erina Mega Alliyah, Prasetio Ariwibowo, and Mima Nizma, “Pengaruh Upah Minimum Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Sumatera Utara Periode 2005-2020,” *Sosio E-Kons* 16, no. 3 (2024): 279–287.

⁷¹ Munandar Eris, Amirullah Mulia, and Nurochani Nila, “Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan.”

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
13.	Aris Nurul Muiz, Nila Aprilian, Wulansari, Imam Ahmad Dafi, Elis Nurhasanah, 2023 ⁷²	Penyaluran Dana ZIS, Kemiskinan	Kuantitatif, dengan metode analisis regresi linier berganda	1. Penyaluran dana ZIS berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.
14.	Muhammad Ramadhani, Difi Dahliana, 2022 ⁷³	Pengangguran, Penyaluran Dana ZIS, Kemiskinan	Kuantitatif, dengan metode analisis regresi linier berganda	1. Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. 2. Penyaluran dana ZIS berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.
15.	Ira Humaira Hany, Dina Islamiyati, 2020 ⁷⁴	Penyaluran Dana ZIS, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan	Kuantitatif, dengan metode analisis regresi berganda	1. Penyaluran dana ZIS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. 2. Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. 3. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.

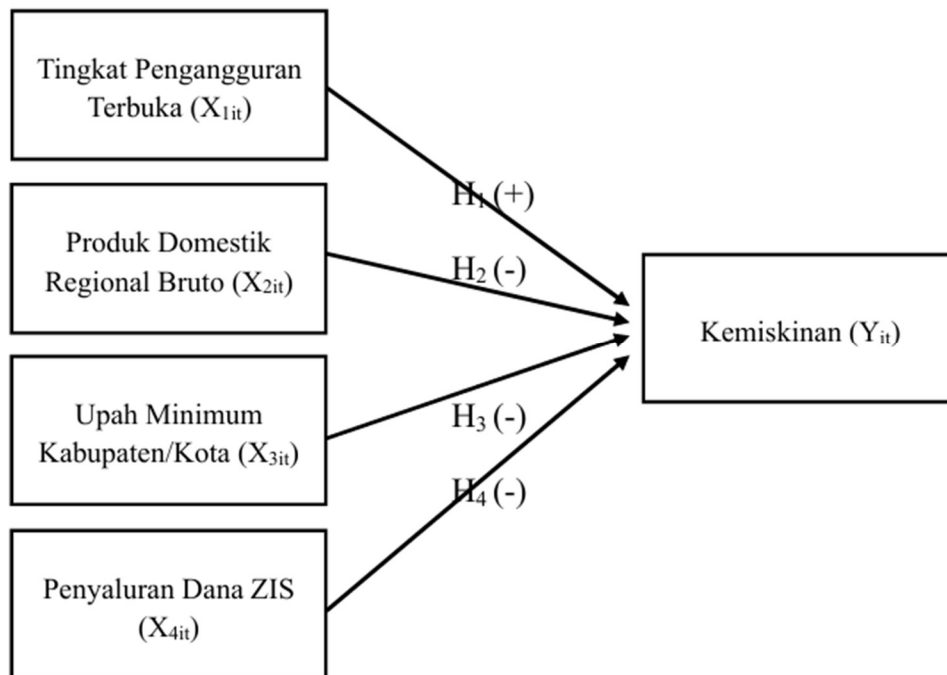
⁷² Muiz et al., “Analisis Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) Terhadap Angka Kemiskinan Di Indonesia Periode 2013-2022.”

⁷³ Muhammad Ramadhani and Difi Dahliana, “Dampak Pengangguran Dan Penyaluran Dana Zakat Infak Sedekah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Kalimantan Selatan,” *Ecoplan* 5, no. 2 (2022): 150–158.

⁷⁴ Hany and Islamiyati, “Pengaruh ZIS Dan Faktor Makro Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia.”

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu pernyataan atau dugaan sementara yang kebenarannya masih memerlukan pembuktian melalui proses penelitian. Berdasarkan kerangka pemikiran yang disajikan pada Gambar 2.2, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan

Tingkat pengangguran terbuka memiliki potensi untuk memengaruhi tingkat kemiskinan, karena kondisi ini membatasi akses masyarakat terhadap kesempatan kerja dan sumber pendapatan yang layak. Menurut teori kependudukan Malthus, apabila pertumbuhan penduduk tidak diikuti dengan kesempatan kerja yang bertambah luas, maka akan terjadi ketimpangan pendapatan, sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh semakin berkurangnya kesempatan kerja dan semakin banyak persaingan untuk memperoleh pekerjaan, maka individu atau angkatan kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan akan masuk dalam kelompok pengangguran.⁷⁵

⁷⁵ Supit, Kalangi, and Tumangkeng, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Minahasa," 75.

Penelitian Aldi menunjukkan hasil bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Artinya ketika tingkat pengangguran terbuka naik maka kemiskinan juga akan naik, sebaliknya ketika tingkat pengangguran turun maka tingkat kemiskinan juga akan turun.⁷⁶ Hasil penelitian Ilmi juga menunjukkan arah positif pada hubungan tingkat pengangguran dengan kemiskinan, namun hubungan tersebut tidak signifikan. Berdasarkan teori yang dipaparkan, didapatkan hipotesis:

H1 : Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Jawa Tengah

2.4.2 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan

Terdapat hubungan erat antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Salah satu indikator utama untuk menilai kondisi ekonomi suatu wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik berdasarkan harga konstan maupun harga berlaku. Menurut Kuncoro, metode pembangunan klasik lebih diartikan sebagai pembangunan yang lebih memprioritaskan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto suatu provinsi, wilayah, maupun kota. Pertumbuhan ekonomi dijelaskan melalui tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto berdasarkan harga konstan, yang menggambarkan peningkatan produksi barang dan jasa di seluruh wilayah dalam kegiatan ekonomi. Sementara itu, Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku digunakan untuk menunjukkan skala perekonomian serta kontribusi masing-masing sektor ekonomi.⁷⁷

Semakin tinggi Produk Domestik Regional Bruto di suatu wilayah, semakin besar pula kapasitas keterbukaan ekonomi di daerah tersebut. Secara nyata, Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap keseluruhan tenaga kerja yang masih aktif, dengan asumsi bahwa peningkatan Produk Domestik Regional Bruto akan mendorong kenaikan total nilai tambah di berbagai sektor ekonomi. Hal ini dapat berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan, karena pertumbuhan ekonomi yang lebih besar berpotensi menciptakan lebih banyak peluang kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong kesejahteraan secara keseluruhan.

⁷⁶ Aldi, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Kemiskinan Di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2017-2022 Dengan Pengangguran Terbuka Sebagai Variabel Moderating."

⁷⁷ Hasibuan et al., "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Kemiskinan Kota Medan," 687.

Hasil penelitian Handika Permana dan Esti Pasaribu menunjukkan hasil bahwa Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Salah satu dampak positif dari pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto adalah dapat mengurangi tingkat kemiskinan.⁷⁸ Penelitian Enzelina dan Novianti juga menunjukkan hasil yang sama yakni Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang artinya ketika Produk Domestik Regional Bruto naik, maka kemiskinan akan berkurang. Berdasarkan teori di atas, didapatkan hipotesis:

H2 : Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah

2.4.3 Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Kemiskinan

Upah minimum sering dianggap sebagai cara yang efektif untuk mengurangi perbedaan pendapatan yang ada di masyarakat. Penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan upah para pekerja yang masih berpendapatan di bawah upah minimum. Upah minimum memiliki peran yang signifikan dengan potensi untuk mempengaruhi kenaikan pendapatan secara luas dan memiliki dampak penting dalam mengurangi kemiskinan serta ketimpangan pendapatan. Namun kebijakan upah minimum tidak hanya berdampak pada upah pekerja dengan tingkat upah di sekitar upah minimum, tetapi juga berdampak ke seluruh distribusi upah. Oleh sebab itu, kebijakan upah minimum pada akhirnya akan berdampak pada harga, iklim usaha dan penyerapan tenaga kerja.⁷⁹

Peningkatan upah minimum memang berhubungan negatif dengan tingkat kemiskinan, di mana semakin tinggi upah minimum maka akan mengurangi angka kemiskinan. Namun jika berkaitan dengan pengangguran, peningkatan upah minimum justru berhubungan positif dengan tingkat pengangguran, semakin tinggi upah minimum maka semakin sedikit permintaan tenaga kerja yang berarti semakin banyak pengangguran.

⁷⁸ Handika Permana and Esti Pasaribu, "Pengaruh Inflasi, IPM, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Di Pulau Sumatera," *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* 7, no. 3 (2023): 1125.

⁷⁹ Izzaty and Rafika Sari, "Kebijakan Penetapan Upah Minimum Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 4 (2013): 143, <http://wartaekonomi.co.id/berita7450/perburuhan-menjaga-keseimbangan-upahdan-produktivitas-bagian-ii.html>, diakses 20 Maret 2013.

Hasil penelitian Erina dkk, menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sejalan dengan hasil penelitian Lavenia dkk, yang juga menunjukkan pengaruh negatif upah minimum terhadap kemiskinan. Hal itu berarti apabila upah minimum naik, maka tingkat kemiskinan akan berkurang, begitupun sebaliknya.⁸⁰ Berdasarkan uraian teori di atas, didapatkan hipotesis:

H3 : Upah minimum kabupaten/kota berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Jawa Tengah

2.4.4 Pengaruh Penyaluran Dana ZIS Terhadap Kemiskinan

Penyaluran dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) memiliki peran strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan, terutama di negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Penyaluran ZIS yang tepat sasaran dapat memberikan dampak nyata dalam menurunkan angka kemiskinan. Dana ZIS yang disalurkan kepada kelompok yang membutuhkan, yaitu 8 ashnaf, membantu mencukupi kebutuhan dasar hidup mereka sekaligus mendukung pemberdayaan ekonomi. Melalui program produktif seperti pelatihan, modal usaha, atau beasiswa, ZIS tidak hanya bersifat *charity*, tetapi juga mendorong kemandirian mustahik. Dengan pengelolaan yang transparan dan profesional, ZIS menjadi alat efektif dalam menciptakan keadilan sosial dan mempercepat pengentasan kemiskinan.

Penelitian Munandar menunjukkan hasil bahwa variabel penyaluran ZIS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Artinya ketika penyaluran dana ZIS meningkat maka tingkat kemiskinan akan berkurang.⁸¹ Namun hasil penelitian Muiz menunjukkan variabel penyaluran ZIS berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan. Hal itu terjadi karena penyaluran ZIS belum signifikan untuk menurunkan tingkat kemiskinan sebab penghimpunan serta pendistribusian dana ZIS masih belum tepat sasaran dan efisien.⁸² Berdasarkan uraian teori tersebut, didapatkan hipotesis:

⁸⁰ Lulut Lavenia, Syafri Mandai, and Muhammad Yudhi Lutfi, "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum, Pengangguran, Jumlah Penduduk Dan Angka Melek Huruf Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 - 2021," *Jurnal Ekonomi Trisakti* 3, no. 1 (2023): 324, <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.15412>.

⁸¹ Munandar Eris, Amirullah Mulia, and Nurochani Nila, "Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan."

⁸² Muiz et al., "Analisis Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) Terhadap Angka Kemiskinan Di Indonesia Periode 2013-2022."

H4 : Penyaluran dana ZIS berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu metode penelitian yang didasarkan pada filsafat positivisme. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji populasi atau sampel tertentu dengan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian yang terstandar. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara statistik tujuan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.⁸³ Sumber data yang dipakai adalah data sekunder. Data-data yang digunakan berupa data historis variabel-variabel penelitian yang diperoleh melalui *website-website* relevan, serta data-data pendukung lain yang didapat melalui literatur, jurnal, maupun penelitian terdahulu yang selaras dengan penelitian ini.

3.2 Populasi dan Sampel

Dalam sebuah penelitian, populasi mengacu pada keseluruhan kelompok atau elemen yang memiliki karakteristik tertentu yang menjadi objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah selama periode 2020-2024. Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih sebagai sumber data dalam penelitian dan dapat mewakili keseluruhan populasi.⁸⁴ Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *nonprobability sampling* dengan jenis sampel jenuh. Sampel jenuh merupakan teknik penentuan sampel di mana seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel penelitian.⁸⁵

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai data-data dan fakta yang terkait dengan masalah dan tujuan penelitian yang berasal dari dokumen, buku, jurnal, situs web, serta sumber-sumber lain yang relevan. Penelitian ini mengambil data dari Badan Pusat Statistik dengan judul “Kemiskinan”, “Produk Domestik Regional Bruto”, “Upah Minimum Kabupaten/Kota”, “Tingkat Pengangguran Terbuka”, dan dari BAZNAS RI dengan judul “Laporan pengelolaan Zakat

⁸³ Muh Yani Balaka, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, ed. Iskandar Ahmaddien, 1st ed. (Bandung: Widina Bhakti Persada bandung, 2022).

⁸⁴ Asrulla et al., “Populasi Dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) Dalam Pendekatan Praktis,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 26322.

⁸⁵ Nidia Suriani, Risnita, and M. Syahrani Jailani, “Konsep Populasi Dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan,” *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 24–36, <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.55>.

Nasional”. Data yang diambil dalam penelitian ini merupakan data tahunan pada periode 2020-2024.

Data yang diperlukan untuk kepentingan penelitian ini adalah;

1. Data Tingkat Kemiskinan pada 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2020-2024.
2. Data Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan pada 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2020-2024.
3. Data Upah Minimum Kabupaten/Kota pada 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2020-2024.
4. Data Tingkat Pengangguran Terbuka pada 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2020-2024.
5. Data Penyaluran Dana ZIS pada BAZNAS 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2020-2024.

3.4 Variabel Penelitian dan Pengukuran

3.4.1 Variabel Dependen (Terikat)

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh sebuah atau sejumlah variabel lain (variabel independen). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Tingkat Kemiskinan (Y) pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Kemiskinan merupakan kondisi ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak, atau suatu kondisi di bawah nilai standar kebutuhan minimum untuk pangan maupun non pangan yang disebut garis kemiskinan (GM). Variabel kemiskinan dalam penelitian ini menggunakan data persentase penduduk miskin kabupaten/kota di Jawa Tengah. Jenis data berupa data tahunan periode 2020-2024 dalam satuan persen. Data didapatkan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

3.4.2 Variabel Independen (Bebas)

Variabel Independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain (variabel dependen).⁸⁶

a. Tingkat Pengangguran Terbuka (X_1)

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja. Variabel tingkat pengangguran terbuka dalam penelitian ini menggunakan data Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Data berupa data tahunan periode 2020-2024

⁸⁶ UNSERA, “Variabel Dalam Penelitian: Jenis-Jenis & Cara Menentukannya,” *UNSERA Universitas Serang Raya*, n.d., <https://unsera.ac.id/2024/09/19/variabel-dalam-penelitian-jenis-jenis-cara-menentukannya/>.

dalam satuan persen. Data didapatkan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

b. Produk Domestik Regional Bruto (X_2)

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah bruto dari seluruh sektor ekonomi yang dihasilkan oleh unit produksi di suatu wilayah dalam periode tertentu. Variabel Produk Domestik Regional Bruto dalam penelitian ini menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Data berupa data tahunan periode 2020-2024 dalam satuan miliar rupiah. Data didapatkan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

c. Upah Minimum Kabupaten/Kota (X_3)

Upah minimum kabupaten/kota adalah upah bulanan terendah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah bagi pekerja di suatu kabupaten/kota. Variabel upah minimum dalam penelitian ini menggunakan data Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Tengah. Data berupa data tahunan periode 2020-2024 dalam satuan rupiah. Data didapatkan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

d. Penyaluran Dana ZIS (X_4)

Penyaluran dana ZIS adalah proses atau kegiatan mendistribusikan dana ZIS kepada pihak yang berhak (mustahik). Variabel penyaluran dana ZIS dalam penelitian ini menggunakan data Penyaluran Dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Data berupa data tahunan periode 2020-2024 dalam satuan rupiah. Data didapatkan dari BAZNAS RI.

3.4.3 Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Definisi	Indikator	Satuan
1.	Kemiskinan	Kemiskinan merupakan kondisi ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak, atau suatu kondisi di bawah nilai standar kebutuhan minimum untuk pangan	1. Tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan 2. Tidak mampu memenuhi kebutuhan non makanan	Persen

		maupun non pangan yang disebut Garis Kemiskinan (GM).	$GM = GMK + GKNM$	
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja.	1. Individu belum memiliki pekerjaan 2. Individu tidak memiliki pekerjaan $TPT = \left(\frac{\text{Jumlah Penganggur}}{\text{Angkatan Kerja}} \right) \times 100\%$	Persen
3.	Produk Domestik Regional Bruto	Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah bruto dari seluruh sektor ekonomi yang dihasilkan oleh unit produksi di suatu wilayah dalam periode tertentu.	Produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan (tahun dasar 2010)	Dalam miliar
4.	Upah Minimum Kabupaten/ Kota	Upah minimum kabupaten/kota adalah upah bulanan terendah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah bagi pekerja di suatu kabupaten/kota.	Nilai upah minimum kabupaten/ kota yang ditetapkan setiap tahun melalui Keputusan Gubernur berdasarkan saran dari Dewan Pengupahan Daerah	Rupiah
5.	Penyaluran Dana ZIS	Penyaluran dana ZIS adalah proses atau kegiatan mendistribusikan dana	Jumlah dana ZIS yang disalurkan per tahun per kabupaten/	Rupiah

		ZIS kepada pihak yang berhak (mustahik).	kota, yang tercatat dalam laporan distribusi BAZNAS Kabupaten/ Kota	
--	--	--	---	--

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara memberikan deskripsi terkait data-data atau variabel-variabel dalam penelitian yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bertujuan menarik kesimpulan yang bersifat umum atau dapat digeneralisasi.⁸⁷ Statistik deksripif mencakup nilai rata-rata, nilai tengah, batas maksimum, batas minimum, serta standar deviasi.

3.5.2 Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan model regresi data panel sebagai teknik analisis. Regresi data panel merupakan kombinasi antara data *cross section* dan data *time series*, di mana unit *cross section* yang sama diamati dalam beberapa periode waktu. Model ini memungkinkan peneliti untuk mempertimbangkan efek individu maupun efek waktu yang mungkin mempengaruhi hubungan antar variabel dalam penelitian. Analisis regresi data panel dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan *software* Eviews 12.

Penelitian ini terdiri dari tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Ketiga variabel independen tersebut di antaranya yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (X_{1it}), Produk Domestik Regional Bruto (X_{2it}), Upah Minimum Kabupaten/Kota (X_{3it}), Penyaluran Dana ZIS (X_{4it}), dan satu variabel dependen yaitu Kemiskinan (Y_{it}). Model penelitian ini diformulasikan dalam bentuk persamaan regresi data panel sebagai berikut:

⁸⁷ Ali Muhson, "Teknik Analisis Kuantitatif," *Academia*, 2006, 1–7.

$$Y_{it} = a + b_1X_{1it} + b_2X_{2it} + b_3X_{3it} + b_4X_{4it} + e$$

Keterangan:

Y_{it}	= Kemiskinan
a	= Konstanta
b_1	= Koefisien regresi untuk X_{1it}
b_2	= Koefisien regresi untuk X_{2it}
b_3	= Koefisien regresi untuk X_{3it}
b_4	= Koefisien regresi untuk X_{4it}
X_{1it}	= Tingkat Pengangguran Terbuka
X_{2it}	= Produk Domestik Regional Bruto
X_{3it}	= Upah Minimum Kabupaten/Kota
X_{4it}	= Penyaluran Dana ZIS
e	= <i>Error term</i>

Pada penelitian pendidikan atau sosial ekonomi, biasanya digunakan tingkat kesalahan (α) dalam taraf signifikansi sebesar 5% atau 10%, sedangkan untuk penelitian kesehatan tingkat kesalahan yang digunakan sebesar 1%.⁸⁸ Maka dari itu, tingkat kesalahan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu sebesar 5% atau 0,05.

3.5.3 Estimasi Model Regresi Data Panel

Estimasi model regresi data panel bisa dilakukan dengan tiga pendekatan di antaranya:

a. *Common Effect Model* (CEM)

Common Effect Model merupakan pendekatan paling sederhana dalam analisis regresi data panel. Dalam model ini, seluruh data *time series* dan *cross-section* dianggap homogen dan dianalisis secara bersama-sama menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS), tanpa memperhitungkan adanya perbedaan karakteristik antar individu maupun waktu.

b. *Fixed Effect Model* (FEM)

Fixed Effect Model adalah pendekatan yang memperhitungkan adanya perbedaan konstanta antar unit *cross-section*. Model ini mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya

⁸⁸ Anislka, "TARAF SIGNIFIKANSI α : MAKNA & PENGGUNAAN," Statistikapenelitian.com, 2018, [https://statistikpenelitian.com/taraf-signifikansi- \$\alpha\$ -makna-penggunaan/#:~:text=CONTOH%3A Sebagai contoh misalkan kita menggunakan tingkat kesalahan,benar dalam mengambil keputusan sedikitnya 95%25 %28tingkat kepercayaan%29.](https://statistikpenelitian.com/taraf-signifikansi-α-makna-penggunaan/#:~:text=CONTOH%3A%20Sebagai%20contoh%20misalkan%20kita%20menggunakan%20tingkat%20kesalahan%2C%20benar%20dalam%20mengambil%20keputusan%20sedikitnya%2095%25%20tingkat%20kepercayaan%29.)

perbedaan *intercept* antar individu, sehingga memungkinkan identifikasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam setiap entitas secara lebih akurat.

c. *Random Effect Model* (REM)

Random Effect Model adalah pendekatan yang mengestimasi variabel gangguan (*error term*) yang saling berhubungan antar individu dan antar waktu. Dalam model ini, perbedaan *intercept* diakomodasikan dengan *error term* masing-masing individu.

3.5.4 Penentuan Teknik Dengan Uji Regresi Data Panel

Dalam regresi data panel, ada 3 model pendekatan, yakni *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, serta *Random Effect Model*. Untuk menentukan model estimasi yang tepat dalam menganalisis data panel, terdapat 3 jenis pengujian, di antaranya Uji Chow, Uji Hausman, serta Uji *Lagrange Multiplier*.

1. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan model terbaik antara *Common Effect Model* dengan *Fixed Effect Model*. Apabila nilai probabilitas Cross-section Chi-square kurang dari 0,05 maka yang terpilih adalah *Fixed Effect Model*. Tetapi jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka yang terpilih adalah *Common Effect Model*.

2. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan model terbaik antara *Fixed Effect Model* dengan *Random Effect Model*. Apabila nilai probabilitas Cross-section random kurang dari 0,05 maka yang terpilih adalah *Fixed Effect Model*. Sedangkan jika nilai probabilitas Cross-section random lebih dari 0,05 maka yang terpilih adalah *Random Effect Model*.

3. Uji *Lagrange Multiplier*

Uji *Lagrange Multiplier* digunakan untuk menentukan model terbaik antara *Random Effect Model* dengan *Common Effect Model*. Jika nilai probabilitas Breusch-Pagan kurang dari 0,05 maka yang terpilih adalah *Random Effect Model*. Tetapi jika nilai probabilitas Breusch-Pagan lebih dari 0,05 maka yang terpilih adalah *Common Effect Model*.

3.5.5 Uji Asumsi Klasik

Asumsi klasik adalah syarat-syarat statistik yang harus dipenuhi pada metode analisis kuadrat terkecil atau least square. Terdapat 4 jenis pengujian dalam asumsi

klasik, yakni uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, serta uji autokorelasi. Dalam regresi data panel, uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas dan uji multikolinearitas.

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan bertujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan beberapa metode, salah satunya adalah uji *Jarque-Bera* (JB). Uji ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah data dalam model regresi terdistribusi secara normal. Uji ini dilakukan dengan membandingkan probabilitas *Jarque-Bera* (JB) hitung dengan tingkat α 0,05 (5%). Jika nilai probabilitas JB hitung lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal dan sebaliknya, jika nilainya lebih kecil maka dinyatakan bahwa data terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan sebuah pengujian yang digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan korelasi antar variabel independen. Model regresi yang ideal seharusnya tidak menunjukkan korelasi di antara variabel independen. Untuk menguji masalah multikolinearitas dapat melihat matriks korelasi dengan meregresi semua variabel bebas, jika terjadi koefisien korelasi antar variabel lebih dari 0,8 maka terdapat masalah multikolinearitas.

3.5.6 Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai yang mendekati 1 maka dapat disimpulkan variabel independen mampu menjelaskan hampir semua informasi yang dibutuhkan dalam menduga variabel dependen. Sedangkan jika nilai mendekati 0 maka dapat disimpulkan semakin lemah variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

2. Uji Parsial (Uji t)

Uji t secara umum digunakan untuk mengukur sejauh mana pengaruh masing-masing variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen. Pengambilan keputusan dalam uji ini didasarkan pada nilai probabilitas. Jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka dapat

disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

3. Uji Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah keseluruhan variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan taraf signifikansi 5%. Apabila nilai probabilitas $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Jawa Tengah

Jawa Tengah terletak di bagian tengah Pulau Jawa dan berada di antara dua pusat pertumbuhan ekonomi utama, yaitu Jakarta - Surabaya, serta berdekatan dengan kawasan strategis pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Secara geografis, wilayah ini terletak pada koordinat 5°40' hingga 8°30' Lintang Selatan dan 108°30' hingga 111°30' Bujur Timur, mencakup wilayah Kepulauan Karimunjawa. Luas wilayah Jawa Tengah adalah sekitar 3.254.412 hektar, yang mewakili 25,04% dari luas Pulau Jawa dan sekitar 1,70% dari luas wilayah Indonesia. Jawa Tengah memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 791,76 km, yang terbagi atas 502,69 km di sisi utara dan 289,07 km di sisi selatan.

Secara geografis, provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Provinsi Jawa Timur di sebelah timur, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudera Hindia di sebelah selatan, serta Laut Jawa di sebelah utara. Secara administratif, Jawa Tengah terdiri dari 35 daerah otonom yang meliputi 29 kabupaten dan 6 kota. Daerah-daerah tersebut terbagi menjadi 573 kecamatan, 7.809 desa dan 769 kelurahan, yang mencerminkan ukuran dan kompleksitas pemerintahan daerah di provinsi ini.⁸⁹

Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah



⁸⁹ “SKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023” (Gubernur Jawa Tengah, 2023).

Jawa Tengah memiliki posisi geostrategis yang cukup signifikan, sebagaimana tercermin dari beberapa hal berikut ini:

- a. Terletak di tengah-tengah Pulau Jawa, berada di antara dua pusat pertumbuhan utama, yaitu Jakarta dan Surabaya, serta berdekatan dengan daerah wisata unggulan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
- b. Jawa Tengah termasuk dalam jaringan transportasi utama nasional, yang berfungsi sebagai penghubung antara berbagai pusat pertumbuhan ekonomi dan sebagai jalur penting bagi distribusi barang dan jasa di Pulau Jawa. Selain itu, juga memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang ke wilayah internasional.
- c. Jawa Tengah dengan potensi sektor pertanian yang tersebar luas di hampir seluruh wilayahnya, menjadikannya sebagai salah satu basis utama dalam pengembangan politik pertanian nasional.
- d. Jawa Tengah berkembang sebagai pusat industri yang ramah lingkungan, pusat perdagangan dan jasa internasional, serta destinasi pariwisata dunia yang berbasis warisan budaya dan ilmu pengetahuan.
- e. Jawa Tengah berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem di sekitarnya sebagai bagian integral dari bio-region Pulau Jawa.

Dengan letaknya yang strategis di Pulau Jawa, Jawa Tengah memiliki peluang besar dalam pengembangan sektor perdagangan dan jasa. Potensi ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah di setiap kabupaten/kota yang berada dalam wilayah administratif provinsi ini. Peran Jawa Tengah sebagai jalur penghubung utama antara Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur semakin memperkuat fungsinya sebagai daerah transit dan distribusi. Sinergi yang efektif antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengembangkan sektor perdagangan dan jasa dapat memberikan kontribusi positif dalam menurunkan angka kemiskinan di wilayah Jawa Tengah.⁹⁰

Tabel 4.1 Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

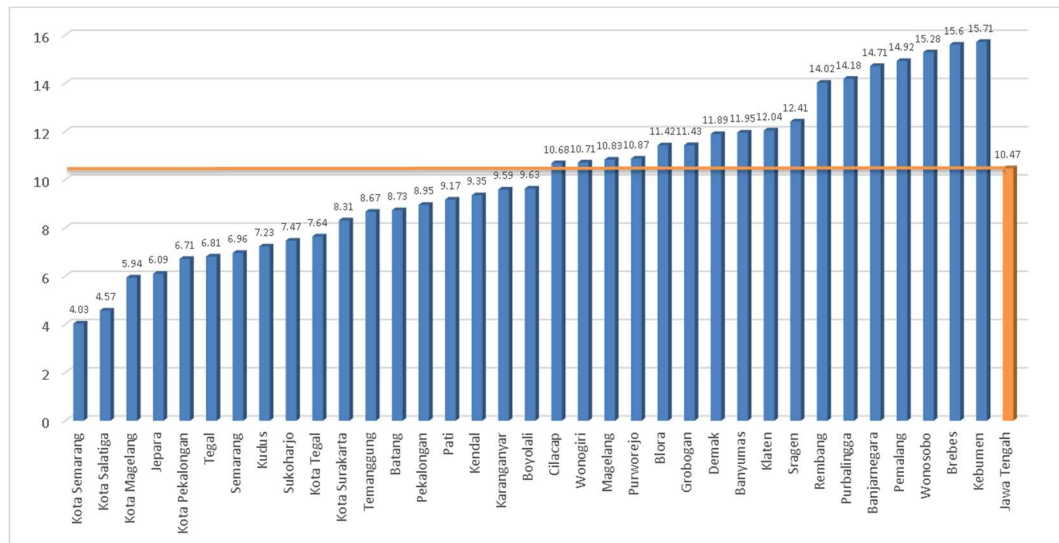
Kab/Kota	Persentase Kemiskinan Kab/Kota di Jawa Tengah (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Cilacap	11.46	11.67	11.02	10.99	10.68
Kabupaten Banyumas	13.26	13.66	12.84	12.53	11.95
Kabupaten Purbalingga	15.9	16.24	15.3	14.99	14.18

⁹⁰ “SKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023.”

Kabupaten Banjarnegara	15.64	16.23	15.2	14.9	14.71
Kabupaten Kebumen	17.59	17.83	16.41	16.34	15.71
Kabupaten Purworejo	11.78	12.4	11.53	11.33	10.87
Kabupaten Wonosobo	17.36	17.67	16.17	15.58	15.28
Kabupaten Magelang	11.27	11.91	11.09	10.96	10.83
Kabupaten Boyolali	10.18	10.62	9.82	9.81	9.63
Kabupaten Klaten	12.89	13.49	12.33	12.28	12.04
Kabupaten Sukoharjo	7.68	8.23	7.61	7.58	7.47
Kabupaten Wonogiri	10.86	11.55	10.99	10.94	10.71
Kabupaten Karanganyar	10.28	10.68	9.85	9.79	9.59
Kabupaten Sragen	13.38	13.83	12.94	12.87	12.41
Kabupaten Grobogan	12.46	12.74	11.8	11.72	11.43
Kabupaten Blora	11.96	12.39	11.53	11.49	11.42
Kabupaten Rembang	15.6	15.8	14.65	14.17	14.02
Kabupaten Pati	10.08	10.21	9.33	9.31	9.17
Kabupaten Kudus	7.31	7.6	7.41	7.24	7.23
Kabupaten Jepara	7.17	7.44	6.88	6.61	6.09
Kabupaten Demak	12.54	12.92	12.09	12.01	11.89
Kabupaten Semarang	7.51	7.82	7.27	7.17	6.95
Kabupaten Temanggung	9.96	10.17	9.33	9.26	8.67
Kabupaten Kendal	9.99	10.24	9.48	9.39	9.35
Kabupaten Batang	9.13	9.68	8.98	8.92	8.73
Kabupaten Pekalongan	10.19	10.57	9.67	9.67	8.95
Kabupaten Pemalang	16.02	16.56	15.06	15.03	14.92
Kabupaten Tegal	8.14	8.6	7.9	7.3	6.81
Kabupaten Brebes	17.03	17.43	16.05	15.78	15.6
Kota Magelang	7.58	7.75	7.1	6.11	5.94
Kota Surakarta	9.03	9.4	8.84	8.44	8.31
Kota Salatiga	4.94	5.14	4.73	4.66	4.57
Kota Semarang	4.34	4.56	4.25	4.23	4.03
Kota Pekalongan	7.17	7.59	7	6.81	6.71
Kota Tegal	7.8	8.12	7.91	7.68	7.64

Ketimpangan sebaran kemiskinan di Jawa Tengah masih menjadi isu krusial dalam upaya pembangunan yang berkeadilan dan merata. Meskipun secara agregat angka kemiskinan di Jawa Tengah cenderung menurun dari tahun ke tahun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penurunan tersebut tidak terjadi secara merata di seluruh kabupaten dan kota, sebagaimana gambar berikut:

Grafik 4.1 Sebaran Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024.

Berdasarkan Gambar 4.2 diketahui kabupaten/kota dengan persentase kemiskinan terkecil adalah Kota Semarang dengan angka 4,03%, dan persentase kemiskinan terbesar adalah Kabupaten Kebumen dengan angka 15,71%. Adapun persebaran persentase penduduk miskin kabupaten/kota di Jawa Tengah terbagi dalam dua kelompok, yaitu:

1. Kabupaten/Kota dengan persentase penduduk miskin di atas angka provinsi sebanyak 17 kabupaten meliputi Cilacap, Wonogiri, Magelang, Purworejo, Blora, Grobogan, Demak, Banyumas, Klaten, Sragen, Rembang, Purbalingga, Banjarnegara, Pemalang, Wonosobo, Brebes, dan Kebumen.
2. Kabupaten/Kota dengan persentase penduduk miskin di bawah angka provinsi sebanyak 18 kabupaten/kota meliputi Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Magelang, Jepara, Kota Pekalongan, Tegal, Semarang, Kudus, Sukoharjo, Kota Tegal, Kota Surakarta, Temanggung, Batang, Pekalongan, Pati, Kendal, Karanganyar, dan Boyolali.

4.2 Deskripsi Variabel Penelitian

4.2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran adalah kondisi di mana individu dalam usia kerja aktif (15 tahun ke atas) tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, dan siap untuk bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator utama yang digunakan untuk mengukur proporsi penduduk yang menganggur dari total

angkatan kerja.⁹¹ Pada tahun 2024, Provinsi Jawa Tengah mencatatkan penurunan signifikan dalam tingkat pengangguran terbuka. Menurut data Badan Pusat Statistik, pada Agustus 2024, TPT Jawa Tengah tercatat sebesar 4,78%, menurun dibandingkan dengan 5,13% pada Agustus 2023. Jumlah pengangguran juga mengalami penurunan dari 1,08 juta orang pada Agustus 2023 menjadi 0,94 juta orang pada Februari 2024.⁹²

Tabel 4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Kab/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota di Jawa Tengah (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Cilacap	9.1	9.97	9.62	8.74	7.83
Kabupaten Banyumas	6	6.05	6.05	6.35	6.18
Kabupaten Purbalingga	6.1	6.05	5.23	5.61	4.96
Kabupaten Banjarnegara	5.86	5.86	6.38	6.26	5.57
Kabupaten Kebumen	6.07	6.03	5.92	5.11	5.07
Kabupaten Purworejo	4.04	3.59	4.45	4.02	3.89
Kabupaten Wonosobo	5.37	5.26	5.01	4.95	4.02
Kabupaten Magelang	4.27	5.03	4.97	4.42	3.55
Kabupaten Boyolali	5.28	5.09	4.92	4.05	3.16
Kabupaten Klaten	5.46	5.48	4.31	4.2	3.97
Kabupaten Sukoharjo	6.93	3.32	2.47	3.4	3.65
Kabupaten Wonogiri	4.27	2.43	1.95	1.92	2.4
Kabupaten Karanganyar	5.96	5.89	5.7	4.35	3.47
Kabupaten Sragen	4.75	4.76	4.69	3.87	3.53
Kabupaten Grobogan	4.5	4.38	4.4	4.02	3.23
Kabupaten Blora	4.89	3.81	3.7	3.1	3.67
Kabupaten Rembang	4.83	3.67	1.76	2.6	2.84
Kabupaten Pati	4.74	4.6	4.45	4.29	3.87
Kabupaten Kudus	5.53	3.77	3.21	3.25	3.19
Kabupaten Jepara	6.7	4.23	4.1	3.35	3.34
Kabupaten Demak	7.31	5.28	6.11	5.38	4.75
Kabupaten Semarang	4.57	5.02	4.81	4.05	3.73
Kabupaten Temanggung	3.85	2.62	2.54	2.32	2.35
Kabupaten Kendal	7.56	7.55	7.34	5.76	5.01
Kabupaten Batang	6.92	6.59	6.64	6.06	5.67
Kabupaten Pekalongan	6.97	4.28	3.23	3.25	3.3

⁹¹ Siregar, Lubis, and Inayah, “Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO), Upah Minimum Regional (UMR) Dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Provinsi Sumatera Utara.”

⁹² Bambang Sutopo Hadi, “BPS: Pengangguran Di Jateng Terus Turun Lima Tahun Terakhir,” Antara, 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4444689/bps-pengangguran-di-jateng-terus-turun-lima-tahun-terakhir>

Kabupaten Pemalang	7.64	6.71	6.63	6.55	6.63
Kabupaten Tegal	9.82	9.97	9.64	8.6	7.53
Kabupaten Brebes	9.83	9.78	9.48	8.98	8.35
Kota Magelang	8.59	8.73	6.71	5.25	4.4
Kota Surakarta	7.92	7.85	5.83	4.58	4.61
Kota Salatiga	7.44	7.26	5.58	4.57	3.86
Kota Semarang	9.57	9.54	7.6	5.99	5.82
Kota Pekalongan	7.02	6.89	4.98	5.02	4.91
Kota Tegal	8.4	8.25	6.68	6.05	5.88

4.2.2 Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi pada suatu wilayah dan dalam kurun waktu tertentu. Produk Domestik Regional Bruto mencakup seluruh nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas ekonomi, seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, serta jasa keuangan dan pemerintahan, yang berlangsung dalam batas wilayah administratif suatu daerah.⁹³

Pada tahun 2024, perekonomian provinsi Jawa Tengah mengalami pertumbuhan yang sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp1.817.776,96 miliar, dan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan sebesar Rp1.157.025,94 miliar, dengan kontribusi sektor industri pengolahan mencapai 33,84% dari sisi produksi dan konsumsi rumah tangga menyumbang 61,29% dari sisi pengeluaran. Pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah (YoY) pada tahun 2024 sebesar 4,95 persen sedangkan capaian tahun 2023 tumbuh 4,97 persen.⁹⁴ Berikut tabel perkembangan Produk Domestik Regional Bruto ADHK pada kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2020-2024:

Tabel 4.3 PDRB ADHK Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Kab/Kota	PDRB ADHK Kab/Kota di Jawa Tengah (Miliar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Cilacap	90011.58	91944.59	96677.84	101839.74	104540.67
Kabupaten Banyumas	39121.62	40686.81	43069.5	45396.3	47795.71

⁹³ Azmi and Artaningtyas, "Pengaruh Indikator Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2019."

⁹⁴ Hendrati Hapsari, "Pertumbuhan Ekonomi Jateng 2024 Lebih Lambat Dibandingkan Tahun Sebelumnya," Bahtera Jateng, 2025, <https://bahterajateng.com/pertumbuhan-ekonomi-jateng-2024-lebih-lambat-dibandingkan-tahun-sebelumnya>.

Kabupaten Purbalingga	17182.87	17731.44	18690.73	19533.86	20422.61
Kabupaten Banjarnegara	15045.88	15536.48	16359.11	17174.39	18051.84
Kabupaten Kebumen	19527.66	20253.06	21425.79	22638.9	13837.83
Kabupaten Purworejo	13138.29	13573.47	14300.56	15025.91	15745.98
Kabupaten Wonosobo	13566.18	14064.76	14770.5	15405.98	16109.38
Kabupaten Magelang	22865.15	23661.71	24953.18	26211.56	27538.21
Kabupaten Boyolali	22409.73	23447.37	24931.3	26333.28	27556.18
Kabupaten Klaten	27480.36	28531.11	30214.98	31938.33	33568.92
Kabupaten Sukoharjo	26616.5	27634.12	29185.35	30662.65	32187.41
Kabupaten Wonogiri	20563.14	21251.17	22448.63	23566.88	24728.69
Kabupaten Karanganyar	26103.23	27039.61	28624.99	30208.24	31883.1
Kabupaten Sragen	26367.26	27355.15	28929.81	30442.19	32084.08
Kabupaten Grobogan	19383.03	20115.53	21318.16	22381	23591.06
Kabupaten Blora	17483.89	18126.45	18609.49	19188.79	19776.06
Kabupaten Rembang	13409.63	13925.52	14698.84	15463.55	16248.58
Kabupaten Pati	30527.47	31559.08	33312.38	34984.79	26780.74
Kabupaten Kudus	70964.73	69872.18	71416.93	72980.27	75010.79
Kabupaten Jepara	20973.09	21944.23	23249.85	24451.04	25482.07
Kabupaten Demak	18374.56	18856.42	19846.43	20839.75	21894.6
Kabupaten Semarang	34688.04	35948.86	37857.92	39651.89	41529.4
Kabupaten Temanggung	14890.76	15387.93	16187.37	16998.53	17855.6
Kabupaten Kendal	30449.02	31632.28	33428.96	35287.7	37201.45
Kabupaten Batang	15031.08	15764.27	16704.99	17629.39	18693.22
Kabupaten Pekalongan	16047.51	16615.07	17463.42	18360.81	19283.06
Kabupaten Pemalang	18155.6	18933.19	19895.24	20719.54	21778.06
Kabupaten Tegal	24492.62	25401.91	26705.27	28022.85	29444.38
Kabupaten Brebes	32693.08	33533.33	35378.61	36702.96	38546.98
Kota Magelang	6312.05	6513.89	6889.45	7264.92	7668.79
Kota Surakarta	34815.97	36211.25	38475.99	40620.31	42897.32
Kota Salatiga	9503.71	9822	10365.44	10918.73	11505.05
Kota Semarang	137601.98	144704.57	152995.41	161848.30	170947.72
Kota Pekalongan	7337.83	7601.49	8039.47	8476.55	8928.8
Kota Tegal	10949.12	11290.27	11873.2	12468.61	13119.7

4.2.3 Upah Minimum Kabupaten/Kota

Upah minimum adalah standar upah bulanan terendah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja. Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan analisis kebutuhan hidup layak, serta mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah Upah minimum yang berlaku di wilayah kabupaten atau kota

tertentu. UMK ditetapkan oleh gubernur berdasarkan rekomendasi bupati/wali kota dan dewan pengupahan provinsi. UMK tidak boleh lebih rendah dari UMP.⁹⁵

Pada tahun 2024, Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah ditetapkan sebesar Rp2.036.947, mengalami kenaikan sebesar 4,02% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.958.169,69. Sementara itu, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Tengah bervariasi, dengan Kota Semarang sebagai yang tertinggi sebesar Rp3.243.969, dan Kabupaten Banjarnegara sebagai yang terendah sebesar Rp2.038.005. UMK ini berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, sedangkan bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun, upahnya berpedoman pada struktur dan skala upah yang ditetapkan oleh perusahaan.⁹⁶

Tabel 4.4 Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Kab/Kota	Upah Minimum Kab/Kota di Jawa Tengah (Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Cilacap	2158327	2228904	2230731	2383090	2479106
Kabupaten Banyumas	1900000	1970000	1983261	2118124	2195690
Kabupaten Purbalingga	1940800	1988000	1996814	2130981	2195571
Kabupaten Banjarnegara	1748000	1805000	1819835	1958170	2038005
Kabupaten Kebumen	1835000	1895000	1906781	2035890	2121947
Kabupaten Purworejo	1845000	1905400	1911850	2043902	2127641
Kabupaten Wonosobo	1859000	1920000	1931285	2076209	2159175
Kabupaten Magelang	2042200	2075000	2081807	2236777	2316890
Kabupaten Boyolali	1942500	2000000	2010299	2155712	2250327
Kabupaten Klaten	1947821.16	2011515	2015623	2152323	2244012
Kabupaten Sukoharjo	1938000	1986450	1998153	2138248	2215482
Kabupaten Wonogiri	1797000	1827000	1839043	1968448	2047500
Kabupaten Karanganyar	1989000	2054040	2064313	2207484	2288366
Kabupaten Sragen	1815914.85	1829500	1839429	1969569	2049000
Kabupaten Grobogan	1830000	1890000	1894032	2029569	2116516
Kabupaten Blora	1834000	1894000	1904196	2040080	2101813
Kabupaten Rembang	1802000	1861000	1874332	2015927	2099689
Kabupaten Pati	1891000	1953000	1968339	2107697	2190000

⁹⁵ Lavenia, Mandai, and Muhammad Yudhi Lutfi, “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (Produk Domestik Regional Bruto), Upah Minimum, Pengangguran, Jumlah Penduduk Dan Angka Melek Huruf Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 - 2021.”

⁹⁶ Nur Rohmi Aida and Rizal Setyo Nugroho, “Daftar UMK Jateng 2024,” Kompas.com, 2024, <https://www.kompas.com/tren/read/2024/01/01/193000265/daftar-umk-jateng-2024-tertinggi-rp-3-2-juta-terendah-rp-2-juta?>

Kabupaten Kudus	2218451.95	2290995	2293058	2439814	2516888
Kabupaten Jepara	2040000	2107000	2108413	2272627	2450915
Kabupaten Demak	2432000	2511526	2513005	2680421	2761236
Kabupaten Semarang	2229880.5	2302798	2311254	2480988	2582257
Kabupaten Temanggung	1825500	1885000	1887832	2027569	2109690
Kabupaten Kendal	2261775	2335735	2340312	2508300	2613573
Kabupaten Batang	2061700	2129117	2135535	2282026	2379702
Kabupaten Pekalongan	2018161.27	2084155	2094646	2247346	2334886
Kabupaten Pemalang	1865000	1926000	1940890	2081783	2156000
Kabupaten Tegal	1896000	1958000	1968446	2106238	2191161
Kabupaten Brebes	1807614	1866723	1885019	2018837	2103100
Kota Magelang	1853000	1914000	1935913	2066007	2142100
Kota Surakarta	1956200	2013810	2035720	2174169	2269070
Kota Salatiga	2034915.42	2101457	2128523	2284180	2378951
Kota Semarang	2715000	2810025	2835021	3060349	3243969
Kota Pekalongan	2072000	2139754	2156213	2305823	2389801
Kota Tegal	1925000	1982750	2005930	2145012	2231628

4.2.4 Penyaluran Dana ZIS

BAZNAS melakukan penyaluran dana ZIS untuk mendistribusikan dana yang terkumpul dari masyarakat kepada mustahik yang berhak. Penyaluran dana ZIS bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat ekonomi umat melalui pemberdayaan. Dana ZIS disalurkan melalui berbagai program yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi produktif, kemanusiaan, dan dakwah. Pada tahun 2024, BAZNAS di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kinerja yang signifikan dalam penghimpunan dan penyaluran dana ZIS. Total dana yang berhasil dihimpun mencapai Rp102,7 miliar, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp91,7 miliar.⁹⁷

Tabel 4.5 Penyaluran Dana ZIS BAZNAS Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Kab/Kota	Penyaluran Dana ZIS BAZNAS Kab/Kota di Jawa Tengah (Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Cilacap	12919453200	13623739978	2118176400	14470772689	20706188268
Kabupaten Banyumas	8269537527	13876897052	15417402081	18892244404	22207433030

⁹⁷ “Perolehan Zakat Baznas Capai Rp36,07 Miliar, Dukung Program Pemprov Jateng,” Jatengprov.id, 2024, <https://jatengprov.go.id/publik/perolehan-zakat-baznas-capai-rp3607-miliar-dukung-program-pemprov-jateng/>

Kabupaten Purbalingga	2751018297	3920255445	2456036764	3332762286	4521341928
Kabupaten Banjarnegara	12515074820	2456959146	9092109822	10570432936	7634174003
Kabupaten Kebumen	5652046644	13136975638	2164818355	5777120680	10677935110
Kabupaten Purworejo	3856605000	6468349760	3457308500	5851144279	7169552850
Kabupaten Wonosobo	2218787700	4099456059	2362885100	3243579700	4583232110
Kabupaten Magelang	2381911147	2467805289	1963417540	6313119619	5100575420
Kabupaten Boyolali	8144866553	4446520838	8616211126	8992729051	4234396259
Kabupaten Klaten	5669914332	7077842205	5105133072	5652612357	5866520668
Kabupaten Sukoharjo	3697189818	3724761037	4602615193	8725476512	8198382132
Kabupaten Wonogiri		218850457	322500000	822063495	356082684
Kabupaten Karanganyar	21720166078	20704190501	18779331304	14558789702	
Kabupaten Sragen	3385744026	8112432572	11816022518	12085141147	18369231630
Kabupaten Grobogan		4707030000	5865106833	5688201789	3532803000
Kabupaten Blora	3020321307	7341599912	8290860419	10743986314	11105151019
Kabupaten Rembang	3651771567	3573555966	1965597732	4516084456	2635474577
Kabupaten Pati	4024003500	6108759625	10852246171	7416033210	6610485600
Kabupaten Kudus	3112139481	2177867904	3858656028	4695679311	4225233317
Kabupaten Jepara	3030471641	2987799490	7634470390	6757504242	6483985509
Kabupaten Demak	4659168053		7225875252	9193300374	7398042330
Kabupaten Semarang	33287061383	4579489323	19983517386	2971383818	4851565323
Kabupaten Temanggung		8602798972	7801565513	9700185788	875953826
Kabupaten Kendal	9576488478	9560642758	11883871483	9810156887	12199318767
Kabupaten Batang	536158000		1391959629	791564250	1205929534
Kabupaten Pekalongan	4563142845	3610156977	2807538706	9533213291	3160151315
Kabupaten Pemalang	4974138342	10048861800	8460730700	8322274300	9311572100
Kabupaten Tegal	2512416122	4101835352	4922106105	6022637455	5850438588
Kabupaten Brebes	2996844099	4552645742	5182852653	6197681727	7455965314
Kota Magelang	1034511663	2542556647	3392532086	5296860029	5707050912
Kota Surakarta	1733019423	1938375824	1649396456	6380332028	7754695660
Kota Salatiga	2389488742	1119658065	1299557925	1588294238	2440476453
Kota Semarang	7916648630	8967096729	16351594666	12234127997	12073369415
Kota Pekalongan	2859969895	2015927100	3468213046	3374602828	2141864330
Kota Tegal		2016545722	13284974228	2117291548	2554939054

4.3 Pengujian dan Hasil Analisis Data

4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif pada Eviews 12 dilakukan untuk mendeskripsikan data secara statistik. Berdasarkan statistik deskriptif yang dihasilkan dari pengolahan data menunjukkan karakter sampel yang digunakan dalam penelitian, seperti nilai rata-rata, nilai tengah (median), nilai maksimum, nilai minimum, dan nilai standar deviasi. Paparan deskriptif dalam penelitian ini mencakup variabel dependen yaitu Kemiskinan dan variabel independen yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Analisis statistik deskriptif penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.6 Analisis Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3	X4
Mean	10.71244	5.409762	30437.10	2115245.	6.62E+09
Median	10.59500	5.050000	22752.03	2069004.	5.14E+09
Maximum	17.83000	9.970000	170947.7	3243969.	3.33E+10
Minimum	4.030000	1.760000	6312.050	1748000.	2.19E+08
Std. Dev.	3.413416	1.919333	27837.67	242178.4	5.15E+09
Skewness	0.190905	0.557985	3.106860	1.585466	1.750241
Kurtosis	2.241373	2.805944	13.44019	6.659865	7.379803
Jarque-Bera	5.049051	8.981317	1033.255	164.1459	220.0523
Probability	0.080096	0.011213	0.000000	0.000000	0.000000
Sum	1799.690	908.8400	5113433.	3.55E+08	1.11E+12
Sum Sq. Dev.	1945.785	615.2010	1.29E+11	9.79E+12	4.43E+21
Observations	168	168	168	168	168

Sumber: Output Eviews 12, Data diolah 2025

Tabel 4.6 menunjukkan statistik deskriptif jika jumlah sampel yang diteliti sebanyak 168 sampel data yang berasal dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah selama lima tahun, mulai tahun 2020 sampai tahun 2024. Berikut penjelasan mengenai Tabel 4.6 berdasarkan masing-masing kolom tabel:

1. Variabel dependen Kemiskinan (Y) berjumlah 168 sampel. Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa pada periode 2020-2024 rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 10,71244 persen, nilai tengah sebesar 10,59500 persen, nilai maksimum sebesar 17,83000 persen, nilai minimum sebesar 4,030000 persen, dan nilai standar deviasi sebesar 3,413416 persen.

2. Variabel independen Tingkat Pengangguran Terbuka (X1) berjumlah 168 sampel. Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa pada periode 2020-2024 rata-rata tingkat pengangguran sebesar 5,409762 persen, nilai tengah sebesar 5,050000 persen, nilai maksimum sebesar 9,970000 persen, nilai minimum sebesar 1,760000 persen, dan nilai standar deviasi sebesar 1,919333 persen.
3. Variabel independen Produk Domestik Regional Bruto (X2) berjumlah 168 sampel. Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa pada periode 2020-2024 rata-rata Produk Domestik Regional Bruto sebesar 30437,10 (dalam miliar), nilai tengah sebesar 22752,03 (dalam miliar), nilai maksimum sebesar 170947,7 (dalam miliar), nilai minimum sebesar 6312,050 (dalam miliar), dan nilai standar deviasi sebesar 27837,67 (dalam miliar).
4. Variabel independen Upah Minimum Kabupaten/Kota (X3) berjumlah 168 sampel. Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa pada periode 2020-2024 rata-rata upah minimum sebesar Rp2115245, nilai tengah sebesar Rp2069004, nilai maksimum sebesar Rp3243969, nilai minimum sebesar Rp1748000, dan nilai standar deviasi sebesar Rp242178,4.
5. Variabel independen Penyaluran Dana ZIS (X4) berjumlah 168 sampel. Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa pada periode 2020-2024 rata-rata penyaluran dana ZIS sebesar Rp6616871465,2, nilai tengah sebesar Rp5143992862,5, nilai maksimum sebesar Rp33287061383, nilai minimum sebesar Rp218850457, dan nilai standar deviasi sebesar Rp5148523418,6.

4.3.2 Estimasi Model Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel dapat dilakukan dengan tiga model, yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. Setiap model memiliki karakteristiknya masing-masing, beserta kelebihan dan keterbatasannya. Pemilihan model yang paling tepat sangat bergantung pada asumsi yang diterapkan oleh peneliti serta kesesuaian model dengan karakteristik statistik data yang tersedia. Oleh karena itu, langkah pertama dalam analisis data panel adalah menentukan model yang paling tepat di antara ketiga model alternatif tersebut. Data panel yang telah terkumpul kemudian akan diestimasi dengan menggunakan model *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. Kemudian akan dipilih model yang paling sesuai dengan data dan tujuan penelitian

berdasarkan hasil estimasi yang diperoleh. Berikut hasil estimasi dengan ketiga model tersebut:

1. *Common Effect Model* (CEM)

Tabel 4.7 Hasil Regresi Data Panel *Common Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	281.1068	32.42693	8.668930	0.0000
X1	0.011687	0.115437	0.101238	0.9195
LOG(X2)	0.566201	0.425570	1.330453	0.1852
LOG(X3)	-20.14306	2.338917	-8.612134	0.0000
LOG(X4)	0.765857	0.277789	2.756976	0.0065
Root MSE	2.755217	R-squared		0.344570
Mean dependent var	10.71244	Adjusted R-squared		0.328486
S.D. dependent var	3.413416	S.E. of regression		2.797156
Akaike info criterion	4.924393	Sum squared resid		1275.325
Schwarz criterion	5.017369	Log likelihood		-408.6491
Hannan-Quinn criter.	4.962127	F-statistic		21.42295
Durbin-Watson stat	0.131096	Prob(F-statistic)		0.000000

Sumber: Output Eviews 12, Data diolah 2025

Tabel 4.7 menjelaskan regresi data panel dengan menggunakan *Common Effect Model* menghasilkan konstanta sebesar 281,1068 dengan probabilitas 0,0000. Kemudian didapat nilai *adjusted R²* sebesar 0,328486 yang berarti Kemiskinan dipengaruhi oleh Tingkat Pengangguran Terbuka, Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Penyaluran Dana ZIS sebesar 32% dan sisanya 68% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

2. *Fixed Effect Model* (FEM)

Tabel 4.8 Hasil Regresi Data Panel Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	108.7696	11.68036	9.312179	0.0000
X1	0.000707	0.047462	0.014906	0.9881
LOG(X2)	-0.884245	0.644359	-1.372287	0.1724
LOG(X3)	-6.097680	0.968615	-6.295257	0.0000
LOG(X4)	-0.016389	0.066695	-0.245732	0.8063
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Root MSE	0.333271	R-squared	0.990410	
Mean dependent var	10.71244	Adjusted R-squared	0.987585	
S.D. dependent var	3.413416	S.E. of regression	0.380328	
Akaike info criterion	1.104566	Sum squared resid	18.65973	
Schwarz criterion	1.829772	Log likelihood	-53.78358	
Hannan-Quinn criter.	1.398890	F-statistic	350.5991	
Durbin-Watson stat	2.610003	Prob(F-statistic)	0.000000	

Sumber: Output Eviews 12, Data diolah 2025

Tabel 4.8 menjelaskan regresi data panel dengan menggunakan *Fixed Effect Model* menghasilkan konstanta sebesar 108,7696 dengan probabilitas 0,0000. Kemudian didapat nilai *adjusted R*² sebesar 0,987585 yang berarti Kemiskinan dipengaruhi oleh Tingkat Pengangguran Terbuka, Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Penyaluran Dana ZIS sebesar 98% dan sisanya 2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

3. *Random Effect Model (REM)*

Tabel 4.9 Hasil Regresi Data Panel Random Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	113.0043	11.47999	9.843587	0.0000
X1	0.000157	0.045696	0.003441	0.9973
LOG(X2)	-0.479153	0.506661	-0.945709	0.3457
LOG(X3)	-6.691938	0.910261	-7.351669	0.0000
LOG(X4)	-0.002526	0.066299	-0.038094	0.9697
Effects Specification				
		S.D.	Rho	
Cross-section random		2.816184	0.9821	
Idiosyncratic random		0.380328	0.0179	
Weighted Statistics				
Root MSE	0.382318	R-squared	0.502222	
Mean dependent var	0.657860	Adjusted R-squared	0.490006	
S.D. dependent var	0.543449	S.E. of regression	0.388137	
Sum squared resid	24.55604	F-statistic	41.11373	
Durbin-Watson stat	2.034191	Prob(F-statistic)	0.000000	
Unweighted Statistics				
R-squared	0.180083	Mean dependent var	10.71244	
Sum squared resid	1595.381	Durbin-Watson stat	0.031310	

Sumber: Output Eviews 12, Data diolah 2025

Tabel 4.9 menjelaskan regresi data panel dengan menggunakan *Random Effect Model* menghasilkan konstanta sebesar 113,0043 dengan probabilitas 0,0000. Kemudian didapat nilai *adjusted R²* sebesar 0,490006 yang berarti Kemiskinan dipengaruhi oleh Tingkat Pengangguran Terbuka, Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Penyaluran Dana ZIS sebesar 49% dan sisanya 51% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

4.3.3 Penentuan Model Regresi Data Panel

Guna menentukan model estimasi yang tepat dalam menganalisis regresi data panel terdapat tiga macam pengujian, yaitu Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji *Lagrange Multiplier*.

1. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan model estimasi terbaik antara *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model*. Dalam pengujian ini muncul hipotesis:

H_0 : Diterima, model yang terpilih *Common Effect Model*, pengujian berhenti di sini.

H_1 : Ditolak, model yang terpilih *Fixed Effect Model*, pengujian dilanjutkan dengan Uji Hausman.

Apabila nilai probabilitas Cross-section Chi-square $> 0,05$ maka H_0 diterima, model yang dipilih yaitu *Common Effect Model* dan pengujian berhenti sampai di sini. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas Cross-section Chi-square $< 0,05$ maka H_1 diterima, model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model* dan pengujian dilanjutkan ke Uji Hausman. Berikut hasil Uji Chow:

Tabel 4.10 Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	255.520192	(34,129)	0.0000
Cross-section Chi-square	709.730952	34	0.0000

Sumber: Output Eviews 12, Data diolah 2025

Berdasarkan output Uji Chow pada Tabel 4.10 diketahui nilai probabilitas Cross-section Chi-square adalah 0,0000 yang berarti $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dalam pengujian ini disimpulkan bahwa model yang terpilih adalah *Fixed effect Model*, dan pengujian dilanjutkan ke Uji Hausman.

2. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan model estimasi terbaik antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Dalam pengujian ini muncul hipotesis:

H_0 : Diterima, model yang terpilih *Fixed effect Model*, pengujian berhenti di sini.

H_1 : Ditolak, model yang terpilih *Random Effect Model*, pengujian dilanjutkan dengan Uji *Lagrange Multiplier*.

Apabila nilai probabilitas Cross-section Random $< 0,05$ maka H_0 diterima, model yang terpilih yaitu *Fixed Effect Model* dan pengujian berhenti sampai di sini. Sebaliknya apabila nilai probabilitas Cross-section Random $> 0,05$ maka H_1 diterima, model yang terpilih yaitu *Random Effect Model* dan pengujian dilanjutkan ke Uji *Lagrange Multiplier*. Berikut hasil Uji Hausman:

Tabel 4.11 Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	10.491020	4	0.0329

Sumber: Output Eviews 12, Data diolah 2025

Berdasarkan output Uji Hausman pada Tabel 4.11 diketahui nilai probabilitas Cross-section Random adalah 0,0329 yang berarti $< 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dalam pengujian ini disimpulkan bahwa model yang terpilih adalah *Fixed effect Model*, dan pengujian berhenti sampai di sini.

3. Uji Lagrange Multiplier

Uji *Lagrange Multiplier* digunakan untuk menentukan model terbaik antara *Random Effect Model* dan *Common Effect Model*. Namun pada Uji Chow dan Uji Hausman telah diperoleh model *Fixed Effect Model*. Maka dari itu tidak perlu dilakukan Uji *Lagrange Multiplier*.

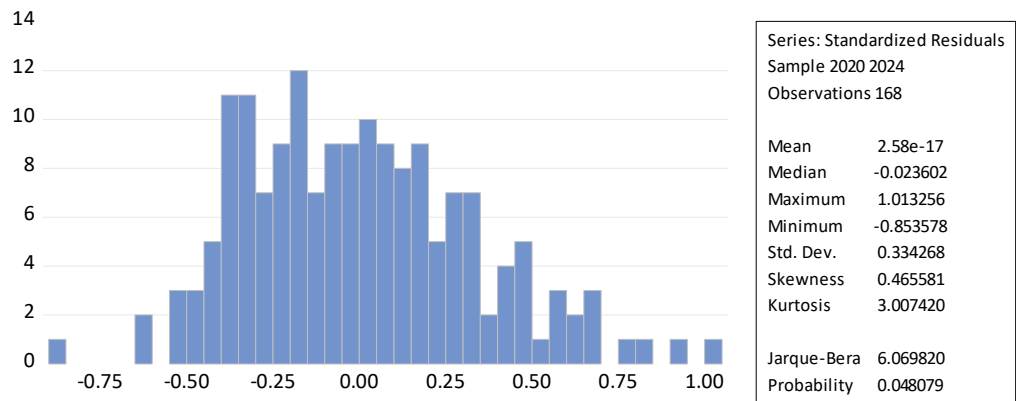
4.3.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan setelah menentukan model yang tepat untuk penelitian dalam regresi data panel. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model. Ada dua uji asumsi klasik yang dapat dilakukan pada regresi data panel, yaitu Uji Normalitas dan Uji Multikolinieritas.

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk menilai apakah sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji dilakukan dengan *Jarque-Bera (JB) Test*. Apabila nilai probabilitas *Jarque-Bera* lebih $> 0,05$ berarti data terdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai probabilitas *Jarque-Bera* $< 0,05$ maka berarti data tidak terdistribusi normal.

Grafik 4.2 Uji Normalitas



Sumber: Output Eviews 12, Data diolah 2025

Grafik 4.2 menunjukkan output Uji Normalitas pada regresi data panel dengan *Fixed Effect Model*. Nilai probabilitas *Jarque-Bera* sebesar $0,048079 < 0,05$ yang berarti data tidak terdistribusi normal. Dengan jumlah sampel yang cukup besar (lebih dari 30 atau 40), pelanggaran asumsi normalitas umumnya tidak menjadi masalah serius, artinya prosedur parametrik masih dapat digunakan meskipun data tidak terdistribusi normal. Jika sampel terdiri dari ratusan observasi, maka distribusi data dapat diabaikan.⁹⁸

2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan korelasi antar variabel independen. Untuk menguji multikolinearitas dapat melihat pada matriks korelasi dengan meregresi semua variabel independen, jika terdapat koefisien korelasi antar variabel lebih dari 0,8 maka terdapat masalah multikolinearitas.

Tabel 4.12 Uji Multikolinearitas

	X1	LOG(X2)	LOG(X3)	LOG(X4)
X1	1.000000	0.195535	0.032939	0.111702
LOG(X2)	0.195535	1.000000	0.498434	0.379896
LOG(X3)	0.032939	0.498434	1.000000	0.214087
LOG(X4)	0.111702	0.379896	0.214087	1.000000

Sumber: Output Eviews 12, Data diolah 2025

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas dalam model regresi karena nilai koefisien korelasi antar variabel independen $< 0,8$.

⁹⁸ Asghar Ghasemi and Saleh Zahediasl, "Normality Tests for Statistical Analysis: A Guide for Non-Statisticians," *International Journal of Endocrinology and Metabolism* 10, no. 2 (2012): 486, <https://doi.org/10.5812/ijem.3505>.

4.3.5 Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.13 Regresi Data Panel Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	108.7696	11.68036	9.312179	0.0000
X1	0.000707	0.047462	0.014906	0.9881
LOG(X2)	-0.884245	0.644359	-1.372287	0.1724
LOG(X3)	-6.097680	0.968615	-6.295257	0.0000
LOG(X4)	-0.016389	0.066695	-0.245732	0.8063
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Root MSE	0.333271	R-squared	0.990410	
Mean dependent var	10.71244	Adjusted R-squared	0.987585	
S.D. dependent var	3.413416	S.E. of regression	0.380328	
Akaike info criterion	1.104566	Sum squared resid	18.65973	
Schwarz criterion	1.829772	Log likelihood	-53.78358	
Hannan-Quinn criter.	1.398890	F-statistic	350.5991	
Durbin-Watson stat	2.610003	Prob(F-statistic)	0.000000	

Sumber: Output Eviews 12, Data diolah 2025

Tabel 4.13 menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,987585 atau 98,75%. Angka tersebut berarti bahwa variabel independen yang terdiri dari Tingkat Pengangguran Terbuka, Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Dan Penyaluran Dana ZIS mampu menjelaskan variabel dependen yaitu Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sebesar 98,75%, dan sisanya 1,25% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Berdasarkan output regresi data panel dengan *Fixed Effect Model*, maka ditemukan hasil dari perhitungan Tingkat Pengangguran Terbuka, Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Penyaluran Dana ZIS terhadap Kemiskinan yang tersusun dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y_{it} = 108,7696 + 0,000707X_{1it} - 0,884245X_{2it} - 6,097680X_{3it} - 0,016389X_{4it} + e$$

Berikut interpretasi persamaan regresi data panel di atas:

b. Konstanta (a)

Nilai konstanta dalam regresi ini adalah sebesar 108,7696 yang menunjukkan nilai positif, artinya Jika Tingkat Pengangguran Terbuka,

Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Penyaluran Dana ZIS bernilai 0, maka tingkat kemiskinan sebesar 108,7696%.

c. Tingkat Pengangguran Terbuka (X1)

Koefisien regresi pada variabel Pengangguran adalah sebesar 0,000707 yang berarti setiap kenaikan pengangguran sebesar 1% maka akan meningkatkan kemiskinan sebesar 0,000707% dengan asumsi bahwa variabel indepeden yang lain dalam model regresi dianggap konstan.

d. Produk Domestik Regional Bruto (X2)

Koefisien regresi pada variabel Produk Domestik Regional Bruto adalah sebesar -0,884245 yang berarti setiap kenaikan Produk Domestik Regional Bruto sebesar 1% maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,884245% dengan asumsi bahwa variabel indepeden yang lain dalam model regresi dianggap konstan.

e. Upah Minimum Kabupaten/Kota (X3)

Koefisien regresi pada variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah sebesar -6,097680 yang berarti setiap kenaikan upah minimum sebesar 1% maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 6,097680% dengan asumsi bahwa variabel indepeden yang lain dalam model regresi dianggap konstan.

f. Penyaluran Dana ZIS (X4)

Koefisien regresi pada variabel Penyaluran Dana ZIS adalah sebesar -0,016389 yang berarti setiap kenaikan penyaluran dana ZIS sebesar 1% maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,016389% dengan asumsi bahwa variabel indepeden yang lain dalam model regresi dianggap konstan.

2. Uji Parsial (Uji t)

Tabel 4.14 Hasil Uji Parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	108.7696	11.68036	9.312179	0.0000
X1	0.000707	0.047462	0.014906	0.9881
LOG(X2)	-0.884245	0.644359	-1.372287	0.1724
LOG(X3)	-6.097680	0.968615	-6.295257	0.0000
LOG(X4)	-0.016389	0.066695	-0.245732	0.8063

Sumber: Output Eviews 12, Data diolah 2025

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.15, maka disimpulkan uji t masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

- a. Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (X1) memiliki nilai koefisien 0,000707 dan nilai probabilitas $0,9881 > 0,05$ yang berarti tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.
- b. Variabel Produk Domestik Regional Bruto (X2) memiliki nilai koefisien -0,884245 dan nilai probabilitas $0,1724 > 0,05$ yang berarti Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.
- c. Variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (X3) memiliki nilai koefisien -6,097680 dan nilai probabilitas $0,0000 < 0,05$ yang berarti upah minimum kabupaten/kota berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.
- d. Variabel Penyaluran Dana ZIS (X4) memiliki nilai koefisien -0,16389 dan nilai probabilitas $0,8063 > 0,05$ yang berarti penyaluran dana ZIS berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.

3. Uji Simultan (Uji F)

Tabel 4.15 Hasil Uji Simultan

Cross-section fixed (dummy variables)			
Root MSE	0.333271	R-squared	0.990410
Mean dependent var	10.71244	Adjusted R-squared	0.987585
S.D. dependent var	3.413416	S.E. of regression	0.380328
Akaike info criterion	1.104566	Sum squared resid	18.65973
Schwarz criterion	1.829772	Log likelihood	-53.78358
Hannan-Quinn criter.	1.398890	F-statistic	350.5991
Durbin-Watson stat	2.610003	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Output Eviews 12, Data diolah 2025

Berdasarkan Tabel 4.16 diketahui nilai probabilitas F-Statistik adalah sebesar $0,0000 < 0,05$. Artinya variabel independen yang terdiri dari Tingkat Pengangguran Terbuka, Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Penyaluran Dana ZIS secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Kemiskinan di Jawa Tengah.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah

Hasil pengujian regresi data panel menunjukkan bahwa variabel independen Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki nilai koefisien 0,000707 dan nilai probabilitas $0,9881 > 0,05$ yang berarti Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah.

Tingkat pengangguran tidak selalu berpengaruh langsung terhadap kemiskinan. Hal ini disebabkan karena tidak semua individu yang menganggur terutama pengangguran terbuka, termasuk dalam golongan miskin. Sebagian dari mereka masih mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, baik karena memiliki sumber pendapatan lain, mendapat sokongan dari keluarga, maupun menjadi tenaga kerja di sektor informal yang tidak tetap. Selain itu, beberapa di antaranya juga termasuk dalam kategori setengah menganggur, yaitu mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu, tetapi tidak sepenuhnya tidak bekerja.⁹⁹ Meskipun mereka tercatat sebagai pengangguran atau setengah pengangguran, tidak semuanya mengalami kemiskinan absolut.

Fenomena ini menunjukkan bahwa hubungan antara pengangguran dan kemiskinan bersifat kompleks dan tidak selalu linier. Masalah kemiskinan tidak selalu berhubungan dengan masalah ketenagakerjaan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Ilmi¹⁰⁰ dan penelitian Putri¹⁰¹ yang menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan. Dengan demikian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka tidak secara langsung dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

4.4.2 Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah

Hasil pengujian regresi data panel menunjukkan bahwa variabel independen Produk Domestik Regional Bruto memiliki nilai koefisien -0,884245 dan nilai probabilitas $0,1724 > 0,05$ yang berarti Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah.

⁹⁹ Putri and Putri, "Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Indonesia."

¹⁰⁰ Ilmi, "Pengaruh PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, IPM Dan TPT Terhadap Kemiskinan Di Lima Provinsi Dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi Di Indonesia Periode 2010-2019."

¹⁰¹ Hasballah, "Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Provinsi Aceh Di Kabupaten/Kota."

Meskipun terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi, hal ini tidak secara signifikan menurunkan jumlah penduduk miskin pada periode yang diteliti. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum cukup untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin sehingga dapat melewati garis kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh adanya ketimpangan dalam distribusi hasil pembangunan yang belum tersebar secara merata ke seluruh wilayah, sehingga manfaat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi hanya dirasakan oleh kelompok atau wilayah tertentu. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi menjadi kurang berdampak positif bagi masyarakat miskin, dan belum sepenuhnya memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Aleffin dan Imaningsing¹⁰², dan penelitian Prasetyoningrum dan Sukmawati¹⁰³ yang menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Dengan demikian hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh tidak langsung pada Produk Domestik Regional Bruto dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

4.4.3 Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah

Hasil pengujian regresi data panel menunjukkan bahwa variabel independen Upah Minimum Kabupaten/Kota memiliki nilai koefisien -6,097680 dan nilai probabilitas $0,0000 < 0,05$ yang berarti Upah Minimum Kabupaten/Kota berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah.

Kenaikan upah minimum memiliki dampak yang signifikan terhadap meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi pekerja berpenghasilan rendah. Kenaikan upah secara langsung berkontribusi pada peningkatan pendapatan individu, yang memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan dengan lebih baik. Selain itu, jika terdapat sisa pendapatan setelah kebutuhan dasar terpenuhi, masyarakat juga memiliki kesempatan untuk mengalokasikan dana untuk kebutuhan sekunder atau kebutuhan non-dasar, seperti pendidikan dan tabungan.

¹⁰² Aleffin and Imaningsih, “Pengaruh Upah Minimum, TPT, Dependency Ratio Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur.”

¹⁰³ Prasetyoningrum and Sukmawati, “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia.”

Kebijakan kenaikan upah minimum tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan daya beli masyarakat, tetapi juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi domestik dan meminimalisir ketimpangan ekonomi.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Sari¹⁰⁴ dan penelitian Lavenia, dkk¹⁰⁵ yang juga menunjukkan upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dengan demikian hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh yang signifikan pada upah minimum dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

4.4.4 Pengaruh Penyaluran Dana ZIS terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah

Hasil pengujian regresi data panel menunjukkan bahwa variabel independen Penyaluran Dana ZIS memiliki nilai koefisien -0,016389 dan nilai probabilitas $0,8063 > 0,05$ yang berarti Penyaluran Dana ZIS berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah.

Penyaluran dana ZIS memiliki potensi yang besar dalam memberdayakan ekonomi masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Melalui penyaluran ZIS yang tepat sasaran, kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi lemah dapat memperoleh akses bantuan finansial, modal usaha, dan pelatihan keterampilan, sehingga mereka terdorong untuk lebih produktif dan mandiri secara ekonomi.¹⁰⁶ Namun, hasil pengujian empiris dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran dana ZIS belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti belum optimalnya pendistribusian dana, terbatasnya cakupan penerima manfaat, jumlah dana yang disalurkan lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan riil masyarakat, atau belum terintegrasinya program-program ZIS dengan strategi pemberdayaan ekonomi jangka panjang.

¹⁰⁴ Sari, "Pengaruh Upah Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah."

¹⁰⁵ Lavenia, Mandai, and Muhammad Yudhi Lutfi, "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (Produk Domestik Regional Bruto), Upah Minimum, Pengangguran, Jumlah Penduduk Dan Angka Melek Huruf Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 - 2021."

¹⁰⁶ Hany and Islamiyati, "Pengaruh ZIS Dan Faktor Makro Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia."

Temuan ini sejalan dengan penelitian Munandar, dkk¹⁰⁷ dan penelitian Hany dan Islamiyati¹⁰⁸ yang menunjukkan bahwa penyaluran dana ZIS berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Dengan demikian hasil penelitian ini adalah penyaluran dana ZIS tidak secara langsung dapat mengurangi kemiskinan di Jawa Tengah. Meskipun secara teoritis ZIS memiliki potensi yang besar dalam mengurangi kemiskinn, namun efektivitasnya sangat bergantung pda implementasi, pengelolaan, dan kebijakan yang menyertainya.

¹⁰⁷ Munandar Eris, Amirullah Mulia, and Nurochani Nila, “Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan.”

¹⁰⁸ Safitri, “Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS),Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt), Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Tingkat Kemiskinan.”

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian regresi data panel dengan model *fixed effect* pada pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Penyaluran Dana ZIS terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2020-2024, di dapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2020-2024. Ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar 0,000707 dan nilai probabilitas sebesar $0,9881 > 0,05$. Artinya jika Tingkat Pengangguran Terbuka meningkat, maka tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah juga akan meningkat.
2. Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2020-2024. Ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar -0,884245 dan nilai probabilitas sebesar $0,1724 > 0,05$. Artinya jika Produk Domestik Regional Bruto naik, maka tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah akan menurun.
3. Upah Minimum Kabupaten/Kota berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2020-2024. Ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar -6,097680 dan nilai probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$. Artinya jika Upah Minimum Kabupaten/Kota naik, maka tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah akan menurun.
4. Penyaluran Dana ZIS berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2020-2024. Ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar -0,016389 dan nilai probabilitas sebesar $0,8063 > 0,05$. Artinya jika Penyaluran Dana ZIS naik, maka tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah akan menurun.

5.2 Saran

Dalam penelitian ini, penulis menyadari bahwa terdapat keterbatasan cakupan dan pembahasan, sehingga beberapa aspek relevan mungkin belum sepenuhnya terungkap. Oleh karena itu, di antara saran-saran yang memungkinkan untuk dilakukan pada penelitian di masa depan adalah sebagai berikut:

1. Menambah variabel-variabel lain di luar penelitian ini yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan sebagai variabel yang diteliti.

2. Menambah periode tahun pengamatan supaya rentang waktu penelitian lebih panjang dan terbaru.

Adapun saran untuk pemerintah kiranya penelitian ini dapat menjadi tolak ukur dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan di provinsi Jawa Tengah;

1. Dengan memerhatikan hasil penelitian ini, Produk Domestik Regional Bruto belum signifikan dalam menurunkan kemiskinan di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu pemerintah perlu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan. Serta meningkatkan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto terhadap sektor-sektor penyerap tenaga kerja seperti sektor pertanian dan ekonomi kreatif, melalui pemberian insentif, subsidi input, pelatihan teknologi tepat guna, serta penguatan koperasi dan UMKM.
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran dana ZIS belum signifikan dalam menurunkan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dikarenakan belum optimalnya pendistribusian dana serta belum terintegritasnya program-program ZIS yang bersifat pemberdayaan. Oleh karena itu peneliti menyarankan agar pemerintah dapat lebih mengoptimalkan penyaluran ZIS dengan lebih fokus pada penerima manfaat yang produktif dan rentan. Serta menyalurkan dana ZIS bukan hanya pada konsumsi tetapi juga untuk program-program pemberdayaan ekonomi, seperti modal usaha mikro, pelatihan keterampilan, bantuan alat produksi, dan pendampingan usaha. Hal ini akan mendorong kemandirian ekonomi mustahik dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aida, Nur Rohmi, and Rizal Setyo Nugroho. "Daftar UMK Jateng 2024." Kompas.com, 2024. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/01/01/193000265/daftar-umk-jateng-2024-tertinggi-rp-3-2-juta-terendah-rp-2-juta?>
- "Al-Hasyr Ayat 7." *NU Online*, n.d. <https://quran.nu.or.id/al-hasyr/7>.
- Aldi, Muhammad Jihan. "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Kemiskinan Di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2017-2022 Dengan Pengangguran Terbuka Sebagai Variabel Moderating." Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022.
- Aleffin, Girycki Sana, and Niniek Imaningsih. "Pengaruh Upah Minimum, TPT, Dependency Ratio Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur." *Jambura Economic Education Journal* 6, no. 2 (2024): 419–32. <https://doi.org/10.37479/jeej.v6i2.24860>.
- Alliyah, Erina Mega, Prasetyo Ariwibowo, and Mima Nizma. "Pengaruh Upah Minimum Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Sumatera Utara Periode 2005-2020." *Sosio E-Kons* 16, no. 3 (2024): 279–87.
- Anisilka. "TARAF SIGNIFIKANSI A: MAKNA & PENGGUNAAN." Statistikapenelitian.com, 2018. [https://statistikapenelitian.com/taraf-signififikasi-a-makna-penggunaan/#:~:text=CONTOH%3A Sebagai contoh misalkan kita menggunakan tingkat kesalahan,benar dalam mengambil keputusan sedikitnya 95%25 %28tingkat kepercayaan%29.](https://statistikapenelitian.com/taraf-signififikasi-a-makna-penggunaan/#:~:text=CONTOH%3A%20Sebagai%20contoh%20misalkan%20kita%20menggunakan%20tingkat%20kesalahan,benar%20dalam%20mengambil%20keputusan%20sedikitnya%2095%25%20%28tingkat%20kepercayaan%29.)
- Asrulla, Risnita, M. S Jailani, and Firdaus Jeka. "Populasi Dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) Dalam Pendekatan Praktis." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 26320–32.
- "At-Taubah Ayat 105." *NU Online*, n.d. <https://quran.nu.or.id/at-taubah/105>.
- "At-Thalaq Ayat 6." *NU Online*, n.d. <https://quran.nu.or.id/at-thalaq/6>.
- "Az-Zariyat Ayat 19." *NU Online*, n.d. <https://quran.nu.or.id/adz-dzariyat/19>.
- Azmi, Nanda Aufa, and Dwi Artaningtyas. "Pengaruh Indokator Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2019" 14, no. 1 (2019): 51–68.
- Balaka, Muh Yani. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Edited by Iskandar Ahmaddien. 1st ed. Bandung: Widina Bhakti Persada bandung, 2022.
- BAZNAS. "Penyesuaian Nilai Had Kifayah 2023." Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS DSKL Nasional BAZNAS RI, 2023.
- BPS. "Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) Menurut Daerah, 2024." Badan Pusat Statistik, 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTgyIzI=/garis-kemiskinan--rupiah-kapita-bulan--menurut-daerah.html>.
- . "Kemiskinan Provinsi Di Jawa Tengah Maret 2024." BPS Kabupaten Kendal, 2024. <https://kendalkab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/25/330/provincial-poverty-in-central-java-march-2024.html>.
- . "Pertumbuhan Ekonomi." BPS, n.d.
- Endrawati, Darma, Syamsu Nujum, and Abbas Selong. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Rasio Gini Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Indonesia 2017-2022." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 20144–51.
- Ferezegia, Debrina Vita. "Analisis Tingkat Kemiskinan Di Indonesia." *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* 1, no. 1 (2018): 1–6. <http://journal.vokasi.ui.ac.id/index.php/jsht/article/download/6/1>.
- Furqon, Ahmad. *Manajemen Zakat*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- "Garis Kemiskinan." DPR RI, n.d. <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/kamus/file/kamus-20.pdf>.
- Ghasemi, Asghar, and Saleh Zahediasl. "Normality Tests for Statistical Analysis: A Guide for

- Non-Statisticians.” *International Journal of Endocrinology and Metabolism* 10, no. 2 (2012): 486–89. <https://doi.org/10.5812/ijem.3505>.
- Hadi, Bambang Sutopo. “BPS: Pengangguran Di Jateng Terus Turun Lima Tahun Terakhir.” *Antara*, 2024. <https://www.antaranews.com/berita/4444689/bps-pengangguran-di-jateng-terus-turun-lima-tahun-terakhir?>
- Hany, Ira Humaira, and Dina Islamiyati. “Pengaruh ZIS Dan Faktor Makro Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi* 25, no. 1 (2020): 118–31. <https://doi.org/10.24912/je.v25i1.631>.
- Hapsari, Hendrati. “Pertumbuhan Ekonomi Jateng 2024 Lebih Lambat Dibandingkan Tahun Sebelumnya.” *Bahtera Jateng*, 2025. <https://bahterajateng.com/pertumbuhan-ekonomi-jateng-2024-lebih-lambat-dibandingkan-tahun-sebelumnya>.
- Hasan, Zulfikar. “The Effect of Economic Growth and Human Development Index on Poverty in Indonesia.” *Journal of Economics and Sustainability* 3, no. No.1 (2021): 42–53. <https://doi.org/10.32890/jes2021.3.1.5>.
- Hasballah, Ibrahim. “Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Provinsi Aceh Di Kabupaten/Kota.” *Jurnal Al-Fikrah* 10, no. 1 (2021): 38–48. https://www.researchgate.net/publication/362260656_Pengaruh_Tingkat_Pengangguran_Terbuka_Terhadap_Kemiskinan_Provinsi_Aceh_Di_KabupatenKota.
- Hasibuan, Reni Ria Armayani, Anggi Kartika, Firdha Aigha Suwito, and Lismaini Agustin. “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Kemiskinan Kota Medan.” *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4, no. 3 (2022): 683–93. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i3.887>.
- Ilmi, Maftuh Bahrul. “Pengaruh PDRB, IPM Dan TPT Terhadap Kemiskinan Di Lima Provinsi Dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi Di Indonesia Periode 2010-2019.” *Diss. IAIN Ponorogo*, 2021, 1–97.
- Irza, Jimi. “Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Upah Di Bawah UMR.” *niversitas Negeri Raden Intan Lampung*, 2019.
- Izzaty, and Rafika Sari. “Kebijakan Penetapan Upah Minimum Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 4 (2013): 131–45. <http://wartaekonomi.co.id/berita7450/perburuhan-menjaga-keseimbangan-upahdan-produktivitas-bagian-ii.html>, diakses 20 Maret 2013.
- Jatengprov.id. “Perolehan Zakat Baznas Capai Rp36,07 Miliar, Dukung Program Pemprov Jateng,” 2024. <https://jatengprov.go.id/publik/perolehan-zakat-baznas-capai-rp3607-miliar-dukung-program-pemprov-jateng/>
- Kadji, Yulianto. “Kemiskinan Dan Konsep Teoritisnya.” *Guru Besar Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UNG Abstrak*, 2012. <https://doi.org/10.1177/0969733007082110>.
- Kartasasmita, Ginanjar. *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. Jakarta: Pustaka Cidessindo, 1996.
- Khairunnida, Hanna, and Yuni Prohadi Utomo. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi PDRB Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2010-2023.” *Menara Ekonomi X*, no. 1 (2024): 31–40.
- Kuncoro, Mudjarat. *Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010.
- Lavenia, Lulut, Syafri Mandai, and Muhammad Yudhi Lutfi. “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb), Upah Minimum, Pengangguran, Jumlah Penduduk Dan Angka Melek Huruf Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 - 2021.” *Jurnal Ekonomi Trisakti* 3, no. 1 (2023): 319–28. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.15412>.
- Lusiana, Fitri Ani Dwi, Fitri Salsabila, and Muhammad Kurniawan. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2014-2023.” *Wawasan : Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan* 2, no. 3 (2024): 202–24.
- Maulana, Angga, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto Suharto. “Pengaruh Tingkat Kemiskinan

- Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 15, no. 1 (2022): 220–29. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v15i1.142>.
- Moeljarto. *Politik Pembangunan Sebuah Analisis Konsep, Arah Dan Strategi*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1995.
- Muhson, Ali. “Teknik Analisis Kuantitatif.” *Academia*, 2006, 1–7.
- Muiz, Aris Nurul, Nila Aprilian, Wulansari Wulansari, Imam Ahmad Dafi, and Elis Nurhasanah. “Analisis Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) Terhadap Angka Kemiskinan Di Indonesia Periode 2013-2022.” *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023): 207–17. <https://doi.org/10.59342/istimrar.v2i2.455>.
- Munandar Eris, Amirullah Mulia, and Nurochani Nila. “Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan.” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 01, no. 1 (2020): 25–38.
- NU Online. “An-Nur Ayat 56,” n.d. <https://quran.nu.or.id/an-nur/56>.
- Nugroho, Hari Baskoro. “Analisis Determinan Kemiskinan: Studi Kasus 34 Provinsi Di Indonesia,” 2022, 7–16.
- Nugroho, Iwan, and Rochimin Dahuri. “Pembangunan Wilayah, Perspektif Ekonom, Sosial, Dan Wilayah.” *Pustaka LP3S*, 2004.
- Permana, Handika, and Esti Pasaribu. “Pengaruh Inflasi, IPM, Dan PDRB Terhadap Kemiskinan Di Pulau Sumatera.” *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* 7, no. 3 (2023): 1113–32.
- Permata, Srianti, Achmad Abubakar, Muhammad Sadiq Sabry, Supriadi Yosup Boni, and Samsul Arifai. “Strategi Penanganan Kemiskinan Dalam Perspektif Al-Quran.” *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2023): 164–77. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v5i2.2066>.
- “Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *123dok*, n.d. <https://123dok.com/article/pertumbuhan-ekonomi-pdrb-dalam-perspektif-ekonomi-islam.zk835mez>.
- Prasetyoningrum, Ari Kristin, and U. Sulia Sukmawati. “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia.” *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2018): 217–40. <https://doi.org/10.24843/eeb.2022.v11i1.p04>.
- Putri, Erliza Millenia, and Dewi Zaini Putri. “Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Indonesia.” *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan* 10, no. 2 (2021): 106–14. <https://doi.org/10.24036/ecosains.11564057.00>.
- Ramadhani, Muhammad, and Difi Dahliana. “Dampak Pengangguran Dan Penyaluran Dana Zakat Infak Sedekah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Kalimantan Selatan.” *Ecoplan* 5, no. 2 (2022): 150–58.
- RI, Menteri Tenaga Kerja. “Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. 01 Tahun 1999 Tentang Upah Minimum,” no. 01 (1999).
- Safitri, Nahella. “Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Sedekah (Zis), Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt), Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Tingkat Kemiskinan.” *UIN Walisongo Semarang*, 2023.
- Sari, Novita Ika. “Determinan Tingkat Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 – 2014.” *Economics Development Analysis Journal* 7, no. 2 (2018): 128–36. <https://doi.org/10.15294/edaj.v8i2.23411>.
- Sari, Yulia Adella. “Pengaruh Upah Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah.” *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 10, no. 2 (2021): 121–30. <https://doi.org/10.35906/je001.v10i2.785>.

- Siregar, Tarmiji Hamid, Fauzi Arif Lubis, and Nurul Inayah. "Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Regional (UMR) Dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Provinsi Sumatera Utara." *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)* 4, no. 1 (2023): 1290–1303.
- "SKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023." Gubernur Jawa Tengah, 2023.
- Sumodiningrat, Gunawan. *Pemberdayaan Masyarakat, Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Supit, Q'rene V. F., Josep B. Kalangi, and Steeva Y. L. Tumangkeng. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Minahasa." *Jurnal Berkala Efisiensi Ilmiah* 23, no. 10 (2023): 73–84. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/51630/44399>.
- Suriani, Nidia, Risnita, and M. Syahran Jailani. "Konsep Populasi Dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan." *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 24–36. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.55>.
- UNSERA. "Variabel Dalam Penelitian: Jenis-Jenis & Cara Menentukannya." *UNSERA Universitas Serang Raya*, n.d. <https://unsera.ac.id/2024/09/19/variabel-dalam-penelitian-jenis-jenis-cara-menentukannya/>.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Data sampel Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2020-2024

Kab/Kota	Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Cilacap	11.46	11.67	11.02	10.99	10.68
Kabupaten Banyumas	13.26	13.66	12.84	12.53	11.95
Kabupaten Purbalingga	15.9	16.24	15.3	14.99	14.18
Kabupaten Banjarnegara	15.64	16.23	15.2	14.9	14.71
Kabupaten Kebumen	17.59	17.83	16.41	16.34	15.71
Kabupaten Purworejo	11.78	12.4	11.53	11.33	10.87
Kabupaten Wonosobo	17.36	17.67	16.17	15.58	15.28
Kabupaten Magelang	11.27	11.91	11.09	10.96	10.83
Kabupaten Boyolali	10.18	10.62	9.82	9.81	9.63
Kabupaten Klaten	12.89	13.49	12.33	12.28	12.04
Kabupaten Sukoharjo	7.68	8.23	7.61	7.58	7.47
Kabupaten Wonogiri	10.86	11.55	10.99	10.94	10.71
Kabupaten Karanganyar	10.28	10.68	9.85	9.79	9.59
Kabupaten Sragen	13.38	13.83	12.94	12.87	12.41
Kabupaten Grobogan	12.46	12.74	11.8	11.72	11.43
Kabupaten Blora	11.96	12.39	11.53	11.49	11.42
Kabupaten Rembang	15.6	15.8	14.65	14.17	14.02
Kabupaten Pati	10.08	10.21	9.33	9.31	9.17
Kabupaten Kudus	7.31	7.6	7.41	7.24	7.23
Kabupaten Jepara	7.17	7.44	6.88	6.61	6.09
Kabupaten Demak	12.54	12.92	12.09	12.01	11.89
Kabupaten Semarang	7.51	7.82	7.27	7.17	6.95
Kabupaten Temanggung	9.96	10.17	9.33	9.26	8.67
Kabupaten Kendal	9.99	10.24	9.48	9.39	9.35
Kabupaten Batang	9.13	9.68	8.98	8.92	8.73
Kabupaten Pekalongan	10.19	10.57	9.67	9.67	8.95
Kabupaten Pemalang	16.02	16.56	15.06	15.03	14.92
Kabupaten Tegal	8.14	8.6	7.9	7.3	6.81
Kabupaten Brebes	17.03	17.43	16.05	15.78	15.6
Kota Magelang	7.58	7.75	7.1	6.11	5.94
Kota Surakarta	9.03	9.4	8.84	8.44	8.31
Kota Salatiga	4.94	5.14	4.73	4.66	4.57
Kota Semarang	4.34	4.56	4.25	4.23	4.03
Kota Pekalongan	7.17	7.59	7	6.81	6.71
Kota Tegal	7.8	8.12	7.91	7.68	7.64

Kab/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Cilacap	9.1	9.97	9.62	8.74	7.83
Kabupaten Banyumas	6	6.05	6.05	6.35	6.18
Kabupaten Purbalingga	6.1	6.05	5.23	5.61	4.96
Kabupaten Banjarnegara	5.86	5.86	6.38	6.26	5.57
Kabupaten Kebumen	6.07	6.03	5.92	5.11	5.07
Kabupaten Purworejo	4.04	3.59	4.45	4.02	3.89
Kabupaten Wonosobo	5.37	5.26	5.01	4.95	4.02
Kabupaten Magelang	4.27	5.03	4.97	4.42	3.55
Kabupaten Boyolali	5.28	5.09	4.92	4.05	3.16
Kabupaten Klaten	5.46	5.48	4.31	4.2	3.97
Kabupaten Sukoharjo	6.93	3.32	2.47	3.4	3.65
Kabupaten Wonogiri	4.27	2.43	1.95	1.92	2.4
Kabupaten Karanganyar	5.96	5.89	5.7	4.35	3.47
Kabupaten Sragen	4.75	4.76	4.69	3.87	3.53
Kabupaten Grobogan	4.5	4.38	4.4	4.02	3.23
Kabupaten Blora	4.89	3.81	3.7	3.1	3.67
Kabupaten Rembang	4.83	3.67	1.76	2.6	2.84
Kabupaten Pati	4.74	4.6	4.45	4.29	3.87
Kabupaten Kudus	5.53	3.77	3.21	3.25	3.19
Kabupaten Jepara	6.7	4.23	4.1	3.35	3.34
Kabupaten Demak	7.31	5.28	6.11	5.38	4.75
Kabupaten Semarang	4.57	5.02	4.81	4.05	3.73
Kabupaten Temanggung	3.85	2.62	2.54	2.32	2.35
Kabupaten Kendal	7.56	7.55	7.34	5.76	5.01
Kabupaten Batang	6.92	6.59	6.64	6.06	5.67
Kabupaten Pekalongan	6.97	4.28	3.23	3.25	3.3
Kabupaten Pemalang	7.64	6.71	6.63	6.55	6.63
Kabupaten Tegal	9.82	9.97	9.64	8.6	7.53
Kabupaten Brebes	9.83	9.78	9.48	8.98	8.35
Kota Magelang	8.59	8.73	6.71	5.25	4.4
Kota Surakarta	7.92	7.85	5.83	4.58	4.61
Kota Salatiga	7.44	7.26	5.58	4.57	3.86
Kota Semarang	9.57	9.54	7.6	5.99	5.82
Kota Pekalongan	7.02	6.89	4.98	5.02	4.91
Kota Tegal	8.4	8.25	6.68	6.05	5.88

Kab/Kota	Produk Domestik Regional Bruto ADHK Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (dalam Miliar)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Cilacap	90011.58	91944.59	96677.84	101839.74	104540.67
Kabupaten Banyumas	39121.62	40686.81	43069.5	45396.3	47795.71
Kabupaten Purbalingga	17182.87	17731.44	18690.73	19533.86	20422.61
Kabupaten Banjarnegara	15045.88	15536.48	16359.11	17174.39	18051.84
Kabupaten Kebumen	19527.66	20253.06	21425.79	22638.9	13837.83
Kabupaten Purworejo	13138.29	13573.47	14300.56	15025.91	15745.98
Kabupaten Wonosobo	13566.18	14064.76	14770.5	15405.98	16109.38
Kabupaten Magelang	22865.15	23661.71	24953.18	26211.56	27538.21
Kabupaten Boyolali	22409.73	23447.37	24931.3	26333.28	27556.18
Kabupaten Klaten	27480.36	28531.11	30214.98	31938.33	33568.92
Kabupaten Sukoharjo	26616.5	27634.12	29185.35	30662.65	32187.41
Kabupaten Wonogiri	20563.14	21251.17	22448.63	23566.88	24728.69
Kabupaten Karanganyar	26103.23	27039.61	28624.99	30208.24	31883.1
Kabupaten Sragen	26367.26	27355.15	28929.81	30442.19	32084.08
Kabupaten Grobogan	19383.03	20115.53	21318.16	22381	23591.06
Kabupaten Blora	17483.89	18126.45	18609.49	19188.79	19776.06
Kabupaten Rembang	13409.63	13925.52	14698.84	15463.55	16248.58
Kabupaten Pati	30527.47	31559.08	33312.38	34984.79	26780.74
Kabupaten Kudus	70964.73	69872.18	71416.93	72980.27	75010.79
Kabupaten Jepara	20973.09	21944.23	23249.85	24451.04	25482.07
Kabupaten Demak	18374.56	18856.42	19846.43	20839.75	21894.6
Kabupaten Semarang	34688.04	35948.86	37857.92	39651.89	41529.4
Kabupaten Temanggung	14890.76	15387.93	16187.37	16998.53	17855.6
Kabupaten Kendal	30449.02	31632.28	33428.96	35287.7	37201.45
Kabupaten Batang	15031.08	15764.27	16704.99	17629.39	18693.22
Kabupaten Pekalongan	16047.51	16615.07	17463.42	18360.81	19283.06
Kabupaten Pemalang	18155.6	18933.19	19895.24	20719.54	21778.06
Kabupaten Tegal	24492.62	25401.91	26705.27	28022.85	29444.38
Kabupaten Brebes	32693.08	33533.33	35378.61	36702.96	38546.98
Kota Magelang	6312.05	6513.89	6889.45	7264.92	7668.79
Kota Surakarta	34815.97	36211.25	38475.99	40620.31	42897.32
Kota Salatiga	9503.71	9822	10365.44	10918.73	11505.05
Kota Semarang	137601.98	144704.57	152995.41	161848.30	170947.72
Kota Pekalongan	7337.83	7601.49	8039.47	8476.55	8928.8
Kota Tegal	10949.12	11290.27	11873.2	12468.61	13119.7

Kab/Kota	Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Tengah (Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Cilacap	2158327	2228904	2230731	2383090	2479106
Kabupaten Banyumas	1900000	1970000	1983261	2118124	2195690
Kabupaten Purbalingga	1940800	1988000	1996814	2130981	2195571
Kabupaten Banjarnegara	1748000	1805000	1819835	1958170	2038005
Kabupaten Kebumen	1835000	1895000	1906781	2035890	2121947
Kabupaten Purworejo	1845000	1905400	1911850	2043902	2127641
Kabupaten Wonosobo	1859000	1920000	1931285	2076209	2159175
Kabupaten Magelang	2042200	2075000	2081807	2236777	2316890
Kabupaten Boyolali	1942500	2000000	2010299	2155712	2250327
Kabupaten Klaten	1947821.16	2011515	2015623	2152323	2244012
Kabupaten Sukoharjo	1938000	1986450	1998153	2138248	2215482
Kabupaten Wonogiri	1797000	1827000	1839043	1968448	2047500
Kabupaten Karanganyar	1989000	2054040	2064313	2207484	2288366
Kabupaten Sragen	1815914.85	1829500	1839429	1969569	2049000
Kabupaten Grobogan	1830000	1890000	1894032	2029569	2116516
Kabupaten Blora	1834000	1894000	1904196	2040080	2101813
Kabupaten Rembang	1802000	1861000	1874332	2015927	2099689
Kabupaten Pati	1891000	1953000	1968339	2107697	2190000
Kabupaten Kudus	2218451.95	2290995	2293058	2439814	2516888
Kabupaten Jepara	2040000	2107000	2108413	2272627	2450915
Kabupaten Demak	2432000	2511526	2513005	2680421	2761236
Kabupaten Semarang	2229880.5	2302798	2311254	2480988	2582257
Kabupaten Temanggung	1825500	1885000	1887832	2027569	2109690
Kabupaten Kendal	2261775	2335735	2340312	2508300	2613573
Kabupaten Batang	2061700	2129117	2135535	2282026	2379702
Kabupaten Pekalongan	2018161.27	2084155	2094646	2247346	2334886
Kabupaten Pemalang	1865000	1926000	1940890	2081783	2156000
Kabupaten Tegal	1896000	1958000	1968446	2106238	2191161
Kabupaten Brebes	1807614	1866723	1885019	2018837	2103100
Kota Magelang	1853000	1914000	1935913	2066007	2142100
Kota Surakarta	1956200	2013810	2035720	2174169	2269070
Kota Salatiga	2034915.42	2101457	2128523	2284180	2378951
Kota Semarang	2715000	2810025	2835021	3060349	3243969
Kota Pekalongan	2072000	2139754	2156213	2305823	2389801
Kota Tegal	1925000	1982750	2005930	2145012	2231628

Kab/Kota	Penyaluran Dana ZIS BAZNAS Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Cilacap	12919453200	13623739978	2118176400	14470772689	20706188268
Kabupaten Banyumas	8269537527	13876897052	15417402081	18892244404	22207433030
Kabupaten Purbalingga	2751018297	3920255445	2456036764	3332762286	4521341928
Kabupaten Banjarnegara	12515074820	2456959146	9092109822	10570432936	7634174003
Kabupaten Kebumen	5652046644	13136975638	2164818355	5777120680	10677935110
Kabupaten Purworejo	3856605000	6468349760	3457308500	5851144279	7169552850
Kabupaten Wonosobo	2218787700	4099456059	2362885100	3243579700	4583232110
Kabupaten Magelang	2381911147	2467805289	1963417540	6313119619	5100575420
Kabupaten Boyolali	8144866553	4446520838	8616211126	8992729051	4234396259
Kabupaten Klaten	5669914332	7077842205	5105133072	5652612357	5866520668
Kabupaten Sukoharjo	3697189818	3724761037	4602615193	8725476512	8198382132
Kabupaten Wonogiri		218850457	322500000	822063495	356082684
Kabupaten Karanganyar	21720166078	20704190501	18779331304	14558789702	
Kabupaten Sragen	3385744026	8112432572	11816022518	12085141147	18369231630
Kabupaten Grobogan		4707030000	5865106833	5688201789	3532803000
Kabupaten Blora	3020321307	7341599912	8290860419	10743986314	11105151019
Kabupaten Rembang	3651771567	3573555966	1965597732	4516084456	2635474577
Kabupaten Pati	4024003500	6108759625	10852246171	7416033210	6610485600
Kabupaten Kudus	3112139481	2177867904	3858656028	4695679311	4225233317
Kabupaten Jepara	3030471641	2987799490	7634470390	6757504242	6483985509
Kabupaten Demak	4659168053		7225875252	9193300374	7398042330
Kabupaten Semarang	33287061383	4579489323	19983517386	2971383818	4851565323
Kabupaten Temanggung		8602798972	7801565513	9700185788	875953826
Kabupaten Kendal	9576488478	9560642758	11883871483	9810156887	12199318767
Kabupaten Batang	536158000		1391959629	791564250	1205929534
Kabupaten Pekalongan	4563142845	3610156977	2807538706	9533213291	3160151315
Kabupaten Pemalang	4974138342	10048861800	8460730700	8322274300	9311572100
Kabupaten Tegal	2512416122	4101835352	4922106105	6022637455	5850438588
Kabupaten Brebes	2996844099	4552645742	5182852653	6197681727	7455965314
Kota Magelang	1034511663	2542556647	3392532086	5296860029	5707050912
Kota Surakarta	1733019423	1938375824	1649396456	6380332028	7754695660
Kota Salatiga	2389488742	1119658065	1299557925	1588294238	2440476453
Kota Semarang	7916648630	8967096729	16351594666	12234127997	12073369415
Kota Pekalongan	2859969895	2015927100	3468213046	3374602828	2141864330
Kota Tegal		2016545722	13284974228	2117291548	2554939054

Pengelompokan Data

Kab/Kota	Tahun	Y	X1	X2	X3	X4
Kabupaten Cilacap	2020	11.46	9.1	90011.58	2158327	12919453200
	2021	11.67	9.97	91944.59	2228904	13623739978
	2022	11.02	9.62	96677.84	2230731	2118176400
	2023	10.99	8.74	101839.74	2383090	14470772689
	2024	10.68	7.83	104540.67	2479106	20706188268
Kabupaten Banyumas	2020	13.26	6	39121.62	1900000	8269537527
	2021	13.66	6.05	40686.81	1970000	13876897052
	2022	12.84	6.05	43069.5	1983261	15417402081
	2023	12.53	6.35	45396.3	2118124	18892244404
	2024	11.95	6.18	47795.71	2195690	22207433030
Kabupaten Purbalingga	2020	15.9	6.1	17182.87	1940800	2751018297
	2021	16.24	6.05	17731.44	1988000	3920255445
	2022	15.3	5.23	18690.73	1996814	2456036764
	2023	14.99	5.61	19533.86	2130981	3332762286
	2024	14.18	4.96	20422.61	2195571	4521341928
Kabupaten Banjarnegara	2020	15.64	5.86	15045.88	1748000	12515074820
	2021	16.23	5.86	15536.48	1805000	2456959146
	2022	15.2	6.38	16359.11	1819835	9092109822
	2023	14.9	6.26	17174.39	1958170	10570432936
	2024	14.71	5.57	18051.84	2038005	7634174003
Kabupaten Kebumen	2020	17.59	6.07	19527.66	1835000	5652046644
	2021	17.83	6.03	20253.06	1895000	13136975638
	2022	16.41	5.92	21425.79	1906781	2164818355
	2023	16.34	5.11	22638.9	2035890	5777120680
	2024	15.71	5.07	13837.83	2121947	10677935110
Kabupaten Purworejo	2020	11.78	4.04	13138.29	1845000	3856605000
	2021	12.4	3.59	13573.47	1905400	6468349760
	2022	11.53	4.45	14300.56	1911850	3457308500
	2023	11.33	4.02	15025.91	2043902	5851144279
	2024	10.87	3.89	15745.98	2127641	7169552850
Kabupaten Wonosobo	2020	17.36	5.37	13566.18	1859000	2218787700
	2021	17.67	5.26	14064.76	1920000	4099456059
	2022	16.17	5.01	14770.5	1931285	2362885100
	2023	15.58	4.95	15405.98	2076209	3243579700
	2024	15.28	4.02	16109.38	2159175	4583232110
Kabupaten Magelang	2020	11.27	4.27	22865.15	2042200	2381911147
	2021	11.91	5.03	23661.71	2075000	2467805289
	2022	11.09	4.97	24953.18	2081807	1963417540
	2023	10.96	4.42	26211.56	2236777	6313119619
	2024	10.83	3.55	27538.21	2316890	5100575420
Kabupaten Boyolali	2020	10.18	5.28	22409.73	1942500	8144866553

	2021	10.62	5.09	23447.37	2000000	4446520838
	2022	9.82	4.92	24931.3	2010299	8616211126
	2023	9.81	4.05	26333.28	2155712	8992729051
	2024	9.63	3.16	27556.18	2250327	4234396259
Kabupaten Klaten	2020	12.89	5.46	27480.36	1947821.16	5669914332
	2021	13.49	5.48	28531.11	2011515	7077842205
	2022	12.33	4.31	30214.98	2015623	5105133072
	2023	12.28	4.2	31938.33	2152323	5652612357
	2024	12.04	3.97	33568.92	2244012	5866520668
Kabupaten Sukoharjo	2020	7.68	6.93	26616.5	1938000	3697189818
	2021	8.23	3.32	27634.12	1986450	3724761037
	2022	7.61	2.47	29185.35	1998153	4602615193
	2023	7.58	3.4	30662.65	2138248	8725476512
	2024	7.47	3.65	32187.41	2215482	8198382132
Kabupaten Wonogiri	2020	10.86	4.27	20563.14	1797000	
	2021	11.55	2.43	21251.17	1827000	218850457
	2022	10.99	1.95	22448.63	1839043	322500000
	2023	10.94	1.92	23566.88	1968448	822063495
	2024	10.71	2.4	24728.69	2047500	356082684
Kabupaten Karanganyar	2020	10.28	5.96	26103.23	1989000	21720166078
	2021	10.68	5.89	27039.61	2054040	20704190501
	2022	9.85	5.7	28624.99	2064313	18779331304
	2023	9.79	4.35	30208.24	2207484	14558789702
	2024	9.59	3.47	31883.1	2288366	
Kabupaten Sragen	2020	13.38	4.75	26367.26	1815914.85	3385744026
	2021	13.83	4.76	27355.15	1829500	8112432572
	2022	12.94	4.69	28929.81	1839429	11816022518
	2023	12.87	3.87	30442.19	1969569	12085141147
	2024	12.41	3.53	32084.08	2049000	18369231630
Kabupaten Grobogan	2020	12.46	4.5	19383.03	1830000	
	2021	12.74	4.38	20115.53	1890000	4707030000
	2022	11.8	4.4	21318.16	1894032	5865106833
	2023	11.72	4.02	22381	2029569	5688201789
	2024	11.43	3.23	23591.06	2116516	3532803000
Kabupaten Blora	2020	11.96	4.89	17483.89	1834000	3020321307
	2021	12.39	3.81	18126.45	1894000	7341599912
	2022	11.53	3.7	18609.49	1904196	8290860419
	2023	11.49	3.1	19188.79	2040080	10743986314
	2024	11.42	3.67	19776.06	2101813	11105151019
Kabupaten Rembang	2020	15.6	4.83	13409.63	1802000	3651771567
	2021	15.8	3.67	13925.52	1861000	3573555966
	2022	14.65	1.76	14698.84	1874332	1965597732
	2023	14.17	2.6	15463.55	2015927	4516084456

	2024	14.02	2.84	16248.58	2099689	2635474577
Kabupaten Pati	2020	10.08	4.74	30527.47	1891000	4024003500
	2021	10.21	4.6	31559.08	1953000	6108759625
	2022	9.33	4.45	33312.38	1968339	10852246171
	2023	9.31	4.29	34984.79	2107697	7416033210
	2024	9.17	3.87	26780.74	2190000	6610485600
Kabupaten Kudus	2020	7.31	5.53	70964.73	2218451.95	3112139481
	2021	7.6	3.77	69872.18	2290995	2177867904
	2022	7.41	3.21	71416.93	2293058	3858656028
	2023	7.24	3.25	72980.27	2439814	4695679311
	2024	7.23	3.19	75010.79	2516888	4225233317
Kabupaten Jepara	2020	7.17	6.7	20973.09	2040000	3030471641
	2021	7.44	4.23	21944.23	2107000	2987799490
	2022	6.88	4.1	23249.85	2108413	7634470390
	2023	6.61	3.35	24451.04	2272627	6757504242
	2024	6.09	3.34	25482.07	2450915	6483985509
Kabupaten Demak	2020	12.54	7.31	18374.56	2432000	4659168053
	2021	12.92	5.28	18856.42	2511526	
	2022	12.09	6.11	19846.43	2513005	7225875252
	2023	12.01	5.38	20839.75	2680421	9193300374
	2024	11.89	4.75	21894.6	2761236	7398042330
Kabupaten Semarang	2020	7.51	4.57	34688.04	2229880.5	33287061383
	2021	7.82	5.02	35948.86	2302798	4579489323
	2022	7.27	4.81	37857.92	2311254	19983517386
	2023	7.17	4.05	39651.89	2480988	2971383818
	2024	6.95	3.73	41529.4	2582257	4851565323
Kabupaten Temanggung	2020	9.96	3.85	14890.76	1825500	
	2021	10.17	2.62	15387.93	1885000	8602798972
	2022	9.33	2.54	16187.37	1887832	7801565513
	2023	9.26	2.32	16998.53	2027569	9700185788
	2024	8.67	2.35	17855.6	2109690	875953826
Kabupaten Kendal	2020	9.99	7.56	30449.02	2261775	9576488478
	2021	10.24	7.55	31632.28	2335735	9560642758
	2022	9.48	7.34	33428.96	2340312	11883871483
	2023	9.39	5.76	35287.7	2508300	9810156887
	2024	9.35	5.01	37201.45	2613573	12199318767
Kabupaten Batang	2020	9.13	6.92	15031.08	2061700	536158000
	2021	9.68	6.59	15764.27	2129117	
	2022	8.98	6.64	16704.99	2135535	1391959629
	2023	8.92	6.06	17629.39	2282026	791564250
	2024	8.73	5.67	18693.22	2379702	1205929534
Kabupaten Pekalongan	2020	10.19	6.97	16047.51	2018161.27	4563142845
	2021	10.57	4.28	16615.07	2084155	3610156977

	2022	9.67	3.23	17463.42	2094646	2807538706
	2023	9.67	3.25	18360.81	2247346	9533213291
	2024	8.95	3.3	19283.06	2334886	3160151315
Kabupaten Pemalang	2020	16.02	7.64	18155.6	1865000	4974138342
	2021	16.56	6.71	18933.19	1926000	10048861800
	2022	15.06	6.63	19895.24	1940890	8460730700
	2023	15.03	6.55	20719.54	2081783	8322274300
	2024	14.92	6.63	21778.06	2156000	9311572100
Kabupaten Tegal	2020	8.14	9.82	24492.62	1896000	2512416122
	2021	8.6	9.97	25401.91	1958000	4101835352
	2022	7.9	9.64	26705.27	1968446	4922106105
	2023	7.3	8.6	28022.85	2106238	6022637455
	2024	6.81	7.53	29444.38	2191161	5850438588
Kabupaten Brebes	2020	17.03	9.83	32693.08	1807614	2996844099
	2021	17.43	9.78	33533.33	1866723	4552645742
	2022	16.05	9.48	35378.61	1885019	5182852653
	2023	15.78	8.98	36702.96	2018837	6197681727
	2024	15.6	8.35	38546.98	2103100	7455965314
Kota Magelang	2020	7.58	8.59	6312.05	1853000	1034511663
	2021	7.75	8.73	6513.89	1914000	2542556647
	2022	7.1	6.71	6889.45	1935913	3392532086
	2023	6.11	5.25	7264.92	2066007	5296860029
	2024	5.94	4.4	7668.79	2142100	5707050912
Kota Surakarta	2020	9.03	7.92	34815.97	1956200	1733019423
	2021	9.4	7.85	36211.25	2013810	1938375824
	2022	8.84	5.83	38475.99	2035720	1649396456
	2023	8.44	4.58	40620.31	2174169	6380332028
	2024	8.31	4.61	42897.32	2269070	7754695660
Kota Salatiga	2020	4.94	7.44	9503.71	2034915.42	2389488742
	2021	5.14	7.26	9822	2101457	1119658065
	2022	4.73	5.58	10365.44	2128523	1299557925
	2023	4.66	4.57	10918.73	2284180	1588294238
	2024	4.57	3.86	11505.05	2378951	2440476453
Kota Semarang	2020	4.34	9.57	137601.98	2715000	7916648630
	2021	4.56	9.54	144704.57	2810025	8967096729
	2022	4.25	7.6	152995.41	2835021	16351594666
	2023	4.23	5.99	161848.30	3060349	12234127997
	2024	4.03	5.82	170947.72	3243969	12073369415
Kota Pekalongan	2020	7.17	7.02	7337.83	2072000	2859969895
	2021	7.59	6.89	7601.49	2139754	2015927100
	2022	7	4.98	8039.47	2156213	3468213046
	2023	6.81	5.02	8476.55	2305823	3374602828
	2024	6.71	4.91	8928.8	2389801	2141864330

Kota Tegal	2020	7.8	8.4	10949.12	1925000	
	2021	8.12	8.25	11290.27	1982750	2016545722
	2022	7.91	6.68	11873.2	2005930	13284974228
	2023	7.68	6.05	12468.61	2145012	2117291548
	2024	7.64	5.88	13119.7	2231628	2554939054

Lampiran 2

Hasil regresi data panel menggunakan Eviews 12

Hasil statistik deskriptif

Date: 06/25/25 Time: 05:53

Sample: 2020 2024

	Y	X1	X2	X3	X4
Mean	10.71244	5.409762	30437.10	2115245.	6.62E+09
Median	10.59500	5.050000	22752.03	2069004.	5.14E+09
Maximum	17.83000	9.970000	170947.7	3243969.	3.33E+10
Minimum	4.030000	1.760000	6312.050	1748000.	2.19E+08
Std. Dev.	3.413416	1.919333	27837.67	242178.4	5.15E+09
Skewness	0.190905	0.557985	3.106860	1.585466	1.750241
Kurtosis	2.241373	2.805944	13.44019	6.659865	7.379803
Jarque-Bera	5.049051	8.981317	1033.255	164.1459	220.0523
Probability	0.080096	0.011213	0.000000	0.000000	0.000000
Sum	1799.690	908.8400	5113433.	3.55E+08	1.11E+12
Sum Sq. Dev.	1945.785	615.2010	1.29E+11	9.79E+12	4.43E+21
Observations	168	168	168	168	168

Hasil regresi data panel dengan *Common Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	281.1068	32.42693	8.668930	0.0000
X1	0.011687	0.115437	0.101238	0.9195
LOG(X2)	0.566201	0.425570	1.330453	0.1852
LOG(X3)	-20.14306	2.338917	-8.612134	0.0000
LOG(X4)	0.765857	0.277789	2.756976	0.0065
Root MSE	2.755217	R-squared		0.344570
Mean dependent var	10.71244	Adjusted R-squared		0.328486
S.D. dependent var	3.413416	S.E. of regression		2.797156
Akaike info criterion	4.924393	Sum squared resid		1275.325
Schwarz criterion	5.017369	Log likelihood		-408.6491
Hannan-Quinn criter.	4.962127	F-statistic		21.42295
Durbin-Watson stat	0.131096	Prob(F-statistic)		0.000000

Hasil regresi data panel dengan *Fixed Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	108.7696	11.68036	9.312179	0.0000
X1	0.000707	0.047462	0.014906	0.9881
LOG(X2)	-0.884245	0.644359	-1.372287	0.1724
LOG(X3)	-6.097680	0.968615	-6.295257	0.0000
LOG(X4)	-0.016389	0.066695	-0.245732	0.8063
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Root MSE	0.333271	R-squared	0.990410	
Mean dependent var	10.71244	Adjusted R-squared	0.987585	
S.D. dependent var	3.413416	S.E. of regression	0.380328	
Akaike info criterion	1.104566	Sum squared resid	18.65973	
Schwarz criterion	1.829772	Log likelihood	-53.78358	
Hannan-Quinn criter.	1.398890	F-statistic	350.5991	
Durbin-Watson stat	2.610003	Prob(F-statistic)	0.000000	

Hasil regresi data panel dengan *Random Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	113.0043	11.47999	9.843587	0.0000
X1	0.000157	0.045696	0.003441	0.9973
LOG(X2)	-0.479153	0.506661	-0.945709	0.3457
LOG(X3)	-6.691938	0.910261	-7.351669	0.0000
LOG(X4)	-0.002526	0.066299	-0.038094	0.9697
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			2.816184	0.9821
Idiosyncratic random			0.380328	0.0179
Weighted Statistics				
Root MSE	0.382318	R-squared		0.502222
Mean dependent var	0.657860	Adjusted R-squared		0.490006
S.D. dependent var	0.543449	S.E. of regression		0.388137
Sum squared resid	24.55604	F-statistic		41.11373
Durbin-Watson stat	2.034191	Prob(F-statistic)		0.000000
Unweighted Statistics				
R-squared	0.180083	Mean dependent var		10.71244
Sum squared resid	1595.381	Durbin-Watson stat		0.031310

Hasil uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

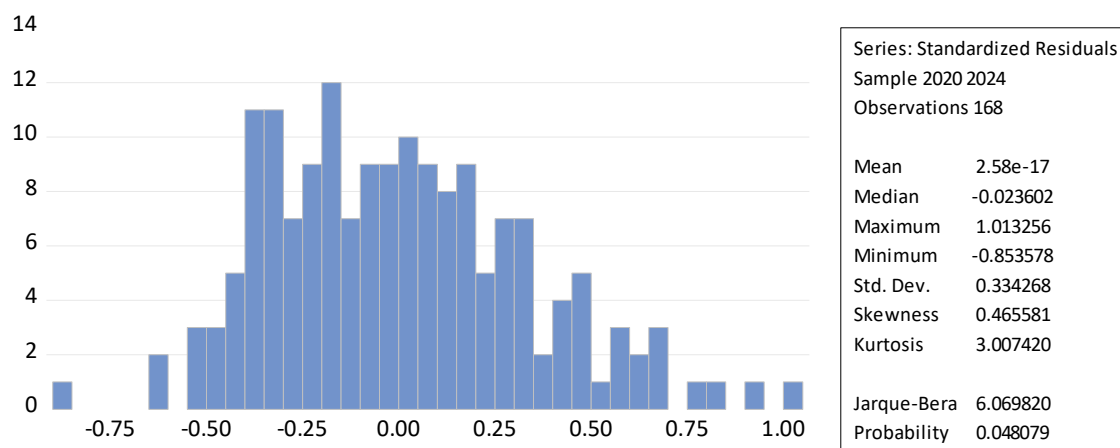
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	255.520192	(34,129)	0.0000
Cross-section Chi-square	709.730952	34	0.0000

Hasil uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	10.491020	4	0.0329

Hasil uji normalitas



Hasil uji multikolinearitas

	X1	LOG(X2)	LOG(X3)	LOG(X4)
X1	1.000000	0.195535	0.032939	0.111702
LOG(X2)	0.195535	1.000000	0.498434	0.379896
LOG(X3)	0.032939	0.498434	1.000000	0.214087
LOG(X4)	0.111702	0.379896	0.214087	1.000000

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Fika Sahala
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam
Tempat Tanggal Lahir : Demak, 30 September 2003
Alamat Asal : Ds. Loireng RT 02 RW 04, Kec. Sayung, Kab. Demak
No. Hp : 089525675239
Email : fikassahala@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

- a) SDN Daleman (2009-2015)
- b) MTs Raudlatul Ulum Pati (2015-2018)
- c) MA Raudlatul Ulum Pati (2018-2021)
- d) UIN Walisongo Semarang (2021-Sekarang)